

Pendidikan Multikultural & Kearifan Lokal

(Keluar dari Konflik: Pengalaman dari Lampung Selatan)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pendidikan Multikultural & Kearifan Lokal

(Keluar dari Konflik: Pengalaman dari Lampung Selatan)

Sri Ilham Nasution

Editor:
Rahmatul Ummah



PUSAKA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DAN KEARIFAN LOKAL
Keluar dari Konflik: Pengalaman dari Lampung Selatanan

Penulis:

Sri Ilham Nasution

Editor:

Rahmatul Ummah

Desain Cover & Layout

Pusaka Media Design

viii + 158 hal : 15.5 x 23 cm
Cetakan, Februari 2022

ISBN: 978-623-418-044-2

Penerbit

PUSAKA MEDIA

Anggota IKAPI

No. 008/LPU/2020

Alamat

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100

Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung

082282148711

email : cspusakamedia@yahoo.com

Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga tulisan *Pendidikan Multikultural dan Kearifan Lokal (Keluar dari Konflik: Pengalaman dari Lampung Selatan)* dapat dihadirkan ke hadapan pembaca sekalian dalam bentuk buku. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Sang Penuntun umat.

Tulisan ini mulanya adalah penelitian untuk Disertasi penulis, atas berbagai saran dari pertimbangan dari beberapa kawan, serta mengingat urgensi pendidikan multikultural dan kearifan lokal dalam penyelesaian konflik, tulisan ini akhirnya diterbitkan dalam bentuk buku, tentu setelah penyuntingan dan penyesesuaian di beberapa bagian.

Tentu, tanpa bantuan banyak guru dan kawan, penulis tidak akan pernah bisa mewujudkan karya kecil ini menjadi sebuah buku. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang terlibat, terutama kepada Prof. Ganefri, Ph.D, Prof. Dra. Nurhizrah Gistituati, M.Ed., Ed.D, Prof. Dr. Ahmad Fauzan, M.Pd., Prof. Dr. Azwar Ananda, M.A., Jalius Jama, M.Ed.,Ph.D., Prof. Dra. Nurhizrah Gistituati, M.Ed., Ed. D., dan Prof. Dr. Mukhaiyar, Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si. Mereka adalah para pihak yang banyak memberi saran dan masukkan untuk kesempurnaan karya ini.

Secara khusus, kepada papaku Drs. H. Mansur Nasution dan Mamaku Hj. Masleha Nasution yang telah mendidik dan membimbing dengan penuh kesabaran dan kasih sayang serta tiada

henti berdoa demi kesuksesan anak-anaknya. Suamiku Asyikin, M.Pd yang selalu sabar, iklas dan penuh kasih sayang membantu penulis serta anak-anakku Muhammad Rafi Alfitra Asri dan Muhammad Afif Al Fahmi Asri yang tiada henti mendoakan ayah dan bundanya.

Dan, ada banyak pihak lain yang tak mungkin dituliskan satu persatu. Doa terbaik, semoga keihlasan atas bantuan yang telah diberikan akan menjadi amal ibadah yang mulia dan mendapat ridho Allah Swt.

Penulis menyadari, buku ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, banyak kekurangan di sana-sini. Untuk itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga karya kecil ini bermanfaat. Amin.

Padang, Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
BAB II	
PENDIDIKAN MULTIKULTURAL	17
A. Memaknai Pendidikan Multikultural	20
B. Tujuan Pendidikan Multikultural	31
C. Urgensi Pendidikan Multikultural.....	36
D. Pendidikan Multikultural dalam Kurikulum.....	39
BAB III	
KEARIFAN LOKAL DAN KONFLIK SOSIAL	59
A. Pengertian Kearifan Lokal	59
B. Wujud dan Ciri-ciri Kearifan Lokal.....	60
C. Fungsi Kearifan Lokal	61
D. Kearifan Lokal Masyarakat Etnik Lampung	63
E. Kearifan Lokal Masyarakat Etnik Bali.....	68
F. Masyarakat Etnik dan Potensi Konflik Sosial	72

BAB IV

KELUAR DARI KONFLIK: PENGALAMAN LAMPUNG SELATAN 80

A. Lampung Selatan dalam Keragaman Etnik 84

B. Keragaman dan Kearifan Lokal di SMPN 1 Sidomulyo..... 91

C. Pendidikan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal di SMPN 1
Sidomulyo 93

D. Pendidikan Multikultural: Pendukung dan Penghambat 116

BAB V

PENUTUP..... 144

DAFTAR PUSTAKA..... 149

TENTANG PENULIS..... 158

BAB I

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara bangsa (*nation-state*) yang sangat kaya dengan keanekaragaman. Keanekaragaman atau kemajemukan tersebut dapat dilihat dari berbagai dimensi. Dari dimensi etnisitas terdapat 656 suku bangsa (Hidayah, 1997), dengan tidak kurang dari 300 jenis bahasa daerah, yang di Irian Jaya (Papua) saja lebih 200 bahasa-bahasa suku bangsa (Koentjaraningrat, 1993). Dari dimensi religiusitas, terdapat beragam agama dan kepercayaan yang dianut masyarakatnya, seperti Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, Konghucu serta berbagai macam aliran kepercayaan, seperti *Permalim* pada masyarakat etnik Batak di Sumatera Utara, *Marapu* pada masyarakat etnik Sumba di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, *Kejawen* pada masyarakat etnik Jawa di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan *Sunda Wiwitan* pada masyarakat etnik Sunda, di Jawa Barat.

Keanekaragaman itu juga muncul dalam bentuk masyarakat pedesaan tradisional, masyarakat pantai dan suku berdampingan dengan masyarakat metropolis yang juga terdiri dari orang-orang berorientasi pada kebudayaan modern atau posmodern (Yaqin, 2005:4). Keanekaragaman tersebut selanjutnya oleh para pendiri bangsa Indonesia yang memiliki pemikiran futuristik bagi keberlanjutan bangsa Indonesia yang maju di masa depan dibingkai dalam pilar kebangsaan *Bhineka Tunggal Ika*.

Sebagai bangsa dengan struktur masyarakat yang multikultur sesungguhnya keragaman itu merupakan potensi yang dapat

menjadikan bangsa Indonesia maju dan unggul. Namun tatkala perbedaan dalam keberagaman itu memunculkan sikap-sikap etnosentris yang berlebihan, arogansi, diskriminatif, berprasangka buruk, serta sikap-sikap intoleran lain yang lebih dominan maka potensi itu justru akan menjadikan bangsa ini rentan terhadap perpecahan melalui berbagai konflik bernuansa SARA (suku antar ras etnik dan agama).

Konflik antarkelompok atau antarindividu yang berbeda sangat mungkin terjadi karena dalam proses interaksi selalu memunculkan berbagai persepsi baik persepsi positif maupun persepsi negatif. Manakala dalam interaksi tersebut terdapat kesamaan tujuan, maka terjadilah kerjasama, dan apabila salah satu individu atau kelompok memiliki kepentingan tertentu serta ingin melebihi individu atau kelompok lainnya maka akan memunculkan persaingan atau kompetisi hingga pertentangan yang dapat memicu konflik. Oleh karenanya sulit bagi bangsa Indonesia untuk menghindari konflik antaretnik maupun agama yang sewaktu-waktu akan muncul.

Berkaitan dengan hubungan antaretnik dan antarumat beragama, dalam catatan sejarah bangsa Indonesia banyak fakta konflik bernuansa SARA yang pernah terjadi di berbagai daerah di Indonesia, seperti; konflik Poso (Sulawesi Tengah) pada tahun 1998 yang kemudian terulang pada tahun 2000. Kemudian pada tahun 1999 terjadi konflik Ambon (Maluku), konflik Sambas (Kalimantan Barat) pada tahun 1999, dan konflik Sampit (Kalimantan Tengah) tahun 2001. Selanjutnya pada tahun 2012 terjadi konflik Balinuraga di Lampung Selatan.

Meskipun peristiwa tersebut awalnya hanya dipicu oleh hal-hal yang terlihat sepele dan oleh pemerintah maupun aparat keamanan tidak diakui sebagai konflik antaretnik maupun konflik antaragama, tetap saja di dalamnya terkandung sekaligus memunculkan sikap sentimen antaretnik bahkan menjadi sentimen antarpemeluk agama yang menjurus pada konflik SARA. Hal ini terindikasi ketika terjadi konflik Balinuraga (Lampung) tahun 2012 yang awalnya hanya melibatkan etnik Bali dan etnik Lampung kemudian meluas menjadi antaretnik Bali dan etnik Lampung bersama etnik pendatang lainnya karena munculnya solidaritas

agama dan unsur sentimen sosial ekonomi yang terpendam. Keterkaitan unsur agama ini juga diungkapkan dalam penelitian Rosidi (2013) yang menyebutkan konflik Balinuraga itu meskipun bukan kasus agama, tetapi ada juga aroma kebencian karena faktor perbedaan agama.

Berbagai peristiwa konflik individu maupun kelompok yang pelakunya mempresentasikan atau menggunakan isu etnik dan agama cenderung berpeluang untuk menjadi konflik antaretnik dan konflik antaragama. Moeis (2006) dalam simpulan penelitiannya menyebutkan bahwa persoalan antaretnik terjadi dalam dua bentuk yaitu pertikaian antarsuku yang berbeda atau beberapa warga lalu berkembang menjadi pertikaian yang menggunakan identitas agama dan suku. Dalam konflik Balinuraga pada 27 Oktober 2012 di Way Panji Lampung Selatan, misalnya, konflik yang menjadi tragedi kemanusiaan dan menjadi sorotan nasional itu awalnya hanya karena persoalan sepele dan individual antara pemuda etnik Bali dari desa Balinuraga dan pemuda etnik Lampung dari desa Agom.

Namun, karena dihembuskan isu (fitnah) yang bernuansa etnik oleh pemuda etnik Lampung dari desa Agom maka dalam perkembangannya berubah menjadi besar dan tidak hanya melibatkan masyarakat etnik Lampung dari desa Agom Lampung Selatan sebagai daerah asal pemuda etnik Lampung yang bertikai. Penyerangan ke desa Balinuraga yang masyarakatnya merupakan pendatang dari pulau Nusa Penida, Bali dengan kehidupan yang mempresentasikan kultur sosial dan spiritual khas masyarakat Hindu Bali itu ternyata melibatkan masyarakat etnik Lampung dari berbagai daerah di Provinsi Lampung bersama masyarakat etnik pendatang lain yang ada di sekitar daerah konflik. Keterlibatan mereka karena didasari solidaritas etnik, solidaritas satu akidah agama, dan sentimen sosial terhadap masyarakat etnik Bali.

Dalam dokumen Pernyataan Sikap Warga masyarakat Lampung Selatan yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Lampung Selatan yang ditandatangani sejumlah tokohnya serta data di Kesbangpolinmas Lampung Selatan, tragedi Balinuraga itu disebutkan sebagai akumulasi dari berbagai konflik yang pernah terjadi di Lampung Selatan pada tahun-tahun sebelumnya antara

1982 hingga 2012 dengan paling tidak delapan kali di luar konflik-konflik kecil yang tidak tercatat, sebagai berikut:

1. Pada tahun 1982 dalam perselisihan pemuda desa Sandaran dan Balinuraga, warga Balinuraga menyerang desa Sandaran dan membakar 2 unit rumah.
2. Pada tahun 2005 masyarakat Bali Agung kecamatan Palas berselisih dengan warga masyarakat etnik Semendo desa Palas Pasemah dan membakar beberapa rumah penduduk di desa Palas Pasmah.
3. Tahun 2009 masyarakat etnik Bali dari kecamatan Ketapang menyerang (melempari) masjid di desa Ruguk kecamatan Ketapang.
4. Pada tahun 2010 masyarakat etnik Bali dari desa Bali Agung menyerang desa Palas Pasemah dengan melakukan pembakaran beberapa rumah penduduk dengan korban 1 orang warga Palas Pasemah meninggal.
5. Tahun 2010 masyarakat etnik Bali dari kecamatan Ketapang menyerang desa Tetaan kecamatan Penengahan dengan menghancurkan gardu ronda dan pangkalan ojek di simpang perempatan desa Gayam kecamatan Penengahan.
6. Pada akhir tahun 2011 masyarakat etnik Bali dari Balinuraga menyerang desa Marga Catur dengan melakukan pembakaran belasan rumah suku Lampung dan saat melakukan penyerangan masyarakat etnik Bali menggunakan simbol-simbol khusus adat Bali.
7. Januari 2012 warga masyarakat etnik Bali dari desa Napal melakukan tindakan premanisme terhadap pemuda desa Kota Dalam, kecamatan Sidomulyo hingga beberapa orang warga Kota Dalam mengalami luka-luka dan beberapa rumah warga etnik Lampung dirusak. Peristiwa tersebut memunculkan pembalasan pembakaran rumah-rumah warga etnik Bali di Dusun Napal oleh masyarakat etnik Lampung.
8. Pada saat malam takbiran Idul Fitri tahun 2012 para pemuda etnik Bali desa Balinuraga melakukan kerusuhan di depan masjid Sidoharjo kecamatan Way Panji saat umat muslim sedang melakukan Takbiran di Masjid.

Meskipun setiap pascakonflik dilakukan perdamaian namun konflik yang melibatkan masyarakat antaretnik masih terus terulang, dengan warga masyarakat etnik Bali selalu terlibat sebagai subyek (pelaku) terhadap warga masyarakat etnik Lampung dan etnik pendatang lainnya (Semendo dan Jawa).



Gambar 1: Ikrar Perdamaian Antaretnik Lampung dan Bali di Balai Keratun Gedung Mahan Agung Pemprov Lampung 04 November 2012 (Sumber: Dokumen Made Gambar)

Peristiwa konflik antaretnik di Lampung Selatan itu membuktikan bahwa provinsi Lampung sebagai daerah yang multikultur merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang rawan konflik bernuansa SARA. Sebagai daerah yang multikultur, masyarakat Lampung memiliki mobilitas yang intens dengan interaksi antaretnik terbuka terhadap pendatang. Interaksi tidak hanya terjadi antar sesama etnik Lampung dari berbagai subetniknya, melainkan juga antar masyarakat etnik Lampung dengan masyarakat etnik pendatang dan antar sesama etnik pendatang.

Kondisi masyarakat Lampung sebagai daerah yang multikultur apabilamerujuk pada pendapat Nasikun (2004:34) paling tidak dapat

dilihat dari dua cirinya yang unik, pertama secara horizontal ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat, serta perbedaan kedaerahan, dan kedua secara vertikal ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Lebih detail lagi ia menyebutkan masyarakat majemuk itu memiliki karakter; 1) terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok- kelompok yang seringkali memiliki kebudayaan, atau lebih tepat sub- kebudayaan yang berbeda satu sama lain; 2) memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat dasar; 3) kurang mengembangkan konsensus di antara para anggota masyarakat tentang nilai- nilai sosial yang bersifat dasar; 4) secara relatif seringkali terjadi konflik antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain; 5) secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan (*coercion*) dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi; serta 6) adanya dominasi politik suatu kelompok atas kelompok-kelompok yang lain. (Nasikun, 2004:34).

Apabila dicermati pada peristiwa konflik antaretnik yang pernah terjadi di Lampung, terutama yang melibatkan masyarakat etnik Lampung dan Bali, maka karakteristik masyarakat majemuk yang dikemukakan oleh Nasikun tersebut benar-benar terbukti. Pertama, bahwa keberadaan etnik pendatang yang menjadikan wilayah Lampung menjadi majemuk atau multikultur akan menciptakan segmen-segmen baru sebagai kebudayaan atau lebih tepat sebagai subkebudayaan yang berbeda satu sama lain (lihat karakteristik 1-4). Perbedaan tersebut tentu tidak sebatas pada wujudnya, melainkan juga perbedaan mendasar dalam penafsiran dan pemahaman nilai oleh masyarakat di luar pendukung kebudayaan tersebut yang dapat memicu konflik. Seperti, perilaku warga masyarakat etnik Bali (yang identik penganut Hindu) membakar dupa wangi dan memelihara babi akan disikapi negatif oleh etnik pendatang lain dan etnik Lampung yang beragama Islam.

Kedua, di tengah perbedaan nilai sosial budaya yang berbeda secara mendasar pada masyarakat etnik asli setempat dan etnik

pendatang, belum pernah ada pengembangan konsensus tentang nilai-nilai yang bersifat dasar (lihat karakteristik (3) Nasikun, 2004). Misalnya, menimbang bahwa masyarakat etnik Bali dengan budaya dan agama Hindu yang berbeda dengan agama yang dianut etnik lain di sekitarnya maka paling tidak harus ada konsensus tentang tata kelola pemeliharaan babi di perkampungan sehingga tidak mengusik etnik dan penganut agama berbeda. Ketiga, bahwa di Lampung sering terjadi konflik yang melibatkan masyarakat etnik pendatang dan masyarakat etnik asli setempat, termasuk konflik terbaru antar masyarakat etnik Bali dan Lampung tahun 2012 (lihat karakteristik (4) Nasikun, 2004). Oleh karena karakteristik yang sedemikian itulah, maka pada masyarakat majemuk atau multikultur seperti Lampung sangat memungkinkan terjadinya konflik antaretnik.

Keberadaan etnik pendatang di Lampung selain menyebar di berbagai wilayah dan membaaur bersama masyarakat dari berbagai etnik termasuk dengan etnik Lampung, juga hidup secara berkelompok (*cluster*) dalam suatu wilayah perkampungan tertentu sesuai etnik atau asal daerahnya. Oleh karena itu di provinsi Lampung dapat dengan mudah dijumpai nama-nama perkampungan yang masyarakatnya secara dominan berasal dari daerah atau kelompok etnik tertentu sehingga wilayah tersebut memiliki nama sesuai dengan etnik atau daerah asal etnik yang mendiaminya. Beberapa wilayah perkampungan itu, seperti; kampung Bugis di Teluk Betung, Bandar Lampung yang mayoritas masyarakatnya merupakan kaum nelayan etnik Bugis, Sulawesi Selatan; kampung Wates di Lampung Tengah yang penduduknya merupakan petani transmigran dari Wates, Jawa Tengah; kampung Sinar Banten dan Sinar Semendo atau Sinar Ogan di Tanjungkarang Bandar Lampung karena di kedua wilayah tersebut banyak dihuni oleh etnik Banten, Jawa Barat dan etnik Ogan dan Semendo, Sumatera Selatan, kampung Ciamis di Lampung Utara yang masyarakatnya berasal dari etnik Sunda, Jawa Barat, serta kampung Balinuraga di Lampung Selatan yang penduduknya merupakan masyarakat etnik Bali dari Pulau Nusa Penida, Bali. Keberadaan etnik pendatang pada suatu wilayah cenderung memiliki karakteristik spesifik yang akan

membentuk kekhasan pada wilayah barunya yaitu berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal yang dibawa dari daerah asalnya, baik berwujud nilai-nilai sosial, budaya, dan spiritual, maupun perilaku dan simbol-simbol etnik.

Nilai-nilai kearifan lokal itu sengaja dihidupkan dan dipertahankan dengan kuat agar dapat menjadi spirit dan pedoman dalam menjalani kehidupan yang harmonis di daerahnya yang baru, sekaligus untuk menunjukkan identitas atau jati diri tentang bagaimana kehidupan mereka dan dari mana mereka berasal. Pada satu sisi hal tersebut dapat dimaknai sebagai upaya melestarikan dan mengembangkan budaya etniknya untuk turut memperkaya khasanah kebudayaan di wilayah barunya itu. Sementara pada sisi lain, manakala antar masyarakat di sekelilingnya kurang memiliki pemahaman yang baik terhadap keragaman dan perbedaan dalam menjalankan kehidupan menurut falsafah nilai-nilai sosial budaya dan spiritual yang mereka anut itu, maka hal tersebut akan menjadi pemicu tumbuhnya sikap-sikap intoleransi, sentimen negatif dan kebencian.

Pengidentifikasian negatif yang kuat seseorang atau kelompok terhadap etnik tertentu cenderung akan menyebabkan seseorang lebih berprasangka sekaligus menjadi sumber yang potensial untuk memunculkan konflik antaretnik bernuansa SARA. Selain itu, dalam kenyataannya upaya-upaya berkedok pelestarian nilai-nilai kearifan lokal semacam itu tidak jarang menimbulkan sikap etnosentrisme yang kaku sehingga seseorang menjadi tidak mampu keluar dari perspektif yang dimiliki atau hanya dapat memahami sesuatu berdasarkan perspektif yang dimiliki dan tidak mampu memahami perilaku orang lain berdasarkan latar belakang budaya yang berbeda. Sikap etnosentrik yang kaku ini sangat berperan dalam menciptakan konflik karena ketidakmampuan memahami perbedaan.

Berangkat dari penelusuran awal di wilayah konflik Lampung Selatan, secara empiris masyarakat etnik Bali komunitasnya hidup secara berkelompok (*cluster*) di desa Balinuraga kecamatan Way Panji dan juga tersebar di beberapa desa di kecamatan Sidomulyo.

Masyarakat etnik Bali di Balinuraga memiliki kekhasan dibandingkan dengan masyarakat etnik pendatang lain. Suasana “Bali” di wilayah tersebut sangat kuat dengan kehidupan sosial budaya dan spiritual yang tertata oleh penerapan nilai-nilai kearifan lokal Bali sebagaimana yang berlaku di daerah asalnya, yakni nilai-nilai agama Hindu Dharma. Hal tersebut dimanifestasikan dalam berbagai bentuk, seperti cara berpakaian, ornamen khas Bali pada rumah penduduk dengan pura keluarga tempat sesaji dan pembakaran dupa peribadatan di halaman depan rumah, bangunan pura desa dan balai pertemuan, dan pemasangan *penjor* atau bambu panjang berhias *janur* (daun kelapa muda) saat menyambut perayaan hari besar Hindu.

Kekhasan kehidupan masyarakat etnik Bali di wilayah konflik Lampung Selatan tersebut sebagaimana tampak pada gambar-gambar berikut:



Keterangan Gambar:

1. Penjor di halaman rumah warga etnik Bali menyambut Kuningan
2. Pura Agung masyarakat Bali Nuraga Way Panji Lampung Selatan
3. Warga Hindu Balinuraga mempersiapkan perayaan Kuningan
4. Hewan peliharaan khas warga masyarakat etnik Bali

Gambar 2: Kehidupan masyarakat etnik Bali di wilayah konflik Lampung Selatan (Sumber: Dokumen Pribadi)

Pandangan negatif juga berkembang pada warga etnik Lampung dan masyarakat etnik pendatang lain terhadap warga etnik Bali di Balinuraga sehingga memunculkan sikap-sikap intoleransi terhadap masyarakat etnik Bali di kawasan tersebut. Hal itu berkaitan dengan perilaku beberapa masyarakat etnik Bali (oknum) yang berprofesi sebagai rentenir, beternak babi yang adakalanya berkeliaran di sekitar lingkungan hunian, pemudanya gemar mengembangkan kemampuan supranatural (ilmu kebal dan ilmu hitam lainnya) dan bersikap arogan (pamer) untuk kegiatan premanisme, perkelahian antarpemuda dan penyerangan ke desa sekitarnya, serta kecenderungan bersikap eksklusif atau mengkhususkan diri hanya bergaul antarmasyarakat sesama etniknya.

Sementara itu masyarakat etnik Lampung sebagai etnik lokal wilayah setempat juga tidak terlepas dari pandangan negatif oleh masyarakat etnik Bali maupun etnik pendatang lainnya yang ada di wilayah tersebut. Bukan rahasia umum lagi di tengah masyarakat terutama di kalangan etnik pendatang di kawasan manapun di Lampung, bahwa pandangan yang umum berkembang tentang masyarakat etnik Lampung atau orang Lampung adalah bahwa orang Lampung itu terlalu sempit dalam memaknai *Pi'il Pesenggiri*, dan berlebihan atau arogan dalam bertindak dan mengambil keputusan. *Pi'il Pesenggiri* merupakan kearifan lokal masyarakat etnik Lampung yang menjadi falsafah atau pedoman dan tuntunan hidup masyarakat etnik Lampung dengan unsur-unsur; *Juluk Adok* (nama atau julukan adat atau gelar adat), *Nemui Nyimah* (kepatutan dalam menjalin interaksi), *Nengah Nyapur* (kepatutan dalam menempatkan diri), dan *Sakai Sembayan* (kepatutan dalam bekerja sama).

Dalam perkembangannya secara umum falsafah hidup yang penuh keluhuran budi tersebut oleh masyarakat etnik Lampung justru dimaknai dalam arti sempit sebatas "harga diri"-nya orang Lampung. Pemahaman yang sempit dan terlalu berlebihan atas falsafah tersebut menjadikan sekecil apapun permasalahan dengan orang Lampung akan dikait-kaitkan dengan harga diri atau sebagai tindakan yang melukai dan melecehkan harga diri sebagai orang

Lampung. Perasaan terlukai atau terlecehkan itu lazimnya diikuti ketersinggungan yang tinggi hingga memunculkan sikap perilaku emosional secara berlebihan yang bahkan terkadang tidak sebanding dengan masalah-nya. Sikap dan perilaku seperti itu memunculkan kehati-hatian, was-was, enggan, bahkan menghindari diri pada diri masyarakat etnik pendatang untuk “berurusan” atau bermasalah dengan orang Lampung.

Gambaran kondisi empirik mengenai dinamika kehidupan sosial budaya etnik Bali dan Lampung di wilayah konflik Balinuraga Lampung Selatan tersebut mengindikasikan bahwa masing-masing etnik memiliki acuan atau pedoman dalam berinteraksi sosial yang bersumber pada nilai-nilai kearifan lokal maupun nilai-nilai spiritual yang dianutnya. Selain itu juga tersirat adanya proses akulturasi antaretnik yang tidak berlangsung dengan baik, sehingga dibutuhkan media untuk menciptakan interaksi yang harmonis yang dapat menumbuhkan pemahaman, kesadaran, penerimaan dan sikap saling menghargai keberadaan nilai-nilai kearifan lokal maupun spiritual masing-masing etnik beserta segala keragaman dan perbedaan yang menyertainya.

Tragedi kekerasan antaretnik yang terjadi secara sporadis di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya yang terjadi di Lampung Selatan menunjukkan rasa kebersamaan yang dibangun dalam falsafah *Bhinneka Tunggal Ika* begitu rentan terhadap ancaman sikap dan prasangka antarkelompok yang begitu kuat di masyarakat dibandingkan dengan pengakuan atas realitas perbedaan dan keberagaman serta pemahaman nilai-nilai multikultural. Dengan dalih latar belakang kondisi ekonomi, sosial dan politik yang memengaruhinya, tak jarang peristiwa konflik antaretnik memunculkan perilaku yang keluar dari adab atau keluar dari perilaku orang yang beradab, seperti pembakaran rumah tinggal dan rumah ibadah, pemerkosaan, dan pembunuhan (pembantaian). Hal semacam ini menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran hak untuk hidup damai dan sejahtera secara berdampingan dalam bangsa yang multikultur ber-*Bhinneka Tunggal Ika*. Selain menjadi indikator atas rapuhnya pemaknaan terhadap keluhuran budi yang terkandung dalam tatanan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya yang

dibangun, dianut dan dijunjung masyarakat sebagai kearifan lokal masing-masing etnik, kondisi tersebut juga dapat menjadi cermin untuk melakukan instropeksi tentang sistem pendidikan yang dikembangkan bangsa ini.

Multikulturalisme sebagai sebuah paham yang menekankan kesetaraan budaya-budaya lokal tanpa mengabaikan hak-hak dan eksistensi budaya yang lain penting dipahami bersama dan dikembangkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang multikultur. Dalam masyarakat yang heterogen tuntutan akan pengakuan atas eksistensi dan keunikan budaya suatu kelompok etnik sangat lumrah terjadi. Muaranya adalah terciptanya suatu sistem budaya dan tatanan sosial yang stabil dan mapan dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat menjadi pilar kedamaian sebuah bangsa. Dari sinilah kemudian pembumih wacana multikulturalisme patut digulirkan pada ranah pendidikan, yang selanjutnya mungkin dapat berupa pendidikan multikultural (Mahfud, 2009: xxi).

Dalam konteks pendidikan, semua upaya untuk memperbaiki kondisi masyarakat atau mengatasi permasalahan masyarakat akan selalu melibatkan proses pendidikan. Artinya, apapun kondisi masyarakat merupakan cermin atau gambaran dari kondisi pendidikannya. Dengan demikian apabila ingin memperbaiki kondisi realistik masyarakat harus dimulai dari penataan sistem dan metodologis penyelenggaraan pembelajaran. Sikap-sikap humanistik, pluralis, dan demokratis yang menjadi ciri khas masyarakat multikultural dengan begitu dapat dibentuk menggunakan pendidikan multikultural, yakni melalui proses pembelajaran yang hasilnya mengarah kepada upaya menghargai keberagaman dan perbedaan. Proses pembelajaran yang berpijak pada konteks kebhinekaan ini lebih mengarah sebagai bentuk pendidikan yang memperhatikan sekaligus menampung aspirasi keragaman dan perbedaan nilai-nilai sosio kultural yang dianut dan dijunjung sebagai kearifan lokal masyarakatnya. Berpijak dari fakta kebhinekaan tersebut maka pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal menemukan titik urgensinya.

Hadirnya pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal di tengah-tengah dunia pendidikan kita saat ini menjadi hal yang sangat mendesak karena selain menawarkan solusi untuk keluar dari konflik-konflik yang bernuansa SARA, pendidikan ini dapat membentuk toleransi, saling menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi rasa kebersamaan dalam perbedaan. Adanya perbedaan (*diversitas*) dalam masyarakat yang tidak mungkin disatukan juga menjadi faktor penting atas diterapkannya pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal. Diversitas dapat berupa banyak hal, termasuk perbedaan yang secara alamiah diterima oleh individu maupun kelompok dan yang dikonstruksi secara bersama dan menjadi semacam *common sense*.

Maraknya kerusuhan dan konflik yang berlatar belakang etnisitas dan agama menunjukkan bahwa pendidikan kita belum berhasil sepenuhnya menciptakan kesadaran akan keberagaman dan belum menganggap penting pendidikan yang mengakomodasi kearifan lokal. Spektrum kultur masyarakat Indonesia yang amat beragam memang merupakan tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan untuk mengolah bagaimana ragam perbedaan dapat dijadikan asset, bukan sumber perpecahan. Pendidikan multikultural dapat dimanfaatkan untuk membina peserta didik agar tidak tercabut dari akar budayanya. Pendidikan multikultural sesungguhnya tidak sekedar merevisi materi pembelajaran, tetapi juga melakukan reformasi dalam sistem pembelajaran itu sendiri. Secara garis besar paradigma pendidikan multikultural diharapkan dapat menghapus *stereotype*, sikap, dan pandangan egoistik, individualistik dan eksklusif di kalangan peserta didik. Pendidikan multikultural dengan demikian dapat dikondisikan ke arah tumbuhnya pandangan komprehensif terhadap sesama, yaitu sebuah pandangan yang mengakui bahwa keberadaan dirinya tidak dapat dipisahkan atau terintegrasi dengan lingkungan sekeliling yang realitasnya terdiri atas pluralitas etnis, nasionalisme, agama, budaya, dan kebutuhan. (Mahfud, 2009:276).

Keberagaman bangsa Indonesia yang dinaungi falsafah Bhineka Tunggal Ika merupakan khasanah bangsa yang menjadi identitas peradaban sebagai bangsa yang masyarakatnya mampu

hidup berdampingan dalam keberagaman secara damai. Melalui jalur pendidikan visi misi besar bangsa yang terangkum dalam Pancasila secara berkesinambungan perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat untuk membawa pesan perdamaian dalam kerukunan membangun kemajuan bersama di tengah masyarakat yang majemuk. Pendidikan dengan mata pelajaran dan seperangkat kurikulumnya tak dapat dipungkiri merupakan media yang efektif untuk membawa pesan kedamaian dalam kerukunan hidup di tengah masyarakat yang majemuk dan tantangan kemajuan zaman ke depan yang akan semakin terbuka dan tanpa batas. Pada sisi lain konflik sosial yang terjadi meskipun terkadang dipicu oleh hal-hal yang terlihat sepele dan bukan merupakan konflik antaretnik maupun antar agama, tetap saja di dalamnya terkandung sekaligus memunculkan sikap sentimen antaretnik ataupun antaragama yang dapat menjurus terjadinya konflik SARA.

Peristiwa konflik antaretnik yang pernah terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, khususnya konflik yang terjadi di Lampung Selatan sangat penting untuk dicermati dalam kaitannya dengan sistem pendidikan pada sekolah-sekolah di daerah konflik tersebut dalam memfungsikan perannya sebagai mediator dan fasilitator pembentuk pengetahuan dan sikap peserta didik yang menghargai keberagaman dan perbedaan. Dalam kaitan ini perlu dikaji secara mendalam bagaimana pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal pada sekolah di daerah konflik tersebut.

Pada perbincangan dengan beberapa pendidik dan peserta didik pada peninjauan lokasi atau pengamatan awal di SMPN 1 Sidomulyo Lampung Selatan secara empiris terungkap bahwa; (1) pendidik menganggap pendidikan multikultural sebagai mata pelajaran khusus yang berdiri sendiri, peserta didik tidak memahami kearifan lokal masyarakat etnik setempat (etnik Lampung dan etnik Bali), (3) beberapa pendidik mata pelajaran IPS (yang menurut penulis mata pelajaran ini memiliki materi yang sangat dekat atau berkaitan erat dengan dimensi pendidikan multikultural) meskipun memahami kearifan lokal etnik setempat namun tidak memiliki keberanian memanfaatkannya dalam pembelajaran kepada peserta didik.

Kondisi empiris tersebut hampir serupa dengan kondisi yang paparkan dalam hasil penelitian Wulandari (2013) di SMP Negeri 5 Yogyakarta, bahwa; (1) pemikiran pendidik tentang pendidikan multikultural sudah sesuai, tetapi dalam praktiknya terdapat beberapa yang tidak sesuai, (2) pemikiran peserta didik tentang pendidikan multikultural sesuai dengan konsepnya tetapi dalam praktiknya apa yang dilakukan peserta didik tidak mencerminkan nilai-nilai multi-kultural. Pelaksanaan pendidikan multikultural pada lingkup lembaga pendidikan tersebut menunjukkan bahwa antara pengetahuan (teoritis) pendidikan multikultural yang dimiliki pendidik (guru) maupun peserta didik (siswa) secara praktis hasilnya cenderung belum signifikan sehingga bentuk perilakunya tidak mencerminkan nilai-nilai multikultural. Hal tersebut mengindikasikan ketidaksesuaian dapat terjadi karena pemahaman terhadap konsep pendidikan multikultural pada diri pendidik masih kurang sehingga berpengaruh pada kurang optimalnya proses pelaksanaan yang selanjutnya berimbas pada hasil, yakni perilaku peserta didik belum mencerminkan nilai-nilai multikultural.

Pelaksanaan pendidikan multikultural di sekolah harus dapat diupayakan melalui program-program pembelajaran yang terakumulasi dalam berbagai rangkaian kegiatan kurikulum sekolah. Keterkaitan penerapan kurikulum ini terungkap dalam penelitian Hanum (2010), bahwa panduan yang efektif bagi guru untuk mengimplementasikan model pembelajaran multikultural adalah dengan mengintegrasikan model pembelajaran multikultural dalam mata pelajaran secara terpadu, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai contoh bagi siswa. Selain itu juga dalam penelitian. Ichsan (2010) di SMP Negeri 5 Makasar yang menjelaskan penerapan pendidikan multikultural yang dilakukan pendidik tidak hanya dalam wilayah kognitif tetapi juga afektif dan psikomotorik, serta melalui tiga pola kegiatan, yakni kegiatan intrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, dan pemilihan metode pembelajaran sehingga peserta didik yang berbeda suku dapat terakomodasi semua dengan tiga pola tadi.

Berdasarkan perbincangan secara terpisah dengan Bapak Made Gambar, seorang tokoh agama Hindu dan tokoh masyarakat

Balinuraga pada tahap penjajagan lokasi atau pengamatan awal penelitian ini, terungkap bahwa dalam setiap rangkaian peristiwa konflik antaretnik yang pernah terjadi di Lampung Selatan senantiasa diawali oleh insiden pertikaian dengan pelaku utama pemuda atau generasi muda. Diakui juga bahwa telah terjadi degradasi perilaku di kalangan pemuda etnik Bali dalam memahami nilai- nilai budaya maupun agamanya sehingga berperilaku tidak mencerminkan norma-norma masyarakat Bali yang sesungguhnya. Dalam hal ini penulis lebih melihat perilaku pemuda etnik Bali maupun etnik Lampung itu sebagai bentuk keegoisan beragama dan beretnik sehingga pola pikir dan tindakannya akan cenderung tidak intoleran. Keterlibatan pemuda dengan perilakunya itu tentu tidak terlepas juga dari pemahaman nilai-nilai kebangsaan ber-Bhineka Tunggal Ika yang diperolehnya sewaktu menjadi peserta didik pada pendidikan formal atau sekolah maupun pendidikan dalam keluarga.

Urgensi kajian atau penelitian ini berangkat dari realitas sosial bahwa tidak berjalannya upaya pewarisan nilai-nilai sosial budaya secara baik oleh masyarakat etnik Lampung maupun masyarakat etnik Bali kepada generasi mudanya (masyarakat pebelajar atau peserta didik) akan menimbulkan pemahaman dan pemaknaan pesan nilai-nilai sosial budaya antaretnik yang beragam menjadi bias, memunculkan kesalahpahaman dan konflik. Melalui pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal, keberagaman dan perbedaan itu menjadi sumber potensial untuk untuk menciptakan kehidupan masyarakat antaretnik secara harmonis dan damai. Selain itu akan teramat penting karena sekolah diharapkan dapat berperan sebagai agen sekaligus mediator bagi tumbuhnya pemahaman, pengetahuan, dan sikap peserta didik yang arif dalam memaknai keberagaman dan perbedaan budaya antaretnik pada sebuah bangsa yang multikultur.

BAB II

PENDIDIKAN MULTIKULTURAL

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spriritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pengertian pendidikan tersebut menegaskan bahwa pendidikan diharapkan menjadi wadah bagi peserta didik untuk dapat secara aktif mempertajam dan memunculkan ke permukaan potensi-potensi alamiah yang dimilikinya. Definisi ini juga memungkinkan sebuah keyakinan bahwa manusia secara alamiah memiliki dimensi jasad, kejiwaan dan spiritualitas. Di samping itu, definisi yang sama memberi ruang untuk berasumsi bahwa manusia memiliki peluang untuk bersifat mandiri, aktif, rasional, sosial, dan spritual.

Ki Hadjar Dewantara dalam kongres Taman Siswa yang pertama pada 1930 menyebutkan bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelekt), dan tubuh anak. Dalam Taman Siswa tidak boleh dipisah-pisahkan bagian-bagian itu agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didikselaras dengan dunianya.

(Ihsan. 2001:4). Sedangkan Prof. Langeveld, pakar pendidikan dari Belanda memberikan definisi pendidikan sebagai suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai tujuan pendewasaan. (Salam, 1997:3). Selanjutnya Djumransjah (2004: 22) berpendapat pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan, baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan.

Dari berbagai definisi tentang pendidikan tersebut dapat dinyatakan bahwa pendidikan dapat diartikan sebagai:

1. Upaya pendewasaan anak dengan pengarahan dan bimbingan.
2. Suatu usaha sadar untuk menciptakan suatu keadaan atau situasi tertentu yang dikehendaki oleh masyarakat
3. Proses pengembangan potensi diri yang disesuaikan dengan lingkungan dan kebudayaan.
4. Proses pengembangan potensi diri dan pembentukan karakter, kepribadian dan kemampuan secara lengkap (jasmani dan rohani).

Secara rinci cita-cita nasional yang terkait dengan kegiatan pendidikan telah dituangkan dalam Undang-Undang Sisdiknas No.20 Tahun 2003, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Selanjutnya prinsip penyelenggaraan pendidikan secara jelas juga telah diuraikan dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 4, bahwa:

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.

3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Mencermati tujuan pendidikan nasional dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan sebenarnya sudah memberi gambaran ruang gerak yang representatif untuk terselenggaranya pendidikan multikultural yang sesuai dengan latar belakang budaya dan kebhinekaan bangsa Indonesia. Selanjutnya untuk membangun rasa persatuan dan kesatuan serta rasa nasionalisme sekaligus menjawab beberapa problematika kemajemukan, dibutuhkan langkah sistematis yang dapat dijadikan sebagai sebuah gerak- an nasional.

Pendidikan sebagai proses pembudayaan dapat ditinjau dari dua konsep yaitu konsep transmisi budaya dan konsep transformasi budaya. Konsep transmisi kebudayaan yang dikemukakan oleh Tilaar (1999:54) menyatakan bahwa suatu kebudayaan ditransmisikan kepada generasi berikutnya melalui proses imitasi, identifikasi dan sosialisasi. Transmisi budaya belum menggambarkan konsep pendidikan secara utuh, karenamanusia tidak menerima begitu saja apa yang ditranmisikan padanya. Sedangkan pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana yang di- selenggarakan oleh institusi persekolahan untuk membimbing dan melatih perserta didik agar tumbuh kesadaran tentang eksistensi kehidupan dan kemampuan menyelesaikan setiap persoalan kehidupan yang muncul. (Suhartono, 2008:46).

Lembaga pendidikan sebagai pembentuk karakter bangsa mendapat tantangan bagaimana pendidikan dapat menjawab

kebutuhan masyarakat, yakni meredam konflik dan membangun suasana kehidupan yang damai antarkelompok, suku, ras dan agama. Pendidikan menjadi standar dan tolak ukur seberapa jauh sebuah negara itu mampu bersaing di dunia internasional. Semakin baik mutu pendidikan yang dimiliki suatu negara, maka negara tersebut siap bersaing di kancah global. Begitu sebaliknya, semakin rendah mutu pendidikan suatu negara maka negara tersebut kian terpuruk dan tersingkirkan dalam persaingan global (Suparta, 2008:3).

A. Memaknai Pendidikan Multikultural

Keberadaan suatu bangsa pada era ini tidak dapat dilepaskan dari keterhubungan dengan bangsa lain, sehingga menjadikan dunia selayaknya sebuah kampung besar (*globalvillage*). Gelombang teknologi informasi di era global yang semakin terbuka tidak hanya membawa nilai-nilai positif bagi kemajuan peradaban suatu bangsa tetapi juga mengandung bahaya berupa konflik dan perpecahan manakala tidak diiringi sikap saling pengertian untuk menghormati demokrasi, hak-hak asasi manusia (HAM) dan eksistensi suatu kelompok masyarakat. Benturan semacam itu dapat disebabkan oleh faktor: politik, sosial, budaya, ekonomi, ras, bahkan agama (Mahfud, 2006: viii).

Berdasarkan fenomena tersebut, kegiatan pendidikan di Indonesia dituntut untuk memiliki kepekaan menghadapi era global. Peka terhadap tuntutan perubahan zaman dapat juga dimaknai sebagai kesanggupan menghadapi era global yang memustahilkan seseorang dapat hidup dalam homogenitas sekaligus mensyaratkan bahwa di era global seseorang harus memiliki kesanggupan untuk hidup berdampingan secara damai dalam keberagaman yang makin kompleks. Maraknya fenomena perpecahan di tengah masyarakat, baik berupa kerusuhan (tawuran) antarpelajar, antar RT, dan antaretnik yang bersumber dari masih sulitnya menerima keberagaman menjadi cermin betapa pengakuan ber-Bhineka Tunggal Ika saja ternyata tidak cukup tanpa diiringi semangat berdemokrasi mengakui perbedaan dalam tubuh bangsa Indonesia yang majemuk.

Oleh sebab itu untuk membangun persatuan dan kesatuan serta nasionalisme sekaligus menjawab beberapa problematika kemajemukan dibutuhkan langkah sistematis yang dapat dijadikan sebagai sebuah gerakan nasional untuk mengembangkan pendidikan multikultural.

Dasar penyelenggaraan pendidikan multikultural di Indonesia adalah Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Paradigma pendidikan multikultural secara implisit telah menjadi salah satu perhatian pemerintah. Hal itu sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003. Dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Kemudian dalam pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama dan kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Pasal 1 ayat 2 Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 itu dapat dimaknai bahwa pendidikan di Indonesia berkiblat pada masa lalu namun berorientasi pada depan. Dikatakan berkiblat pada masa lalu karena berakar pada produk peradaban bangsa Indonesia yang berupa nilai-nilai falsafah hidup dan keluhuran budi bangsa yang penuh keragaman dan perbedaan, baik pada aspek agama maupun sosial budaya. Sedangkan dikatakan berorientasi ke masa depan karena harus tanggap untuk mengikuti tuntutan perkembangan dan kemajuan zaman. Paradigma pendidikan multikultural yang terkandung dalam pasal 1 ayat 2 tersebut adalah, bahwa dalam pendidikan multikultural, keragaman dan perbedaan agama dan nilai-nilai sosial budaya yang sudah ada dan dianut sebagai falsafah hidup masyarakat harus diakui, diterima, dihargai dan dihormati sehingga dengan demikian dapat menjadi sumber pemersatu bangsa

sekaligus menjadi kunci komunikasi dalam relasi antarbangsa yang berifat global.

Selanjutnya dalam pasal 4 Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang penyelenggaraan pendidikan, dijelaskan bahwa pendidikan di Indonesia diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Penyelenggaraan pendidikan yang di-amanatkan dalam pasal 4 undang-undang tersebut sejalan dengan kompetensi multikultural yang menjadi sasaran atau tujuan penyelenggaraan pendidikan multikultural, yang meliputi; pengembangan identitas kultural, kompetensi hubungan interpersonal, dan kompetensi pemberdayaan per-sonal, dan secara berkaitan sasaran tersebut akan mewujudkan kesadaran dan kebanggaan peserta didik terhadap etnik dan kebudayaan- nya, kemam-puan bekerja sama dalam perbedaan, berjiwa kesetaraan, bersikap toleran, dan demokratis, dengan menerima, mengakui dan menghargai kebhinekaan (etnik, ras, bahasa, agama, ekonomi, gender dan sebagainya).

Pasal 1 dan pasal 4 undang-undang tersebut dapat dimaknai bahwa dalam upaya pelaksanaan pendidikan itu suasana belajar dan proses pembelajarannya harus secara aktif mengembangkan potensi peserta didik. Pemahaman tersebut memiliki konsekuensi dalam penyelenggaraan pendidikan itu pendidik harus dapat menyelenggarakan proses pembelajaran secara menyenangkan dan menggairahkan peserta didik untuk belajar melalui berbagai strategi dan metode pembelajaran. Dalam khasanah pendidikan, proses pembelajaran semacam itu merupakan wujud pem- belajaran berbasis pendekatan konstruktivisme.

Menurut Suparno (1997:49) secara garis besar prinsip-prinsip konstruktivisme adalah: (1) pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri, baik secara personal maupun secara sosial; (2) pengetahuan tidak dipindahkan dari guru ke siswa, kecuali dengan keaktifan siswa sendiri untuk bernalar; (3)siswa aktif mengkonstruksi secara terus menerus, sehingga terjadi perubahan konsep menuju ke konsep yang lebih rinci, lengkap, serta sesuai dengan konsep ilmiah; (4) guru berperan membantu menyediakan sarana dan menciptakan

situasi proses konstruksi siswa berlangsung baik dan lancar.

Pendekatan konstruktivisme semacam itu lebih berorientasi pada aktivitas belajar peserta didik secara lebih luas, demokratis dan terbuka sehingga mampu menimbulkan ketertarikan (senang), kritis, kreatif, inovatif, dan mandiri dalam membangun (mengonstruksi) pengetahuannya karena hakikat peserta didik itu merupakan individu yang memiliki potensiberagam sekaligus kompetensi untuk mengkonstruksi dan mengembangkan pengetahuannya. Dengan demikian dalam proses pembelajaran guru tidak lagi berorientasi kepada dirinya atau berpusat pada dirinya sebagai subjek belajar (*teacher oriented*) yang mendominasi pembelajaran, tetapi mengubahnya menjadi pembelajaran yang berorientasi kepada siswa (*student oriented*) dengan menempatkan siswa sebagai pelaku atau subjek belajar. Dalam proses ini peran guru sebagai agen pembelajaran, atau sebagai fasilitator dan motivator dengan menggunakan berbagai metode dan strategi pembelajaran yang terbuka, demokratis, menarik dan menyenangkan. Hal tersebut sebagaimana ciri-ciri pembelajaran konstruktif yang dikemukakan oleh Siroj (2004), seperti berikut:

1. Menyediakan pengalaman belajar dengan mengkaitkan pengetahuan yang telah dimiliki siswa sedemikian rupa sehingga belajar melalui proses pembentukan pengetahuan.
2. Menyediakan berbagai alternatif pengalaman belajar, tidak semua mengerjakan tugas yang sama, misalnya suatu masalah dapat diselesaikan dengan berbagai cara.
3. Mengintegrasikan pembelajaran dengan situasi yang realistik dan relevan dengan melibatkan pengalaman konkret, misalnya untuk memahami suatu konsep melalui kenyataan kehidupan sehari-hari.
4. Mengintegrasikan pembelajaran sehingga memungkinkan terjadinya transmisi sosial yaitu terjadinya interaksi dan kerja sama seseorang dengan orang lain atau dengan lingkungannya, misalnya interaksi dan kerjasama antara siswa, guru, dan siswa-siswa.
5. Memanfaatkan berbagai media termasuk komunikasi lisan dan tertulis sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif.

6. Melibatkan siswa secara emosional dan sosial sehingga menjadi menarik dan siswa mau belajar.

Berdasarkan paparan tersebut dapat dicermati bahwa Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah memberi ruang yang representatif untuk terselenggaranya pendidikan multikultural di sekolah. Penerapan pendidikan multikultural sangat sejalan dengan pendekatan konstruktivisme, terutama dalam penggunaan metode pembelajaran berbasis PAKEM, yakni pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dalam hal ini Budimansyah, dkk (2009:74-76) mensyaratkan bagi guru yang akan menerapkan pembelajaran berbasis PAKEM untuk memenuhi hal-hal berikut:

1. Memahami sifat yang dimiliki anak.
2. Mengetahui anak secara perorangan.
3. Memanfaatkan perilaku anak dalam pengorganisasian belajar.
4. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah.
5. Mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik.
6. Memanfaatkan lingkungan (fisik, sosial, atau budaya) sebagai sumber belajar.
7. Memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar.
8. Membedakan antara aktif fisik dan aktif mental.

Pendidikan multikultural semacam itu sangat sejalan dengan semangat kebhinekaan yang terkandung dalam sistem pendidikan nasional. Kesadaran kemajemukan atau multikulturalisme merupakan acuan untuk membangun sebuah masyarakat yang memiliki keanekaragaman budaya secara damai dan rukun. Menurut Suparlan (2002:2) upaya-upaya membangun Indonesia yang multikultur mungkin akan terwujud apabila (1) konsep multikulturalisme menyebar luas dan dipahami oleh bangsa Indonesia, serta adanya keinginan bangsa Indonesia pada tingkat nasional maupun lokal untuk mengadopsi dan menjadi pedoman hidupnya; (2) kesamaan pemahaman di antara para ahli mengenai makna multikulturalisme dan bangunan konsep-konsep yang

mendukungnya, dan (3) upaya- upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan cita-cita ini.

Pendidikan multikultural, yang mencuat di Amerika Serikat sekitar tahun 1960-an, merupakan suatu gerakan reformasi yang ditujukan pada perubahan pendidikan yang selama ini melakukan tindak diskriminasi terhadap masyarakat “minoritas,” yaitu masyarakat yang berada di luar “*white-male-Protestant-Anglo Saxon* (WMPA)”. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Banks (2002:1), bahwa:

Multicultural education is a reform designed to make some major changes in the education of students. Multicultural education theorists and researchers believe that many school, college, and university practices related to race and ethnicity are harmful to students and reinforce many of the ethnic stereotype and discriminatory practices in U.S. society.

Gerakan pendidikan multikultural itu untuk mereformasi lembaga- lembaga pendidikan agar memberikan peluang yang sama kepada setiap orang, tanpa melihat asal-usul etnis, budaya, dan jenis kelaminnya, untuk sama-sama memperoleh pengetahuan, kecakapan (skills), dan sikap yang diperlukan untuk dapat berfungsi secara efektif dalam negara-bangsa dan masyarakat dunia yang beragam etnis dan budaya. Pendidikan multikultural merupakan suatu gerakan pembaruan dan proses untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang setara untuk seluruh siswa.

Sebagai sebuah gerakan pembaruan, istilah pendidikan multikultural masih dipandang asing bagi masyarakat umum, bahkan penafsiran terhadap definisi maupun pengertian pendidikan multikultural juga masih diperdebatkan di kalangan pakar pendidikan. Seperti pendapat Hernandez (1989:87), yang mengartikan pendidikan multikultural sebagai perspektif yang mengakui realitas sosial, politik, dan ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu dalam pertemuan manusia yang kompleks dan beragam secara kultur, dan merefleksikan pentingnya budaya, ras, seksualitas dan gender, etnisitas, agama, status sosial, ekonomi, dan pengecualian-pengecualian dalam proses pendidikan.

Selanjutnya Nieto (2002:29) menyebutkan bahwa pendidikan multikultural adalah proses pendidikan yang komperhensif dan mendasar bagi semua peserta didik. Menurutnya pendidikan multikultural di sekolah harus melekat dalam kurikulum dan strategi pengajaran, termasuk juga dalam setiap interaksi yang dilakukan di antara para guru, murid dan keseluruhan suasana belajar mengajar. Jenis pendidikan ini menentang bentuk rasisme dan segala bentuk diskriminasi di sekolah dan masyarakat dengan menerima serta mengafirmasi pluralitas (etnik, ras, bahasa, agama, ekonomi, gender dan lain sebagainya) yang terefleksikan di antara peserta didik, komunitas mereka, dan guru-guru. Karena jenis pendidikan ini merupakan *pedagogi* kritis, refleksi dan menjadi basis aksi perubahan dalam masyarakat, pendidikan multikultural mengembangkan prnisip-prinsip demokrasi dalam berkeadilan sosial.

Sedangkan Banks (2002:3) menyebut pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk *people of color*. Artinya pendidikan multikultural ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan, kemudian memberi apresiasi perbedaan itu dengan semangat egaliter dan toleransi. Menurut Banks (2010:23) pendidikan multikultural adalah cara memandang realitas dan cara berpikir, dan bukan hanya konten tentang beragam kelompok etnis, ras, dan budaya. Secara spesifik dinyatakan juga bahwa pendidikan multikultural dapat dikonsepsi-kan atas lima dimensi yang saling berkaitan, yaitu:

1. Integrasi konten (*content integration*); pemaduan konten mengenai sejauh mana guru menggunakan materi dari beragam budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep, prinsip, generalisasi sertateori dalam mata pelajaran atau disiplin ilmu.
2. Proses penyusunan pengetahuan (*the knowledge contruction process*); sesuatu yang berhubungan dengan sejauh mana guru membantu siswa membangun pengetahuannya atas suatu budaya dengan memahami, menyelidiki, dan menentukan asumsi dan implikasi yang tersirat, kerangka acuan, perspektif dan prasangka di dalamnya.

3. Paedagogi kesetaraan (*an equity paedagogy*); berhubungan dengan kemampuan guru untuk mengubah dan menyesuaikan metode, strategi pembelajarannya untuk memfasilitasi prestasi akademis siswa dari berbagai kelompok ras, budaya, dan kelas sosial. Termasuk dalam pedagogi ini adalah penggunaan beragam gaya mengajar yang konsis- ten dengan banyaknya gaya belajar di dalam berbagai kelompok sosial, budaya dan ras.
4. Mengurangi prasangka (*prejudice reduction*); dimensi ini fokus pada kemampuan guru dalam mengidentifikasi karakteristik sikap rasial siswa dan mengubahnya melalui metode pembelajaran yang partisipatif dan interaktif (meningkatkan partisipasi dan interaksi siswa) menuju budaya akademik yang toleran dan inklusif.
5. Memberdayakan budaya dan struktur sosial sekolah (*empowering school culture and social structure*); sebuah upaya untuk membangun budaya dan struktur sosial sekolah dengan memberdayakan interaksi siswa dari beragam kelompok ras, etnis dan budaya.

Kelima dimensi tersebut lebih banyak ditujukan kepada peran, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dan terutama guru sebagai pelaksana utama pendidikan. Peran kepala sekolah berkaitan dengan kebijakan yang memungkinkan dapat dan tidaknya sekolah melaksanakan pendidikan multikultural, termasuk sarana dan prasarana pendukungnya. Peran guru berkaitan dengan kemampuan paedagogik, terutama kemam- puan dalam menyajikan pembelajaran yang memperhatikan keberagaman peserta didik (*pluralis*), demokratis (adil dan tidak diskriminatif), dan menyenangkan.

Selanjutnya Zamroni (2011:114) mendefinisikan pendidikan multi-kultural sebagai suatu pendekatan progresif untuk melakukan transformasi pendidikan yang secara holistik memberikan kritik dan menunjukkan kelemahan-kelemahan, kegagalan-kegagalan dan diskriminasi yang terjadi di dunia pendidikan. Cukup banyak kelemahan dan kegagalan yang telah terjadi dalam pendidikan di Indonesia yang dapat dengan mudah dilihat masyarakat, seperti,

penggunaan kata-kata dan umpatan kasar yang dalam budaya masyarakat dahulu dianggap tabu saat ini semakin bebas.

Selain itu sikap perilaku empati, toleransi, dan apresiasi terhadap nilai-nilai agama, sosial dan budaya semakin menurun. Kegiatan keagamaan, sosial dan kebudayaan yang bersifat seremonial cukup banyak diselenggarakan namun pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya belum banyak tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika terjadi peristiwa konflik sosial yang disertai kekerasan dan kerusakan banyak orang yang mempertanyakan orang dari suku apa mereka, apa agama mereka, masyarakatnya yang sudah memiliki peradaban budaya atau belum, dan sebagainya yang akhirnya orang-orang akan mempertanyakan tentang apa dan bagaimana pelaksanaan pendidikan di sekolah-sekolah di negara ini.

Menghilangkan diskriminasi sebagai salah satu tujuan utama gerakan pendidikan multikultural dengan tegas dinyatakan Banks (2002:4) seperti dalam nukilan berikut.

Another major goal of multicultural education is to reduce the pain and discrimination that members of some ethnic and racial groups experience because of their unique racial, physical, and cultural characteristics.

Groups such as African Americans, Native Americans, Asian Americans, and Latinos Americans have been historically—and are today—victims of institutional racism in the United States. However, racism today is much more subtle and less blatant than it was prior to the Civil Rights Movement of the 1960s and 1970s.

Jadi, latar belakangnya adalah adanya pengalaman pahit kelompok- kelompok etnis Afro-Amerika, pribumi Amerika, Asia-Amerika, dan Amerika Latin yang pernah dan masih sedang menjadi korban diskriminasi, bukan saja dalam kehidupan kemasyarakatan, melainkan juga secara legal kelembagaan (dalam undang-undang pun terdiskriminasikan). Kuatnya diskriminasi di Amerika Serikat itu digambarkan betapa sulitnya orang kulit berwarna di Amerika Serikat mendapatkan kesetaraan hukum, sosial, dan politik sebagai warga negara Amerika Serikat.

Mereka dapat secara hukum tersisihkan sebagai (untuk menjadi) warga negara, atau, jika secara hukum sudah tak masalah, untuk mendapatkan pendidikan tersisihkan juga, dan jika secara akademik tak masalah, dalam kenyataan hidup masih terganjal juga oleh diskriminasi rasial.

Groups of color have experienced three major problems in becoming citizens of the United States. First, they were denied legal citizenship by laws. Second, when legal barriers to citizenship were eliminated, they were often denied educational experiences that would enable them to attain the cultural and language characteristics needed to function effectively in the mainstream society. Third, they were often denied the opportunity to fully participate in mainstream society even when they attained these characteristics because of racial discrimination (Banks, 2002: xi).

Prinsip fleksibilitas pendidikan multikultural disarankan oleh Zamroni (2011:150), dengan menyatakan bahwa amat keliru kalau melaksanakannya pendidikan multikultural harus dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah atau monolitik. Sebaliknya, dia mengusulkan agar pendidikan multikultural diperlakukan sebagai pendekatan untuk memajukan pendidikan secara utuh dan menyeluruh. Pendidikan multikultural juga dapat diberlakukan sebagai alat bantu untuk menjadikan warga masyarakat lebih memiliki toleransi, bersifat inklusif, dan memiliki jiwa kesetaraan dalam hidup bermasyarakat, serta senantiasa berpendirian suatu masyarakat secara keseluruhan akan lebih baik, manakala siapa saja warga masyarakat memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang dimiliki bagi masyarakat sebagai kebutuhan.

Dalam pandangan Zamroni (2011:150), pendidikan multikultural diusulkan untuk dapat dijadikan instrumen rekayasa sosial lewat pendidikan formal, artinya institusi sekolah harus berperan dalam menanamkan kesadaran hidup dalam masyarakat multikultural dan mengembangkan sikap tenggang rasa dan toleransi untuk mewujudkan kebutuhan serta kemampuan bekerjasama dengan segala perbedaan yang ada. Selanjutnya Suparta (2008:35) menyebutkan bahwa pendidikan multikultural adalah sebuah

gerakan reformasi yang mengubah semua komponen aset-aset pendidikan, meliputi nilai-nilai dasarnya, aturan-aturan prosedural, kurikulum, materi-materi instruksional, struktur organisasi dan kebijakan-kebijakannya yang merefleksikan pluralisme budaya.

Pendidikan multikultural dapat dimaknai sebagai usaha-usaha edukatif yang diarahkan untuk dapat menanamkan nilai-nilai kebesamaan kepada peserta didik dalam lingkungan yang berbeda baik ras, etnik, agama, budaya, nilai-nilai, dan ideologi sehingga memiliki kemampuan untuk dapat hidup bersama dalam perbedaan dan memiliki kesadaran untuk hidup berdampingan secara damai. Pendidikan multikultural sederhananya merupakan sikap peduli dan mau mengerti ataupun pengakuan terhadap orang lain yang berbeda. Dalam konteks itu, pendidikan multikultural melihat masyarakat secara lebih luas, mencakup subjek-subjek mengenai ketidakadilan, kemiskinan, penindasan, dan keterbelakangan kelompok-kelompok minoritas dalam berbagai bidang, baik itu sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Dalam konteks kehidupan berbangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika tentu pendidikan multikultural dapat berisi tentang tema-tema toleransi, perbedaan *ethno-cultural* dan agama, bahaya diskriminasi, penyelesaian konflik dan mediasi, hak asasi manusia, demokrasi dan subjek-subjek lain yang relevan.

Pendidikan multikultural di Indonesia menurut Zamroni (2011:159) harus mengupayakan nilai-nilai budaya kedaerahan (suku bangsa) dan agama di Indonesia dapat dipahami, dihargai, dan dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan kebangsaan kewarganegaraan berlandaskan semboyan “*Bhinneka Tunggal Ika*” dan falsafah Pancasila, dengan mengedepankan toleransi dan kerukunan antarbudaya dan pemeluk agama. Oleh karena itu menurutnya jika pendidikan multikultural akan diimplementasikan di Indonesia, haruslah berdasarkan realita Indonesia dan kearifan lokal (*local wisdom* atau *indigenous knowledge*) dalam makna luas dengan memperhatikan karakteristik bangsa dan budaya Indonesia sendiri.

Menurut Suparta (2008:45), selama ini terdapat lima tipologi pendidikan multikultural yang berkembang, yakni:

1. Mengajar mengenai kelompok siswa yang memiliki budaya lain (*culture difference*). Perubahan ini terjadi, ketika siswa dalam transisi dari berbagai kelompok kebudayaan ke dalam *mainstream* budaya yang ada.
2. Hubungan manusia (*human relation*). Program ini membantu siswa dari kelompok-kelompok tertentu sehingga dia dapat mengikuti bersama-sama dengan siswa yang lain dalam kehidupan sosial.
3. *Singles group studies*. Program ini mengajarkan mengenai hal-hal yang memajukan pluralisme tetapi tidak menekankan kepada adanya per-bedaan stratifikasi sosial yang ada di dalam masyarakat.
4. Pendidikan multikultural. Program ini merupakan suatu reformasi pendidikan di sekolah-sekolah dengan menyediakan kurikulum serta materi-materi yang menekankan adanya perbedaan siswa dalam bahasa yang keseluruhannya untuk memajukan pluralisme kebudayaan akan *equilintas* sosial.
5. Pendidikan multikultural yang bersifat rekonstruksi sosial. Program ini merupakan suatu program baru yang bertujuan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan kultural dan menentang ketimpangan sosial yang ada dalam masyarakat. Program ini dinamakan "*critical multicultural education*".

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, dalam kajian ini peneliti menyimpulkan atau memaknai pendidikan multikultural sebagai proses pembelajaran (edukatif) tentang keberagaman (kebhinekaan) bangsa Indonesia beserta upaya-upaya yang menumbuhkembangkan kompetensi multikultural yang berupa kesadaran dan sikap peserta didik untuk me-nerima, mengakui dan menghargai keberagaman (etnik, ras, bahasa, agama, ekonomi, gender dan sebagainya), berjiwa kesetaraan, toleran dan demokratis sesuai dengan karakteristik kearifan lokal bangsa Indonesia.

B. Tujuan Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural memiliki tujuan dan orientasi. Dalam hal ini Banks (2002:1-4) merumuskan empat tujuan gerakan pendidikan multikultural. **Pertama** (dan terutama), membantu

individu memahami diri sendiri secara mendalam dengan mengaca diri dari kaca mata budaya lain (“to help individuals gain greater self-understanding by viewing themselves from the perspectives of other cultures”). **Kedua**, membekali peserta didik pengetahuan mengenai etnis dan budaya-budaya lain, budayanya sendiri dalam budaya “mayoritas,” dan lintas budaya (“to provide students with cultural and ethnic alternatives”), karena selama ini mereka hanya “dicekoki” sejarah dan budaya “dominan,” yaitu sejarah dan budaya Anglo-Amerika. **Ketiga**, mengurangi derita dan diskriminasi ras, warna kulit, dan budaya (“to reduce the pain and discrimination that members of some ethnic groups experience because of their unique racial, physical, and cultural characteristics”). **Keempat**, membantu para peserta didik menguasai kemampuan dasar membaca, menulis dan berhitung (“to help students to master essential reading, writing, and math skills”).

Sementara itu menurut Maarif (2005:93-94), tujuan pendidikan multikultural secara berurutan adalah (1) menciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat majemuk; (2) menumbuhkan kesadaran anak atas kultur mereka sendiri dan menyelaraskannya dengan kenyataan bahwa ada banyak cara hidup selain cara hidup mereka sendiri; (3) menumbuhkan respek terhadap *life style* lain selain *life style* mereka sendiri, sehingga anak akan saling memahami dan menghormati; (4) menumbuhkan komitmen persamaan hak dan keadilan; (5) membuat pilihan-pilihan bagi anak tentang bagaimana bertindak berkaitan dengan isu-isu diskriminasi dan kecurigaan; (6) menghargai dan menghormati kesamaan dan perbedaan; (7) menjadikan anak dapat mengungkapkan kultur dan sejarah mereka sendiri.

Dari perincian tujuan tersebut, utamanya pendidikan multikultural bukan sekedar mempromosikan hubungan manusia, membantu anak didik merasa baik terhadap dirinya atau untuk melindungi anak didik dengan bahasa ibu dan budayanya sendiri, melainkan juga mempromosikan pendidikan dan pencapaian semua anak didik, khususnya mereka yang secara tradisi ditindas dan tidak dianggap di dalam sistem pendidikan. Sementara itu Gorski (2010) menjelaskan tujuan reformasi pendidikan lewat gerakan pendidikan

multikultural itu untuk mengubah sistem pendidikan yang lebih berbasiskan keadilan sosial, kesetaraan-keadilan pendidikan, paedagogi kritis, dan dedikasi, dalam rangka memberikan pengalaman pendidikan yang memungkinkan semua peserta didik mengembangkan sepenuh-penuhnya seluruh potensi dirinya, dan menjadi anggota masyarakat yang sadar sosial dan berperan aktif secara lokal, nasional, dan juga global.

Multicultural education is a progressive approach for transforming education that holistically critiques and responds to discriminatory policies and practices in education. It is grounded in ideals of social justice, education equity, critical pedagogy, and dedication to providing educational experiences in which all students reach their full potentials as learners and as socially aware and active beings, locally, nationally, and globally (Gorski: 2010).

Dengan kata lain, menurut Gorski, ada tiga tujuan utama pendidikan multikultural, yaitu:

1. Menjadikan diskriminasi pendidikan, memberi peluang sama bagi setiap anak untuk mengembangkan potensinya (tujuan instrumental);
2. menjadikan anak dapat mencapai prestasi akademik sesuai potensinya (tujuan terminal internal);
3. menjadikan anak sadar sosial dan aktif sebagai warga masyarakat lokal, nasional, dan global (tujuan terminal akhir eksternal).

Perspektif sintesis pendidikan multikultural memiliki rasional yang paling mendasar di dalam hakikat pengembangan masyarakat multikultural, yang oleh Ekstrand (1997:349) diidentifikasi dalam tiga tujuan yakni tujuan attitudinal, tujuan kognitif, dan tujuan instruksional. Pada tingkat **attitudinal**, pendidikan multikultural berfungsi untuk menyemaikan dan mengembangkan sensitivitas kultural, toleransi kultural, penghormatan pada identitas kultural, pengembangan sikap budaya yang responsis, dan keahlian untuk resolusi konflik. Pada tingkat **kognitif**, pendidikan multikultural memiliki tujuan bagi pencapaian kemampuan akademik, pengembangan pengetahuan tentang kemajemukan budaya,

kompetensi untuk melakukan analisis dan interpretasi perilaku kultural, dan kemampuan untuk membangun kesadaran kritis tentang kebudayaan sendiri. Selanjutnya pada tingkat **instruksional**, pendidikan multikultural memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan melakukan koreksi atas distorsi-distorsi, stereotipe, dan salah informasi tentang kelompok-kelompok etnik dan kultural, strategi hidup di dalam pergaulan multikultural, komunikasi kultural, klarifikasi dan penjelasan tentang dinamika perkembangan kebudayaan.

Menurut Zamroni (2011:114) pendidikan multikultural di sekolah bertujuan memberikan peluang yang sama kepada setiap orang tanpa melihat asal-usul etnis, budaya, dan jenis kelaminnya, untuk sama-sama memperoleh pengetahuan, kecakapan (skills), dan sikap yang diperlukan untuk dapat berfungsi secara efektif dalam negara bangsa dan masyarakat dunia yang beragam etnis dan budaya. Selanjutnya, beberapa tujuan yang akan dikembangkan pada peserta didik dalam proses pendidikan multikultural menurut Zamroni (2011:159) adalah:

1. Siswa memiliki kemampuan berpikir kritis atas apa yang telah dipelajari. Siswa memiliki kesadaran atas sifat sakwasangka kepada pihak lain yang dimiliki, dan mengkaji mengapa dan dari mana sifat itu muncul, serta terus mengkaji bagaimana cara menghilangkannya
2. Siswa memahami bahwa setiap ilmu pengetahuan bagaikan sebuah pisau bermata dua: dapat dipergunakan untuk menindas atau meningkatkan keadilan sosial.
3. Para siswa memahami bagaimana mengaplikasikan ilmu pengetahuanyang dimiliki dalam kehidupan.
4. Siswa merasa terdorong untuk terus belajar guna mengembangkan ilmu pengetahuan yang dikuasainya.
5. Siswa memiliki cita-cita posisi apa yang akan dicapai sejalan dengan apa yang dipelajari.
6. Siswa dapat memahami keterkaitan apa yang dilakukan dengan berbagai permasalahan dalam kehidupan masyarakat berbangsa.

M Amirin (2012:28) menyebutkan, dari perspektif hasil pembelajaran, pendidikan multikultural memiliki tiga sasaran atau tujuan yang akan dikembangkan pada diri setiap siswa; **Pertama**, pengembangan identitas kultural yakni merupakan kompetensi yang dimiliki siswa untuk mengidentifikasi dirinya dengan suatu etnis tertentu. Kompetensi ini mencakup pengetahuan, pemahaman dan kesadaran akan kelompok etnis dan menimbulkan kebanggaan serta percaya diri sebagai warga kelompok etnis tertentu. **Kedua**, kompetensi hubungan interpersonal, yakni kompetensi untuk melakukan hubungan dengan kelompok etnis lain, dengan senantiasa mendasarkan pada persamaan dan kesetaraan, serta menjauhi sifat berprasangka dan stereotip. **Ketiga**, memberdayakan diri sendiri, yakni suatu kemampuan untuk mengembangkan secara terus menerus apa yang dimiliki berkaitan dengan kehidupan multi-kultural.

Secara detail, kompetensi kultural mencakup berbagai hal sebagai berikut:

1. Kompetensi individu untuk menerima, menghormati dan membangun kerjasama dengan siapapun yang memiliki perbedaan-perbedaan dari dirinya.
2. Kompetensi kultural merupakan hasil dari kesadaran atas pengetahuan dan “bias kultural” yang dimilikinya atau sebagai faktor yang memengaruhi perbedaan kultur.
3. Proses pengembangan kompetensi kultural memerlukan pengembangan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku yang memungkinkan seseorang memahami dan berinteraksi secara efisien dengan orang yang memiliki perbedaan kultur.

Bertolak dari istilah kompetensi kultural dalam pandangan M. Amirin (2012:28) tentang sasaran pendidikan multikultural, dalam hal ini penulis lebih cenderung untuk menggunakan istilah kompetensi multikultural. Hal ini berangkat dari pemikiran bahwa dari tiga sasaran yang dikembangkan pada diri setiap siswa melalui pendidikan multikultural, yakni: kompetensi identitas kultural, kompetensi hubungan interpersonal, dan kompetensi pemberdayaan dan pengembangan diri terkait dengan kehidupan multikultural, cenderung lebih terkait dengan kemampuan

pemaknaan siswa terhadap kondisi multikultural.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa tujuan pendidikan multikultural adalah menumbuhkembangkan kompetensi multi- kultural peserta didik; yakni sadar dan bangga terhadap etnik dan kebudayaannya, kemampuan bekerja sama dalam perbedaan, berjiwa kesetaraan, bersikap toleran, dan demokratis, dengan menerima, mengakui dan menghargai kebhinekaan (etnik, ras, bahasa, agama, ekonomi, gender dan sebagainya).

C. Urgensi Pendidikan Multikultural

Pendidikan di sekolah-sekolah terutama dalam materi buku pelajaran cenderung bersifat bias terselubung sehingga memunculkan label yang salah. Maksud pernyataan ini terkait dengan kelaziman materi pada buku pelajaran tertentu yang senantiasa membahas kehidupan sosial budaya tertentu yang itu-itu saja bahkan Jawa sentris atau “serba Jawa” sehingga memunculkan bias terselubung hanya mengenalkan dan mengembangkan budaya mayoritas dan meninggalkan budaya minoritas. Hal seperti itu berdampak juga pada pelabelan atau stereotif negatif dan menumbuhkan etnosentrism. Di sinilah tampak bahwa bangsa Indonesia yang pluralis tengah membutuhkan pendidikan multikultural.

Menurut Cardinas (1975:131), pentingnya pendidikan multi-kultural ini didasarkan pada lima pertimbangan:

1. Ketidakmampuan hidup secara harmoni (*incompatibility*)
2. Tuntutan bahasa lain (*other languages acquisition*)
3. Keberagaman kebudayaan (*cultural pluralism*)
4. Pengembangan citra diri yang positif (*development of positive self-image*)
5. Kesetaraan memperoleh kesempatan pendidikan (*equility of education opportunity*)

Di lain pihak, Gollnick (1983:29) menyebutkan bahwa pentingnya pendidikan multikultural dilatarbelakangi oleh beberapa asumsi:

1. Bahwa setiap budaya dapat berinteraksi dengan budaya lain yang berbeda dan bahkan dapat saling memberi kontribusi.

2. Keadilan sosial dan kesempatan yang setara bagi semua orang merupakan hak bagi semua warga negara.
3. Distribusi kekuasaan dapat dibagi secara sama kepada semua kelompok etnik
4. Sistem pendidikan memberikan fungsi kritis terhadap kebutuhan kerangka sikap dan nilai demi kelangsungan masyarakat demokratis.
5. Para guru dan para praktisi pendidikan dapat mengasumsikan sebuah peran kepemimpinan dalam mewujudkan lingkungan yang mendukung pendidikan multikultural.

Adanya perbedaan dalam masyarakat yang tidak mungkin disatu-ka juga menjadi faktor penting atas diterapkannya pendidikan multikultural. Diversitas itu dapat berupa banyak hal, termasuk perbedaan yang secara alamiah diterima oleh individu maupun kelompok dan yang dikonstruksikan secara bersama dan menjadi semacam *commom sense*.

Menurut Taylor (1994:3-4) yang mengutip Bikhu Parekh, menyebutkan bahwa perbedaan tersebut dapat dikategorikan dalam tiga hal, yakni:

1. Perbedaan subkultur (*subculture diversity*), yaitu individu atau sekelompok masyarakat yang hidup dengan cara pandang dan kebiasaan berbeda dengan komunitas besar dan sistem nilai atau budaya yang berlaku pada umumnya.
2. Perbedaan dalam perspektif (*perspectival diversity*), yaitu individu atau kelompok dengan perspektif kritis terhadap *mainstream* nilai atau budayamapan yang dianut oleh mayoritas masyarakat di sekitarnya.
3. Perbedaan komunalitas (*communal diversity*), yakni individu atau kelompok yang hidup dengan gaya hidup yang *genuine* sesuai dengan identitas komunal mereka (*indigeneous people way of life*).

Menurut Suparta (2008:17), perbedaan-perbedaan tersebut tidak mungkin dihilangkan dalam konteks kehidupan baik secara individu maupun masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan dengan paradigma multikultural sangat penting diterapkan, agar diversitas-diversitas tersebut dapat dibingkai dalam satu frame kebersamaan

dan toleransi. Sementara itu, pendidikan multikultural menjadi penting setidaknya bertumpu pada dua keyakinan. Pertama, secara sosial semua kelompok budaya dapat direpresentasikan dalam hidup berdampingan bersama dengan orang lain.

Kedua, diskriminasi dan rasisme dapat direduksi melalui penetapan citra positif keragaman etnik dan pengetahuan budaya-budaya lain. Oleh karena itu wawasan dan gagasan multikulturalisme perlu dikukuhkan dalam dunia pendidikan. (Arifin, 2008:18).

Sebagai ideologi partisipatoris, multikulturalisme mengusung prinsip-prinsip keragaman, kesetaraan dan penghargaan atas yang lain, sehingga pesan universal pendidikan dapat dirasakan semua pihak. Di sinilah letak urgensi pendidikan multikultural dalam pendidikan formal, yakni dengan membekali peserta didik untuk tidak melakukan tindakan yang bersifat intoleransi di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat karena perbedaan etnik, agama, status sosial dan lainnya khususnya melalui lingkup pendidikan IPS yang memiliki kekhasannya sendiri sesuai dengan visi misinya. Demikian pentingnya pendidikan multikultural di sekolah umum maupun sekolah agama, diharapkan hasilnya akan melahirkan peradaban dan bangunan masyarakat yang toleran, demokratis, penuh kebijakan, suka tolong menolong, tenggang rasa, menjunjung tinggi keadilan, keindahan keharmonisan dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya. Intinya, gagasan dan rancangan sekolah yang berbasis multikultural adalah sebuah keniscayaan dengan catatan bahwa kehadiran-nya tidak mengaburkan dan atau menciptakan ketidakpastian jati diri peserta didik sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang ada.

Berdasarkan pemaparan teoritis tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pendidikan multikultural penting dilaksanakan di sekolah-sekolah karena:

1. Negara Indonesia merupakan negara yang keberagamannya sangat kompleks.
2. Masih kurangnya penerimaan terhadap perbedaan di masyarakat yang telah terbukti dengan masih seringnya konflik yang melibatkan antar etnik dan antar umat beragama di

- beberapa wilayah.
3. Sekolah dengan perangkat kurikulum dan pendidikannya merupakan lembaga yang efektif untuk membekali peserta didik sejak dini dengan pembelajaran yang menumbuhkembangkan kompetensi multikultural.

D. Pendidikan Multikultural dalam Kurikulum

Salah satu tugas dan tanggung jawab lembaga sekolah adalah menyelenggarakan pendidikan yang mencerminkan proses pembudayaan nilai-nilai luhur bangsa kepada peserta didik atau generasi muda. Peserta didik tidak hanya sebatas memahami norma-norma dan pandangan hidup masyarakatnya melainkan juga harus menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam norma itu sebagai bagian dari hidupnya sehingga ketika mereka kembali ke masyarakat mereka dapat menjunjung tinggi dan berperilaku sesuai dengan norma-norma tersebut. Untuk itu diperlukan kurikulum sekolah yang mampu berperan melestarikan berbagai nilai-nilai budaya bangsa dan membudayakan peserta didiknya untuk menjunjung tinggi dan berperilaku sesuai nilai-nilai tersebut.

Dikaitkan dengan era globalisasi sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan mudahnya pengaruh budaya asing menggerogoti budaya lokal, maka peran kurikulum memiliki arti yang sangat penting dalam menangkal berbagai pengaruh yang dapat merusak nilai-nilai luhur bangsa. Dengan demikian kelestarian dan kemantapan identitas bangsa akan tetap terpelihara dengan baik. Peranan ini menekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyebarkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang dianggap relevan dengan realitas kehidupan bangsa yang pluralistik kepada peserta didik.

Kurikuler atau kurikulum merupakan rencana atau sebuah acuan yang mendasar dalam proses pembelajaran yang sangat berguna tentunya bagi pendidik dan peserta didik guna mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kurikuler juga dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pembelajaran agar dapat tercapai tujuan kurikulum. Menurut Hamalik (2001:54), kurikulum ialah “sejumlah mata ajar

yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan. Dalam Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 pada Bab I Pasal 1 ayat 19, yang dimaksud kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. (BSNP, 2006).

Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum, yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Penerapan pendidikan multikultural di sekolah sangat bergantung pada kemampuan sekolah dalam menyusun dan menerapkan kurikulum. Untuk menyusun kurikulum yang berwawasan multikultural menurut Suparta (2008:45) memang tidak mudah. Menurutnya ada dua hal yang harus diperhatikan dalam upaya menyusun kurikulum yang berwawasan multikultural, yaitu:

1. Kebudayaan lokal di Indonesia ratusan jumlahnya, maka dari semua “puncak-puncak kebudayaan daerah” itu harus dipilih beberapa saja yang relevan dan lengkap inventarisasinya;
2. Sejalan dengan otonomi dalam bidang pendidikan, maka sebaiknya pilihan mana yang relevan dan tidak relevan harus diserahkan kepada daerah-daerah otonom untuk merundingkannya sendiri.

Penggunaan kalimat “puncak-puncak kebudayaan daerah” oleh Suparta (2008:45) tersebut cenderung multitafsir atau dapat dimaknai secara beragam, yang salah satunya bermakna ketidakadilan dalam memperlakukan kebudayaan daerah, terutama adanya anggapan kebudayaan nasional yang serba “Jawa sentris”, sehingga dianggap tidak relevan lagi untuk masa saat ini yang telah tercerahkan dengan reformasi. Rasionalnya, ketika ada kebudayaan daerah yang berkedudukan sebagai puncak dan kata puncak itu identik dengan sesuatu yang tinggi atau unggul, maka akan terdapat kebudayaan daerah yang tidak berada di puncak atau tidak unggul dan terpinggirkan. Oleh karena kebudayaan daerah yang berada di puncak atau unggul itulah yang disebut sebagai

kebudayaan nasional dan sejalan dengan itu mendapat perlakuan yang “istimewa” (pembinaan dan pengembangan) oleh pemerintah, lantas bagaimana dengan nasib kebudayaan lain di daerah yang tergolong bukan puncak atau tidak unggul?

Selanjutnya pada sisi pemikiran yang lain, eksistensi kebudayaan daerah menjadi kebudayaan nasional itu selalu muncul melalui proses seleksi alamiah yang akan tumbuh berkembang sesuai sikap apresiatif masyarakat pendukung kebudayaannya itu sendiri. Bahkan dapat dikatakan sikap apresiatif masyarakat yang secara menyeluruh mendukung, berkreasi, dan mempertahankan sehingga menjadikan kebudayaan itu terus hidup dan berkembang itu pun sebagai bagian dari kebudayaan masyarakatnya. Artinya, kebudayaan daerah yang sangat banyak dan beragam itu tidak perlu terbawa atau dibawa dalam konsep yang memuculkan pengkotak-kotakkan budaya “puncak unggul” dan “bukan puncak tidak unggul”.

Dengan demikian tanggung jawab semua pihak dalam menjadikan kebudayaan daerah itu terus berkembang dan bukan sesuatu yang dipaksakan juga tidak terhalangi. Kehadiran negara sebagai lembaga yang menanungi rakyat beserta kebudayaannya memiliki tanggung jawab sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen dan ditetapkan pada 10 Agustus 2002. Dalam pasal 32 ayat 1 disebutkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

Penyelenggaraan pendidikan nasional Indonesia tidak dapat dipisahkan dari upaya memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Hal itu tercermin dalam Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 BAB 1 (ketentuan umum) pasal 1 poin 1, yang menyebutkan bahwa Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Selanjutnya pada poin 16 disebutkan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Dalam kaitan tersebut dapat dimaknai bahwa aspek keberagaman yang menjadi ciri bangsa Indonesia yang multikultur atau ber- Bhineka Tunggal Ika menjadi perhatian penting dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Berkaitan dengan upaya melaksanakan pendidikan multikultural di sekolah, Banks (2010:23) menyatakan bahwa: *“To implement multicultural education in a school, we must reform power relationships, the verbal interaction between teachers and students, the culture of the school, the curriculum, extracurricular activities, attitudes toward minority languages (Beykont, 2000), the testing program, and grouping practices. The institutional norms, social structures, cause-belief statements, values, and goals, of the school must be transformed and reconstructed.”*

Berdasarkan pendapat tersebut, untuk melaksanakan pendidikan multikultural maka sekolah harus mengubah bentuk interaksi antara guru dan peserta didik, budaya sekolah, kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, sikap terhadap perbedaan bahasa, program-program, norma-norma kelembagaan, struktur sosial, nilai-nilai, dan tujuan sekolah. Perubahan-perubahan tersebut harus mencerminkan nilai-nilai multikultural. Kurikulum sekolah menjadi bagian penting dalam pengembangan pendidikan multikultural. Mahfud (2009:5) menjelaskan kurikulum yang dipakai yaitu kurikulum yang mampu memberikan penyadaran toleransi, menghormati keragaman suku, agama, etnis, budaya.

1. Kegiatan Intrakurikuler (*intracurricular activities*)

Menurut Zuhairini (1993:59) kegiatan intrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di sekolah dengan jatah waktu yang telah ditetapkan dalam struktur program dan dimaksudkan untuk mencapai tujuan minimal tiap mata pelajaran. Melalui kegiatan intrakurikuler, pengembangan potensi siswa dapat terwujud melalui proses belajar yang melibatkan peserta didik secara aktif (*active learning*). Wujud kegiatan intrakurikuler adalah tersedianya berbagai mata pelajaran beserta pembagian waktu atau jam pelajaran.

Selanjutnya Mulyana (2004:162) mengatakan, kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan di ruang kelas dengan orientasi peningkatan kemampuan akademis. Kegiatan intrakurikuler ini lazimnya juga dapat dimaknai secara sederhana, yakni sebagai proses belajar mengajar itu sendiri yang merupakan kegiatan inti pada setiapsekolah. Untuk menyelenggarakan kegiatan proses pembelajaran itu selanjutnya guru dan sekolah harus berpedoman pada kurikulum yang berlaku. Distribusi mata pelajaran per jenjang kelas dan alokasi waktu pembelajarannya pada SMP/MTs dalam kurikulum 2013 adalah sebagaiberikut:

Tabel 1: Mata pelajaran pada jenjang SMP/MTs pada Kurikulum 2013

MATA PELAJARAN		ALOKASI WAKTU PER MINGGU		
		VII	VIII	IX
Kelompok A				
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	3	3	3
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3	3	3
3	Bahasa Indonesia	6	6	6
4	Matematika	5	5	5
5	Ilmu Pengetahuan Alam	5	5	5
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
7	Bahasa Inggris	4	4	4
Kelompok B				
1	Seni Budaya	3	3	3
2	Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan	3	3	3
3	Prakarya	2	2	2
JUMLAH ALOKASI WAKTU PER MINGGU		38	38	38

Sumber: Permendikbud RI No. 68 tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMP/MTs

Mencermati uraian tersebut, kegiatan intrakurikuler dapat dimaknaisbagai kegiatan pokok proses pendidikan di sekolah untuk mencapai tujuan pembelajaran mata pelajaran tertentu melalui

proses pembelajaran. Pelaksanaan kegiatan intrakurikuler pada sekolah menengah pertama mengacu kepada Permendikbud RI No. 68 tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMP/MTs, yang memuat pengertian kurikulum, kerangka dasar kurikulum, dan struktur kurikulum (kompetensi inti, mata pelajaran, beban belajar, kompetensi dasar, dan muatan pembelajaran). Masing-masing guru mata pelajaran dalam menyusun RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran) mengacu pada silabus yang memuat kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD.

Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus paling sedikit memuat:

- a. Identitas mata pelajaran; berisi nama mata pelajaran
- b. Identitas Sekolah; meliputi nama satuan pendidikan dan kelas;
- c. Kompetensi Inti; merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran;
- d. Kompetensi Dasar; merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran;
- e. Materi Pokok; memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi;
- f. Pembelajaran; yaitu kegiatan yang akan dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan;
- g. Penilaian; merupakan cara atau proses guru dalam mengumpulkan dan mengolah informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik;
- h. Alokasi Waktu; sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk satu semester atau satu tahun; dan
- i. Sumber Belajar; dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan.

Berdasarkan silabus masing-masing mata pelajaran para pendidik menyusun RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran).

RPP adalah rencana pembelajaran yang disusun oleh guru

untuk direalisasikan dalam satu kali atau lebih pertemuan kegiatan pembelajaran yang diterjemahkan dari ide yang termuat dalam kurikulum dan silabus yang telah dikembangkan secara nasional dalam rangka mencapai Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) tertentu. RPP paling sedikit memuat: (i) tujuan pembelajaran, (ii) materi pembelajaran, (iii) metode pembelajaran, (iv) sumber belajar, dan (v) penilaian.

Komponen-komponen tersebut lazimnya secara operasional diwujudkan dalam format berikut:

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Sekolah :
Mata Pelajaran :
Kelas/Semester :
Nomor RPP :
Materi Pokok :
Alokasi Waktu :

- A. Kompetensi Inti (KI)
- B. Kompetensi Dasar dan Indikator
 - 1. (KD pada KI-1)
 - 2. (KD pada KI-2)
 - 3. (KD pada KI-3) Indikator :
 - 4. (KD pada KI-4) Indikator :

Catatan:

KD-1 dan KD-2 dari KI-1 dan KI-2 tidak harus dikembangkan dalam indikator karena keduanya dicapai melalui proses pembelajaran tidak langsung. Indikator dikembangkan hanya untuk KD-3 dan KD-4 yang dicapai melalui proses pembelajaran langsung.

- C. Tujuan Pembelajaran
- D. Materi Pembelajaran (rincian dari Materi Pokok)
- E. Metode Pembelajaran (Rincian dari Kegiatan Pembelajaran)
- F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran
 - 1. Media

2. Alat/Bahan
 3. Sumber Belajar
- G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
1. Pertemuan Kesatu:
 - a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (...menit)
 - b. Kegiatan Inti (...menit)
 - c. Penutup (...menit)
 2. Pertemuan Kedua: (sesuai kebutuhan)
 - a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (...menit)
 - b. Kegiatan Inti (...menit)
 - c. Penutup (...menit), dan seterusnya.
- H. Penilaian
1. Jenis/teknik penilaian
 2. Bentuk instrumen dan instrumen
 3. Pedoman penskoran

Mencermati komponen yang harus termuat dalam RPP tersebut, terdapat kompetensi paedagogi yang harus dikuasai guru berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal di sekolah. Kompetensi yang dimaksud adalah kemampuan menyampaikan kontens materi pelajaran beserta strategi dan model pembelajaran yang akan diterapkannya. Hal tersebut sebagai-mana dikemukakan Nieto (2002:29), bahwa pendidikan multikultural di sekolah harus melekat dalam kurikulum dan strategi pengajaran, termasuk juga dalam setiap interaksi yang dilakukan di antara para guru, murid dan keseluruhan suasana belajar mengajar.

Dalam paradigma pendidikan multikultural yang diajukan Zamroni (2011:114), pendidikan multikultural di sekolah bertujuan memberikan peluang yang sama kepada setiap orang, tanpa melihat asal-usul etnis, budaya, dan jenis kelaminnya, untuk sama-sama memperoleh pengetahuan, kecakapan (skills), dan sikap yang diperlukan untuk dapat berfungsi secara efektif dalam negara-bangsa dan masyarakat dunia yang beragam etnis dan budaya. Untuk dapat mewujudkan pendidikan multikultural semacam itu tentu dibutuhkan guru yang benar-benar menguasai dan mampu

menerapkan berbagai strategi dan model pembelajaran. Kompetensi guru semacam itu dalam dimensi pendidikan multikultural yang diajukan Banks (2010:23) merupakan dimensi paedagogi kesetaraan. Dimensi paedagogi kesetaraan akan muncul ketika guru mengubah pengajaran mereka ke cara yang akan memfasilitasi prestasi akademis siswa dari berbagai kelompok ras, budaya, dan kelas sosial. Termasuk dalam pedagogi ini adalah penggunaan beragam gaya mengajar yang konsisten dengan banyaknya gaya belajar di dalam berbagai kelompok budaya dan ras.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa komponen intrakurikuler dan keterlibatan guru di dalam kegiatan pembelajaran memiliki pengaruh yang kuat, karena di dalam proses pembelajaran faktor kurikulum dan profesionalitas guru memiliki peran strategis selain faktor pendukung lainnya.

2. Kegiatan Kokurikuler (*Cocurricular activities*)

Menurut Hamiseno (1990:5), kegiatan kokurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran biasa (termasuk waktu libur), yang dilakukan di sekolah ataupun di luar sekolah dengan tujuan menunjang pelaksanaan program intrakurikuler agar siswa dapat lebih menghayati bahan yang telah dipelajarinya serta melatih siswa untuk melaksanakan tugas secara bertanggung jawab. Pelaksanaan kegiatan kokurikuler harus memperhatikan azas-azas yang ditetapkan Kemendikbud, yaitu:

- a. Harus menunjang langsung kegiatan intrakurikuler dan kepentingan belajar siswa.
- b. Tidak merupakan beban yang berlebihan bagi siswa.
- c. Tidak menimbulkan beban pembiayaan tambahan yang memberatkan orang tua siswa.
- d. Memerlukan pengadministrasian, pemantauan (monitoring) dan penilaian.

Berdasarkan pengertian tersebut, kegiatan kokurikuler dapat dimaknai sebagai tanggung jawab yang diberikan guru kepada peserta didik berupa tugas individu atau kelompok yang dilaksanakan di luar jam pelajaran baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Bentuk pelaksanaan kegiatan

kokurikuler antara lain berupa pemberian tugas pekerjaan rumah secara kelompok maupun individu. Pemberian tugas secara kelompok bertujuan untuk mengembangkan sikap gotong royong, saling menghargai, kerja sama yang akhirnya dapat membentuk siswa menjadi masyarakat yang baik. Sedangkan pemberian tugas secara individu bertujuan untuk pengembangan kognitif siswa, minat siswa serta membuat siswa menjadi mandiri. Contoh kegiatan kokurikuler secara umum yaitu Masa Orientasi Siswa (MOS), outbound, study tour, bhakti sosial, proyek membuat alat-alat peraga dan studi wisata ke pusat pengembangan ilmu, dan sebagainya.

3. Kegiatan Ekstrakurikuler (*Extracurricular Activities*)

Menurut Usman (1993:22), kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran (tatap muka) baik dilaksanakan di sekolah maupun di luar sekolah dengan maksud untuk lebih memperkaya dan memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki dari berbagai bidang studi. Kegiatan-kegiatan dalam ekstrakurikuler juga dapat mengembangkan nilai-nilai atau sikap dan menerapkan secara lebih lanjut pengetahuan yang telah dipelajari siswa baik untuk mata pelajaran program inti maupun program pilihan.

Dalam kaitan ini Zuhairini (1993:59) mengatakan kegiatan ekstra- kurikuler adalah kegiatan di luar jam terjadwal (termasuk pada waktu libur) yang dilakukan di luar sekolah dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan siswa, mengenal hubungan antar berbagai mata pelajaran, menyalurkan bakat dan minat serta melengkapi upaya pembinaan manusia seutuhnya. Dalam Permendikbud RI No. 62 tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada pendidikan dasar dan menengah beserta lampirannya yang memuat pedoman kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan, bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik

secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan.

Bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang dapat diselenggarakan sekolah adalah:

- a. Krida, misalnya: Kepramukaan, Latihan Kepemimpinan Siswa (LKS),
- b. Palang Merah Remaja (PMR), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), dan lainnya.
- c. Karya ilmiah, misalnya: Kegiatan Ilmiah Remaja (KIR), kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, penelitian, dan lainnya;
- d. Latihan olah-bakat latihan olah-minat, misalnya: pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, pecinta alam, jurnalistik, teater, teknologi informasi dan komunikasi, rekayasa, dan lainnya;
- e. Keagamaan, misalnya: pesantren kilat, ceramah keagamaan, baca tulis Alquran, retreat, atau bentuk kegiatan lainnya.

Berbagai kegiatan ekstrakurikuler tersebut jika merunut pada dimensi pendidikan multikultural yang diajukan Banks (2002:14) termasuk dalam dimensi budaya sekolah dan struktur sekolah yang memberdayakan. Kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan sekolah dalam rangka pelaksanaan pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal di sekolah dalam pandangan dimensi ini merupakan upaya untuk menciptakan komponen budaya sekolah yang memberdayakan peserta didik dari beragam kelompok, ras, etnis dan budaya. Selain itu akan terbentuk juga karakter kepribadian peserta didik yang bijaksana, toleran dan demokratis dalam cara pandang, pemahaman, maupun perilaku di tengah keberagaman dan perbedaan bangsanya.

4. Kegiatan kurikulum tersembunyi (*Hidden curricular activities*)

Untuk mencapai visi misi dan tujuan pendidikan yang telah ditentukan suatu lembaga pendidikan atau sekolah penyelenggaraan pendidikannya selain melalui kurikulum formal juga diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang mendukung kurikulum formal melalui kurikulum nonformal atau yang lazim disebut kurikulum

tersembunyi (*Hidden curriculum*). Gollnick & Chinn (2006: 377) menyebutkan bahwa selain kurikulum formal, di sekolah juga terdapat kurikulum tersembunyi yang terdiri dari norma-norma tak tertulis, nilai-nilai, dan hubungan sosial sekolah dan suasana kelas yang ada pada kepada peserta didik. Kurikulum tersembunyi mencakup norma dan nilai yang mendukung kurikulum formal yang mencerminkan keragaman dan perbedaan.

Kurikulum tersembunyi sering juga disebut dengan “*Other Curriculum*”, yaitu kurikulum yang merupakan hasil dari “hubungan-hubungan yang berkuasa” di dalam kelas, baik dalam bentuk unsur suprastruktur, kesadaran kelas, patriarki, heteroseksualitas, dan lain sebagainya yang nantinya akan membentuk sebuah habitus. Kurikulum tersembunyi ini dalam praktiknya dapat berupa pola kepemimpinan kelas, kewirausahaan, sopan santun, dan kualitas kelas (Margolis dkk, 2001:3).

Lebih lanjut, Kentli (2009:85) menyebutkan bahwa: “*the hidden curriculum makes the pupils to form transient social relationships, submerge much of their personal identity, and accept the legitimacy of categorical treatment*”. “*hidden curriculum can be found in the social structure of the classroom, the teacher s exercise authority, the rules governing the relationship between teacher and student*”.

Kurikulum tersembunyi dapat berupa struktur organisasi kelas dan sekolah, serta hubungan sosial antarpeserta didik, dengan pendidik, dan tenaga kependidikan, dengan lingkungan, dengan aturan dan segala sesuatu yang ada di sekolah. Kurikulum tersembunyi terlihat bukan sebagai tujuan yang secara khusus dicantumkan dalam tujuan pembelajaran di sekolah, tetapi hasil sampingan dari proses sosial yang terjadi.

Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa kurikulum tersembunyi merupakan penerapan suatu aturan normatif beserta komitmen yang mengiringinya dalam bentuk pelaksanaan nilai-nilai sosial, budaya, agama, maupun kebangsaan yang dibangun untuk mendukung kegiatan pendidikan pada kurikulum formal yang telah ada. Keberadaan kurikulum tersembunyi tersebut karena dilandasi kesadaran bahwa sekolah bukan semata-mata sebagai tempat pembelajaran ilmu pengetahuan yang disuplai oleh kurikulum

standar melainkan juga sebagai tempat pembudayaan norma dan nilai-nilai yang akan turut membentuk kepribadian peserta didik. Dengan demikian kurikulum tersembunyi memiliki dampak yang besar pada hubungan dan pembentukan iklim atau budaya sekolah yang menjiwai peserta didik, guru, bahkan pihak di luar sekolah.

Banks (2010:23-24) menguraikan kurikulum tersembunyi di sekolah seperti nilai dan norma yang seharusnya diperhatikan. Aspek-aspek dari lingkungan sekolah harus diubah menjadi budaya sekolah yang dapat mengajarkan sikap positif terhadap kelompok-kelompok budaya yang beragam dan membantu peserta didik dari kelompok-kelompok tersebut untuk mencapai keberhasilan di bidang akademis.

Mencermati paparan tersebut serta dengan memaknai pendidikan multikultural sebagai proses edukatif maka dapat dinyatakan bahwa pendidikan multikultural dalam kurikulum sangat jelas memiliki ruang untuk diselenggarakan di sekolah-sekolah baik melalui kegiatan intrakurikuler (*intracurricular activities*), kegiatan kokurikuler (*cocurricular activities*), kegiatan ekstrakurikuler (*extracurricular activities*), maupun kegiatan kurikulum nonformal atau kurikulum tersembunyi, yang semuanya itu mengarah pada upaya menumbuh-kembangkan kompetensi multikultural peserta didik.

5. Ruang Lingkup Pendidikan Multikultural pada Mata Pelajaran IPS SMP

Untuk melihat ruang lingkup pendidikan multikultural pada mata pelajaran IPS SMP, patut terlebih dahulu dicermati kedudukan mata pelajaran IPS SMP pada kurikulum 2013 yang memuat harapan, peran, tujuan, dan ruang lingkup materi, kompetensi inti (KI) dan kompetensi dasar (KD) mata pelajaran IPS di SMP. Dalam kurikulum 2013 sebagaimana Permendikbud RI nomor 68 tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMP/MTs, mata pelajaran IPS di SMP/MTs merupakan mata pelajaran yang mengkaji tentang isu-isu sosial dengan unsur kajiannya dalam konteks peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi. Tema yang dikaji adalah fenomena-fenomena yang terjadi di

masyarakat baik masa lalu, masa sekarang, dan kecenderungannya di masa-masa mendatang. Pada jenjang SMP/MTs, mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diharapkan dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai.

Pendidikan IPS mengambil peran untuk memberi pemahaman yang luas dan mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan, yaitu; (1) memperkenalkan konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya, (2) membekali kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, mengatasi masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial, (3) memupuk komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, dan (4) membina kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global.

Tujuan utama pembelajaran IPS adalah untuk membina para peserta didik menjadi warganegara yang mampu mengambil keputusan secara demokratis dan rasional yang dapat diterima oleh semua golongan yang adadi dalam masyarakat. Adapun rincian tujuan mata pelajaran IPS adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

- a. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya;
- b. Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan sosial;
- c. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan;
- d. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama, dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global.

Ruang lingkup materi mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Keruangan dan konektivitas antarruang dan waktu;
- b. Perubahan masyarakat Indonesia pada zaman praaksara, zaman

- Hindu- Budha dan zaman Islam, zaman penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan, masa pergerakan kemerdekaan sampai dengan awal reformasi;
- c. Jenis dan fungsi kelembagaan sosial, budaya, ekonomi dan politik dalam masyarakat;
 - d. Interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi.

Dalam pembelajaran IPS di SMP/MTs pendidik harus memperhatikan juga kompetensi yang menjadi target pembelajarannya kepada peserta didik, baik Kompetensi Inti (KI) maupun Kompetensi Dasar (KD). Kompetensi Inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran. Adapun Kompetensi Dasar, merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran.

Berikut ini rincian Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar untuk mata pelajaran IPS di SMP/MTs kelas VII dalam kurikulum 2013.

Tabel 2: Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar untuk Mata Pelajaran IPS di SMP/MTs Kelas VII

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya	1.1 Menghargai karunia Tuhan YME yang telah menciptakan waktu dengan segala perubahannya. 1.2 Menghargai ajaran agama dalam berfikir dan berperilaku sebagai penduduk Indonesia dengan mempertimbangkan kelembagaan sosial, budaya, ekonomi dan politik dalam masyarakat. 1.3 Menghargai karunia Tuhan YME yang telah menciptakan manusia dan lingkungannya.

<p>2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya</p>	<p>2.1 Meniru perilaku jujur, disiplin bertanggung jawab, peduli, santun dan percaya diri sebagaimana ditunjukkan oleh tokoh-tokoh pada zaman Hindu Buddha dan Islam dalam kehidupannyasekarang.</p> <p>2.2 Menunjukkan perilaku rasa ingin tahu,peduli, menghargai, dan bertanggung-jawab terhadap kelembagaan sosial, budaya, ekonomi, dan politik.</p> <p>2.3 Menunjukkan perilaku santun, toleran dan peduli dalam melakukan interaksisosial dengan lingkungan dan teman sebaya.</p>
<p>3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasaingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata</p>	<p>3.1 Memahami aspek keruangan dan konektivitas antar ruang dan waktu dalam lingkup regional serta perubahandan keberlanjutan kehidupan manusia (ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan politik).</p> <p>3.2 Memahami perubahan masyarakat Indonesia pada zaman praaksara, zamanHindu Buddha dan zaman Islamdalam aspek geografis, ekonomi, budaya, pendidikan dan politik.</p> <p>3.3 Memahami jenis-jenis kelembagaan sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam masyarakat.</p> <p>3.4 Memahami pengertian dinamika interaksi manusia dengan lingkunganalam, sosial, budaya, dan ekonomi.</p>

<p>4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori</p>	<p>4.1 Menyajikan hasil telaah aspek keruangan dan konektivitas antar ruangdan waktu dalam lingkup regional sertaperubahan dan keberlanjutan kehidupan manusia (ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan politik).</p> <p>4.2 Menyajikan hasil pengamatan tentang hasil-hasil kebudayaan dan fikiran masyarakat Indonesia pada zaman praaksara, zaman Hindu Buddha dan zaman Islam dalam aspek geografis, ekonomi, budaya dan politik yang masihhidup dalam masyarakat sekarang.</p> <p>4.3 Menghasilkan gagasan kreatif untuk memahamijenis-jenis kelembagaan sosial, budaya, ekonomi, dan politik dilingkungan masyarakat sekitar.</p> <p>4.4 Mengobservasi dan menyajikan bentuk-bentuk dinamika interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya,dan ekonomi di lingkungan masyarakat sekitar.</p>
---	--

Sumber: Permendikbud RI nomor 68 tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMP/MTs.

Kompetensi dasar tersebut selanjutnya menjadi acuan bagi guru mata pelajaran IPS kelas VII SMP dalam menyusun silabus dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). Terkait dengan upaya memenuhi kebutuhan guru dan siswa dalam proses kegiatan pembelajaran, selanjutnya Kemendikbud menyediakan buku acuan khusus untuk guru berupa Buku Guru, dan Buku Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial untuk siswa. Materi pokok dan pokok bahasan/subpokok bahasan pada buku mata pelajaran IPS untuk SMP sesuai dengan silabus dan kurikulum 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 3: Materi Pokok dan Pokok Bahasan/Subpokok Bahasan untuk Mata Pelajaran IPS di SMP/MTs Kelas VII

NO	MATERI POKOK	POKOK BAHASAN/ SUBPOKOK BAHASAN
1	Keadaan alam dan aktivitas penduduk di Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Letak wilayah dan pengaruhnya bagi keadaan alam Indonesia <ol style="list-style-type: none"> a. Letak astronomis b. Letak geografis Keadaan alam Indonesia 2. Keadaan iklim Indonesia <ol style="list-style-type: none"> a. Bentuk muka bumi dan aktivitas penduduk Indonesia b. Keragaman flora dan fauna di Indonesia 3. Kehidupan sosial masyarakat Indo-nesia pada masa praaksara, Hindu, Budha dan Islam <ol style="list-style-type: none"> a. Kehidupan masyarakat praaksara b. Kehidupan masyarakat masa Hindu-Budha c. Kehidupan masyarakat Indo-nesia masa Islam 4. Konektivitas antarruang dan waktu
2	Keadaan penduduk Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asal usul penduduk Indonesia 2. Ciri atau karakteristik penduduk Indonesia <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah dan kepadatan penduduk Indonesia b. Komposisi penduduk 3. Mobilitas penduduk antarwilayah di Indonesia <ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian dan bentuk mobilitas penduduk b. Sarana dan prasarana mobilitas penduduk 4. Pengertian dan jenis lembaga sosial <ol style="list-style-type: none"> a. Keluarga b. Lembaga pendidikan c. Lembaga ekonomi d. Lembaga politik e. Lembaga agama

3	Potensi dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian dan pengelompokan sumber daya alam 2. Potensi dan sebaran sumber daya alam di Indonesia <ol style="list-style-type: none"> a. Potensi sumber daya udara b. Potensi sumber daya tanah c. Potensi sumber daya air d. Potensi sumber daya hutan e. Potensi sumber daya tambang f. Potensi dan persebaran sumberdaya laut 3. Kegiatan ekonomi dan pemanfaatan potensi sumber daya alam <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan ekonomi b. Pemanfaatan sumber daya alam
4	Dinamika interaksi manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinamika interaksi manusia dengan lingkungan 2. Saling keterkaitan antarkomponen lingkungan 3. Interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi <ol style="list-style-type: none"> a. Interaksi manusia dengan lingkungan alam b. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial c. Interaksi manusia dengan lingkungan budaya d. Interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi 4. Keragaman sosial budaya sebagai hasil dinamika interaksi manusia <ol style="list-style-type: none"> a. Keberagaman suku bangsa b. Keberagaman bahasa c. Keberagaman budaya d. Keberagaman religi 5. Hasil kebudayaan masyarakat Indo-nesia pada masa lalu <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil kebudayaan masyarakat Indonesia pada masa praaksara b. Hasil kebudayaan masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Budha c. Hasil kebudayaan masyarakat Indonesia pada masa Islam

Sumber: Permendikbud RI nomor 68 tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMP/MTs.

Selanjutnya berdasarkan kompetensi dasar (KD), materi pokok, pokok bahasan dan subpokok bahasan mata pelajaran IPS sebagaimana dalam tabel 2 dan tabel 3, dilakukan analisis kesesuaiannya dengan dimensi pendidikan multikultural yang diajukan oleh Banks (2010:23) yang meliputi; 1) dimensi integrasi konten (*content integration*), 2) dimensi proses penyusunan pengetahuan (*the knowledge construction process*), 3) dimensi paedagogi kesetaraan (*an equity paedagogy*), 4) dimensi pengurangan prasangka (*prejudice reduction*), dan dimensi pemberdayaan struktur sosial budaya sekolah (*empowering school culture and social structure*). (lihat halaman 25). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa ruang lingkup pendidikan multikultural dalam mata pelajaran IPS SMP/MTs adalah materi pembelajaran pada kompetensi dasar (KD) mata pelajaran IPS SMP/MTs kurikulum 2013 yang memenuhi dimensi pendidikan multi-kultural yang diajukan oleh Banks (2010:23). Selanjutnya dalam kaitannya dengan kearifan lokal, maka ruang lingkup kearifan lokal yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kearifan lokal masyarakat etnik Lampung maupun etnik Bali yang dapat dipadukan untuk menjadi basis pendidikan multikultural di SMN 1 Sidomulyo melalui pembelajaran mata pelajaran IPS.

BAB III

KEARIFAN LOKAL, MASYARAKAT ETNIK DAN KONFLIK SOSIAL

A. Pengertian Kearifan Lokal

Kearifan lokal secara etimologi merupakan padanan kata dalam bahasa Inggris “*local*” dan “*wisdom*” yang menurut arti kamus kata “*local*” berarti setempat dan kata “*wisdom*” berarti kebijaksanaan. Kata kebijaksanaan itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata bijaksana yang disejajarkan dengan kecendikiaan dan kearifan yang berarti kepandaian menggunakan akal budi (Depdikbud, 1990:115). Dengan demikian dari pemahaman etomologis tersebut kearifan lokal dapat disepadankan dengan seperangkat kecerdasan, kepandaian, keberilmuan, dan pengetahuan yang dikembangkan berlandaskan akal budi untuk menghasilkan kebijaksanaan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat setempat secara luas.

Gobyah dan Geriya (balipos.co.id 17/9/03) menguraikan bahwa kearifan lokal merupakan kebenaran yang telah mentradisi secara ajeg dalam suatu daerah. Disebut sebagai kebenaran karena kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Untuk itu kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Meskipun nilai ini berdimensi lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya

dianggap sangat universal. Sementara itu Geriya (balipos.co.id 17/09/03) memberikan pandangan secara konseptual bahwa kearifan lokal dan keunggulan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional.

Dengan demikian kearifan lokal merupakan nilai yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama. Kearifan lokal (*local wisdom*) dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu (Ridwan, 2007:27-28). Kearifan lokal juga merupakan bagian dari konstruksi budaya. Dalam pandangan Haba (2007:11), kearifan lokal mengacu pada berbagai kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat dikenal, dipercayai, dan diakui sebagai elemen-elemen penting yang mampu mempertebal kohesi sosial di antara warga masyarakat. Keberadaan kearifan lokal itu dapat juga dimaknai sebagai perekat atau pemersatu masyarakat yang memiliki, merawat, dan menjunjung nilai-nilai kearifan lokal.

B. Wujud dan Ciri-ciri Kearifan Lokal

Secara umum budaya diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Jadi budaya daerah sebagai *local genius* merupakan suatu sistem atau cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah daerah dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya daerah dapat berbentuk berbagai unsur, termasuk sistem nilai, agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni, serta bahasa.

Kearifan lokal cenderung digunakan oleh masyarakat lokal untuk bertahan hidup dalam suatu lingkungannya yang menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, budaya dan diekspresikan di dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama. Proses regenerasi kearifan lokal dilakukan melalui tradisi lisan (cerita rakyat) dan karya-karya sastra, seperti babad, suluk, tembang, hikayat, lontarak dan lain sebagainya. (Wisnumukti, 2008:3).

Menurut Ayatrohaedi (1986:37) bahwa local genius adalah juga identitas budaya, identitas/kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengelola kebudayaan asing watak dan kemampuan sendiri. Karena itu kearifan lokal sebagai sumber dari unsur budaya daerah yang sudah teruji kemampuannya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) mampu bertahan terhadap budaya luar; (2) memiliki kemampuan untuk mengakomodasi unsur-unsur budaya luar; (3) mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli; (4) mempunyai kemampuan mengendalikan; (5) mampu memberiarah pada perkembangan budaya.

C. Fungsi Kearifan Lokal

Berdasarkan inventarisasi Haba (2007:334-335), setidaknya ada enam signifikansi serta fungsi sebuah kearifan lokal jika hendak dimanfaatkan sebagai salah satu bentuk pendekatan dalam menyelesaikan sebuah konflik. **Pertama**, sebagai penanda identitas sebuah komunitas. **Kedua**, elemen perekat (aspek kohesif) lintas warga, lintas agama, dan kepercayaan, **Ketiga**, kearifan lokal tidak bersifat memaksa atau dari atas (*top down*), tetapi sebuah unsur kultural yang ada dan hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu daya ikatnya lebih mengena dan bertahan.

Keempat, kearifan lokal memberikan warna kebersamaan bagi sebuah komunitas. **Kelima**, kearifan lokal akan mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok, dengan meletakkannya di atas *common ground*/kebudayaan yang dimiliki. **Keenam**, kearifan lokal dapat berfungsi mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi sekaligus sebagai sebuah mekanisme bersama untuk menepis berbagai kemungkinan yang meredusir, bahkan merusak solidaritas komunal, yang dipercayai berasal dan tumbuh di atas kesadaran bersama, dari sebuah komunitas terintegrasi.

Dari penjelasan fungsi-fungsi dan bentuk kearifan lokal tersebut tampak betapa luas ranah kearifan lokal, mulai dari yang sifatnya sangat teologis sampai yang bersifat profan sangat

pragmatis dan teknis. Fungsi dan bentuk kearifan lokal yang diuraikan tersebut menegaskan pentingnya pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) dengan sumber-sumber budaya sebagai penanda identitas bagi kelangsungan hidup sebuah kelompok maupun aliran kepercayaan. Konflik yang menyertainya pun akan mampu dikelola secara arif dan tidak selalu melibatkan politik kekuasaan sebagaimana yang selama ini dipraktikkan melalui hubungan agama dan negara di Indonesia.

Apresiasi terhadap kearifan lokal sebagai perekat atas dua kubu yang berseteru sangat dibutuhkan. Kearifan lokal tidak saja berfungsi sebagai materi budaya yang setiap saat dapat dimainkan oleh pengguna-nya, tetapi juga sebagai pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai lokal, bahkan penggunaan bahasa lokal juga berfungsi sebagai salah satu sistem operasional bagi tata kerangka kearifan lokal secara umum. Selain itu sikap kritis terhadap suatu nilai, termasuk nilai lokal yang telah diperebutkan oleh kepentingan berbagai faktor pun sangat diperlukan. Hal ini mengingatkan pendekatan berbasis kearifan lokal sangat rentan oleh tarik-menarik kepentingan politik pihak-pihak tertentu, sehingga sangat dimungkinkan fungsi kearifan lokal tidak lagi sebagai perekat damai antarkelompok yang berkonflik tapi justru menjadi pemicu baru dengan topeng kearifan lokal.

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal yang dimaksudkan adalah kebijaksanaan atau kebenaran yang bersandar pada filosofi nilai-nilai etika berperilaku yang bersifat universal dan melembaga secara tradisional sehingga diakui dijunjung dan dijadikan pegangan hidup serta kekuatan penggerak oleh masyarakatnya dalam lingkup geografis setempat maupun luas. Sejalan dengan pengertian tersebut serta berbagai bentuk kearifan lokal pada masyarakat etnik Lampung dan etnik Bali, maka bentuk kearifan lokal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kearifan lokal masyarakat etnikLampung dan etnik Bali yang *intangible* atau tak berwujud, seperti, aturan etika moral sehari-hari atau norma adat. Dalam hal ini kearifan lokal masyarakat Lampung berupa *Pi'il Pesenggiri*, dan kearifan lokal masyarakat Bali berupa etika moral masyarakat yang bersumber dari adat dan ajaran Hindu.

D. Kearifan Lokal Masyarakat Etnik Lampung

Setiap etnik atau suku bangsa tentu memiliki produk kebudayaan yang melekat sebagai simbol identitas, kebanggaan, sekaligus landasan filosofis normatif yang menuntun tata perilaku kehidupan masyarakatnya. Kearifan lokal itu dapat berbentuk warisan sosial budaya baik yang berwujud material, seperti bangunan dan bentuknya, alat dan fungsinya, seni ukir dan lukis beserta corak motif dan fungsinya, maupun yang tak berwujud material (abstrak), seperti aturan etika moral sehari-hari, aturan atau norma adat, bahkan seni bertutur dan petuah adat (pantun, puisi, dongeng, peribahasa).

Kearifan lokal yang sangat menonjol bagi masyarakat etnik Lampung adalah *Pi'il Pesenggiri*. Menurut Hadikusuma dkk (1989:26), *Pi'il Pesenggiri* adalah landasan filosofis tatanan moral yang menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku bagi masyarakat adat Lampung dalam segala aktivitas hidupnya. *Pi'il* berarti perilaku, dan *pesenggiri* maksudnya bermoral tinggi, berjiwa besar, tahu diri, tahu hak dan kewajiban. *Pi'il Pesenggiri* merupakan suatu keutuhan dari unsur-unsur yang mencakup unsur *Juluk-adek*, *Nemui-nyimah*, *Nengah-nyappur*, dan *Sakai Sambaiyan* yang berpedoman pada *Titie Gemattei* adat dari leluhur mereka. Apabila keempat unsur ini dapat dipenuhi oleh masyarakat Lampung, maka barulah dirinya boleh mengklaim (mengaku) bahwa dirinya telah memiliki *Pi'il Pesenggiri*. *Pi'il Pesenggiri* pada hakikatnya merupakan nilai dasar yang intinya terletak pada keharusan untuk mempunyai hati nurani yang baik, bermoral tinggi, berjiwa besar sehingga senantiasa dapat hidup secara logis, etis dan estetis.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dinyatakan bahwa *Pi'il Pesenggiri* merupakan falsafah hidup masyarakat etnik Lampung yang menjadi pedoman hidup sehari-hari sekaligus pengakuan kehormatan identitas sebagai orang Lampung. *Pi'il Pesenggiri* memiliki unsur-unsur yang harus dijadikan pedoman atau landasan hidup bagi masyarakat etnik Lampung yang dengan itu maka barulah seseorang dari etnik Lampung itu dapat disebut sebagai "orang Lampung" atau oleh masyarakat Lampung lazim disebut sebagai "*Ulun Lepung*".

1. **Juluk-Adok**

Puspawijaya (1968:22) menyebutkan bahwa secara etimologis *Juluk-adok* (nama adat atau gelar adat) terdiri atas kata *juluk dan adok*, yang masing-masing mempunyai makna; Juluk adalah nama panggilan keluarga seorang pria/wanita yang diberikan pada waktu mereka masih muda atau remaja yang belum menikah, dan adok (adat) bermakna gelar/nama panggilan adat seorang pria/wanita yang sudah menikah melalui prosesi pemberian gelar adat. Akan tetapi panggilan ini berbeda dengan inai dan amai. Inai adalah nama panggilan keluarga untuk seorang perempuan yang sudah menikah, yang diberikan oleh pihak keluarga suami atau laki-laki. Sedangkan amai adalah nama panggilan keluarga untuk seorang laki-laki yang sudah menikah dari pihak keluarga isteri.

Juluk-adok menurut Syani (1994:18) merupakan hak bagi anggota masyarakat Lampung, oleh karena itu *juluk-adok* merupakan identitas utama yang melekat pada pribadi yang bersangkutan. Biasanya penobatan *juluk-adok* ini dilakukan dalam suatu upacara adat sebagai media peresmian. *Juluk adok* lazimnya mengikuti tatanan yang telah ditetapkan berdasarkan hirarki status pribadi dalam struktur kepemimpinan adat. Sebagai contoh; *Pengiran, Dalom, Batin, Temenggung, Radin, Minak, Kimas* dan seterusnya, yang masing-masing *kebuwaian* tidak selalu sama, tergantung adat yang berlaku pada kelompok masyarakat yang bersangkutan.

Mengingat *juluk-adok* melekat pada pribadi, maka seyogyanya anggota masyarakat Lampung harus memelihara nama dengan sebaik-baiknya dalam wujud perilaku kemasyarakatan sehari-hari. *Juluk-adok* merupakan asidentitas dan sebagai sumber motivasi bagi anggota masyarakat Lampung untuk dapat menempatkan hak dan kewajibannya, kata dan perbuatannya dalam setiap perilaku dan karyanya. Sa (2012: 24).

2. **Nemui-Nyimah**

Nemui berasal dari kata benda *temui* yang berarti tamu, kemudian menjadi kata kerja "*nemui*" yang berarti bertamu atau mengunjungi/silaturahmi. *Nyimah* berasal dari kata benda "*simah*",

kemudian menjadi kata kerja "*nyimah*" yang berarti suka memberi (pemurah). Sedangkan secara harfiah *nemui-nyimah* diartikan sebagai sikap pemurah, terbuka tangan, suka memberi dan menerima dalam arti material sesuai dengan kemampuan. *Nemui-nyimah* merupakan ungkapan asas kekeluargaan untuk menciptakan suatu sikap keakraban dan kerukunan serta silaturahmi. *Nemui-nyimah* merupakan kewajiban bagi suatu keluarga dari masyarakat Lampung umumnya untuk tetap menjaga silaturahmi, agar ikatan keluarga secara genealogis selalu terpelihara dengan prinsip keterbukaan, kepastian dan kewajaran.

Pada hakikatnya *Nemui-Nyimah* dilandasi rasa keikhlasan dari lubuk hati yang dalam untuk menciptakan kerukunan hidup berkeluarga dan ber- masyarakat. Bentuk konkret *nemui nyimah* dalam konteks kehidupan masyarakat dewasa ini lebih tepat diterjemahkan sebagai sikap kepeduliansosial dan rasa setia kawan. Suatu keluarga yang memiliki kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan, tentunya berpandangan luas ke depan dengan motivasi kerja keras, jujur dan tidak merugikan orang lain. Sa (2012: 24).

3. Nengah-Nyappur

Nengah berasal dari kata benda, kemudian berubah menjadi kata kerja yang berarti berada di tengah. Sedangkan *nyappur* berasal dari kata benda *cappur* menjadi kata kerja *nyappur* yang berarti baur atau berbaur. Secara harfiah dapat diartikan sebagai sikap suka bergaul, suka bersahabat dan toleran antar sesama. *Nengah-nyappur* menggambarkan bahwa anggota masyarakat Lampung mengutamakan rasa kekeluargaan dan didukung dengan sikap suka bergaul dan bersahabat dengan siapa saja, tidak membedakan suku, agama, tingkatan, asal usul dan golongan. Sikap suka bergaul dan bersahabat menumbuhkan semangat suka bekerjasama dan tenggang rasa (toleransi) yang tinggi antar sesamanya.

Sikap toleransi akan menumbuhkan sikap ingin tahu, mau mendengarkan nasihat orang lain, memacu semangat kreativitas dan tanggap terhadap perkembangan gejala-gejala sosial. Oleh

sebab itu dapat diambil suatu konklusibahwa sikap *nengah-nyappur* menunjuk kepada nilai musyawarah untuk mufakat. Sikap *nengah nyappur* melambangkan sikap nalar yang baik, tertib dan seklaiqus merupakan embrio dari kesungguhan untuk meningkatkan pengetahuan serta sikap adaptif terhadap perubahan. Melihat kondisi kehidupan masyarakat Lampung yang pluralistik, maka dapat dipahami bahwa penduduk daerah ini telah menjalankan prinsip hidup *nengah-nyappur* secara wajar dan positif.

Sikap *nengah-nyappur* juga menunjukkan sikap ingin tahu yang tinggi, sehingga menumbuhkan sikap kepeloporan. Pandangan atau pemikiran demikian menggambarkan bahwa anggota masyarakat Lampung merupakan bentuk kehidupan yang memiliki jiwa dan semangat kerja keras dan gigih untuk mencapai tujuan masa depannya dalam berbagai bidang kehidupan.

Nengah-nyappur merupakan pencerminan dari asas musyawarah untuk mufakat. Sebagai modal untuk bermusyawarah tentunya seseorang harus mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas, sikap toleransi yang tinggi dan melaksanakan segala keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Dengan demikian berarti masyarakat Lampung pada umumnya dituntut kemampuannya untuk dapat menempatkan diri pada posisi yang wajar, sopan dalam sikap perbuatan dan santun dalam tutur kata. Makna yang lebih dalam adalah harus siap mendengarkan, menganalisis, dan menyampaikan informasi dengan tertib dan bermakna. Sa (2012:25).

4. Sakai-Sambayan

Sakai bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam bentuk benda dan jasa yang bernilai ekonomis yang dalam prakteknya cenderung menghendaki saling berbalas. Sedangkan *sambaiyan* bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang, sekelompok orang atau untuk kepentingan umum secara sosial berbentuk benda dan jasa tanpa mengharapkan balasan. *Sakai sambaiyan* berarti tolong menolong dan gotong royong, artinya memahami makna kebersamaan atau guyub.

Sakai-sambayan pada hakikatnya adalah menunjukkan rasa partisipasi serta solidaritas yang tinggi terhadap berbagai kegiatan pribadi dan sosial kemasyarakatan pada umumnya. Sebagai masyarakat Lampung akan merasa kurang terpedang bila ia tidak mampu berpartisipasi dalam suatu kegiatan kemasyarakatan. Perilaku ini menggambarkan sikap toleransi kebersamaan, sehingga seseorang akan memberikan apa saja secara suka rela apabila pemberian itu memiliki nilai manfaat bagi orang atau anggota masyarakat lain yang membutuhkan.

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari konsep *Sakai Sembayan* ini diwujudkan dalam kegiatan gotong royong, dan memberikan bantuan kepada siapapun yang datang membutuhkan pertolongan, baik dalam bentuk fisik material maupun moral. Sa (2012: 25).

5. **Titi Gemattei**

Selanjutnya *Titie Gemattei*, yang sesungguhnya bukan merupakan unsur *Pi'il Pesenggiri*, namun turut melengkapi falsafah tersebut. *Titi Gemattei* terdiri dari dua suku kata *titie* dan *gemattei*. *Titie* berasal dari kata *titi* yang berarti jalan, dan *gemattei* berarti lazim atau kebiasaan leluhur yang dianggap baik. Wujud *Titie gemattei* secara konkret berupa norma yang sering disebut kebiasaan masyarakat adat. Kebiasaan masyarakat adat ini tidak tertulis, yang terbentuk atas dasar kesepakatan masyarakat adat melalui suatu forum khusus (rapat *perwatin* Adat/*Keterem*). *Titie gemattei* tersebut berisi keharusan, kebolehan dan larangan (*cepalo*) untuk berbuat dalam penerapan semua elemen *Pi'il Pesenggiri*.

Memperhatikan proses normatif hubungan sosial *titie gemattei* ini, maka dalam aktualisasi penerapannya senantiasa amat fleksibel selalu terjadi penyesuaian mengikuti tuntutan perubahan. Contoh; pada masa lalu setiap *penyimbang* suku di *Anek*, *Kampung*, *Tiyuh* atau *Pekon* harus mempunyai tempat mandi khusus di sungai yang disebut *Kuwaiyan* atau *Pakkalan*, tetapi sekarang sesuai dengan perkembangan zaman diganti dengan kamar mandi. Syani (1994:32). *Titie gemattei* juga mempunyai pengertian sopan santun

untuk kebaikan yang diutamakan berdasarkan kelaziman dan kebiasaan. Kelaziman dan kebiasaan yang berdasarkan kebaikan ini pada hakikatnya menggambarkan bahwa masyarakat Lampung mempunyai tatanan kehidupan sosial yang teratur.

Tata nilai budaya masyarakat Lampung sebagaimana diuraikan dalam kearifan lokal tersebut pada dasarnya merupakan kebutuhan hidup dasar bagi seluruh anggota masyarakat setempat agar *survive* secara wajar dalam membina kehidupannya. Tata nilai tersebut harus tercermin dalam tata kelakuan sehari-hari, baik secara pribadi ataupun bersama dengan anggota kelompok masyarakat secara luas. Dalam membina kehidupan dan penghidupan yang wajar diperlukan rambu-rambu normatif sebagai pedoman untuk berperilaku. Rambu-rambu dan pedoman itu berwujud ketentuan-ketentuan yang berisi larangan (*cepalo*) dan keharusan (adat) untuk diamalkan. Itikad atau kemauan dan kemampuan yang baik oleh masyarakat antaretnik untuk menghargai kebudayaan beserta nilai-nilai kearifan lokal seperti itu tentu sangat dibutuhkan bagi keberlangsungan sebuah bangsa yang multietnik dan multireligius seperti Indonesia.

E. Kearifan Lokal Masyarakat Etnik Bali

Kearifan lokal senantiasa berisi pandangan akan nilai-nilai masyarakat yang bersangkutan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kualitas dan pola hubungan antarmanusia, manusia dan alam, serta manusia dan Tuhan. Masing-masing daerah, suku atau komunitas dalam suatu wilayah akan memiliki pengetahuan tradisional yang secara empiris merupakan nilai yang diyakini oleh komunitasnya sebagai pengetahuan bersama dalam membangun pola-pola hubungan antarsesama, lingkungan alam dan Tuhannya.

Masyarakat etnik Bali sebagai satu kesatuan geografis, suku, ras, agama memiliki nilai-nilai norma yang telah menjadi kearifan lokal yang berkembang dan diyakini sebagai perekat sosial yang kerap menjadi acuan dalam menata hubungan dan kerukunan masyarakat etnik Bali. Kearifan lokal masyarakat etnik Bali bersumber dan identik dengan ajaran Hindu. Banyak kearifan lokal Bali dan ajaran-ajaran Hindu yang dapat ditanamkan pada generasi

muda Bali melalui pendidikan seperti *Tri Hita Karana*, ajaran *Tat Twam Asi*, *Tri Kaya Parisudha*, *sagilik saguluk salunglung sabayantaka*, *paras-paros*, *tatas*, *tetes*, *merakpak danyuh*, dalam rangka tumbuhnya nilai toleransi dan memiliki rasa kebersamaan dan sebagainya, termasuk makna yang terdapat dalam *kidung/pupuh*. (Suwardani, 2015:259). Dalam kajian ini kearifan lokal yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. *Tri Hita Karana*

Tri Hita Karana merupakan suatu nilai kosmopolit tentang harmo- nisasi hubungan manusia dengan tiga unsur utama dalam kehidupan manusia. Unsur pertama adalah; *Sutata Parhyangan*, yakni harmonisasi hubungan manusia dengan Tuhan, *Sutata Pawongan*, harmonisasi hubungan manusia dengan sesama, dan *Sutata Palemahan*, yakni harmonisasi hubungan manusia dengan alam lingkungannya. Nilai kearifan lokal yang sangat pokok bagi masyarakat etnik Bali penganut Hindu ini akan mampu menjaga dan menata pola hubungan dalam masyarakat berlangsung secara dinamis dan dalam kedamaian. Dalam konsep Trihita Karana ini kebahagiaan seseorang akan didapatkan manakala ia mampu menyelaraskan fungsi dirinya dalam membangun harmonisasi dengan ketiga unsur Trihita Karana <http://bimas-hindujatim.blogspot.co.id>).

2. *Sagilik saguluk salunglung sabayantaka, paras paros sarpanaya*

Masyarakat etnik Bali senantiasa bersatu padu dalam suka-duka dan menghadapi bahaya, berembuk dan bermusyawarah (menghargai pendapat orang lain), saling mengingatkan, saling menyayangi, dan gotong royong saling menolong pada setiap kesempatan. Dengan merasa senasib dan sepenanggungan, saling bahu-membahu dalam memecahkan masalah dan tantangan hidup sehari-hari diharapkan keharmonisan membangun hubungan antarsesama (*Sutata Pawongan*) tercapai dan memperoleh kebahagiaan. (<http://sejarahharirayahindu.blogspot.co.id>).

Masyarakat etnik Bali penganut Hindu percaya bahwa apabila perilaku hidupnya telah teracuni oleh Sadripu maka pasti akan melanggar *Sutata Pawongan* dan berakibat pada kemelaratan, kesengsaraan, permusuhan, ketidakpercayaan, dan sikap-sikap negatif lainnya. Sadripu artinya enam musuh yang ada dalam diri setiap manusia, yaitu: *kama* (nafsu yang tak terkendali), *lobha* (serakah), *kroda* (marah), *mada* (mabuk), *moha* (sombong), dan *matsarya* (irihati/ dengki). Sadripu di setiap manusia akan bangkit menjadi asuri *sampad* (sifat-sifat keraksasaan). Dalam Agama Hindu-Bali, perilaku keraksasaan merupakan pengaruh panca indra yang disebut panca tanmatra (lima hal yang tidak terlihat kasat mata) yakni: sabda tanmatra (dari pendengaran), ganda tanmatra (dari penciuman), rasa tanmatra (dari lidah), rupa tanmatra (dari penglihatan), sparsa tanmatra (dari kulit/kelamin). Panca tanmatra ini adalah kenikmatan yang diinginkan tanpa kendali oleh orang-orang yang tidak berpegang teguh pada ajaran dharma sehingga memiliki nafsu yang tidak terkendali. (Wawancara dengan Made Gambar, 25 Juli 2015).

3. *Menyamabraya*

Masyarakat etnik Bali, meskipun berasal dari latar-belakang yang berbeda-beda, selalu merasa bersaudara. Bagi orang Bali semua orang adalah “*nyama*” (saudara dekat). Sejauh-jauhnya mereka berada di luar lingkungan-nya, mereka akan menganggap orang lain itu sebagai “*braya*” (saudara jauh). Sehingga secara keseluruhan bingkai hubungan antarindividu dan masyarakat itu dalam konsep masyarakat etnik Bali adalah selalu persaudaraan. (<http://sejarahharirayahindu.blogspot.co.id>).

Konsep tersebut hampir serupa dengan konsep *Ukhuwah* atau persaudaraan dalam Islam. Persaudaraan dalam Islam itu meskipun lebih bersifat internal antarmuslim, namun tidak pernah ada anjuran untuk bersikap memusuhi penganut agama lain.

4. *Matilesang raga*

Masyarakat etnik Bali menjunjung tinggi sebuah nilai yang disebut “*metilesang raga*” yang artinya, kurang lebih: dapat

menempatkan diri, sesuai dengan tempat, waktu, dan keadaan. Misalnya, ketika orang Hindu memiliki hajatan dan dikunjungi oleh warga Islam, mereka tahu harus menghidangkan makanan yang boleh dan yang tidak boleh dimakan oleh warga Islam. (<http://www.imgrum.org>).

5. *Nyawang lek*

Nilai “nyawang lek” ini membuat masyarakat etnik Bali cenderung tidak berperilaku yang aneh-aneh, tidak neko-neko. Mereka merasa malu kalau sampai bikin masalah, apalagi sampai ribut-ribut. Mereka malu mengambil sesuatu yang bukan haknya. Mereka malu jika tidak membantu tetanggayang sedang kesusahan atau akan mengadakan hajatan, terlepas dari berbeda latar belakang suku, agama, ras, dan yang lainnya <http://www.imgrum.org>).

6. *Silutrama Catur Sanggha Guru*

Silutrama merupakan tatakrama yang berupa penghormatan dan kepatuhan wajib bagi masyarakat etnik Bali (Hindu) kepada Catur Sanggha Guru atau empat pokok yang menjadi dasar atau yang dijadikan sebagai guru, yang patut dipercaya sebagai sumber pedoman, dihormati, dipatuhi, dan dijadikan bakti, meliputi; a) Guru rupaka, yakni orang tua (ayah-ibu) yang melahirkan, merawat, mendidik dan membesarkan kita, b) Guru agama maupun guru di tempat-tempat pendidikan dan orang-orang berilmu cerdas pandai lainnya, c) Guru wisesa, yakni aparat pemerintahan yang mengatur, membina dan menaungi warga dalam urusan hukum kenegaraan dari aparat tingkat bawah (ketua RT) hingga presiden, dan d) Guru swadhiaya, yakni Tuhan yang Esa sebagai ungkapan rasa bakti dan syukur kepada Sang Pencipta. (Wawancara dengan Made Gambar, 25 Juli 2015).

7. *Tri kaya parisudha*

Tri kaya parisuda merupakan wujud keseimbangan dalam membangun karakter dan jati diri insani, dengan menyatukan unsur pikiran, perkataan dan perbuatan. Dalam konsep *Tri kaya parisudha*, pikiran yang baik dan benarakan menuntun perkataan

dan perbuatan yang baik dan benar. Oleh karena itu dengan tertanamnya nilai kearifan ini pada setiap insan, khususnya masyarakat etnik Bali penganut Hindu, akan menjadikan insan yang berkarakter, memiliki konsistensi dan akuntabilitas dalam menjalankan kewajiban sosial pada semua aspek kehidupannya. (Wawancara dengan Made Gambar, 25 Juli 2015).

8. **Tatwam Asi**

Tat twam asi berasal dari bahasa Sanskerta yaitu “*Tat*” berarti itu, “*Twam*” berarti kamu dan “*Asi*” berarti adalah. Jadi *Tat Twam Asi* berarti itu atau dia adalah kamu juga. Maksud yang terkandung dalam ajaran *Tat Twam Asi* ini “ia adalah kamu, saya adalah kamu, dan semua makhluk adalah sama” sehingga bila kita menolong orang lain berarti juga menolong diri kita sendiri. Di dalam filsafat Hindu dijelaskan bahwa *Tat Twam Asi* adalah ajaran kesusilaan yang tanpa batas, yang identik dengan “perikemanusiaan” dalam Pancasila. (<http://materiagamahindu.blogspot.co.id>).

Nilai-nilai *Tat Twam Asi* membentuk sikap dan perilaku mengakui eksistensi seraya menghormati orang lain sebagaimana menghormati diri sendiri. Nilai ini menjadi dasar yang bijaksana di tengah peradaban demokrasi modern yang saat ini. Sikap bertatwam asi ini mengarahkan seseorang untuk memiliki empati, mampu menempatkan orang lain pada dirinya sehingga dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain, tidak bersikap egois.

F. **Masyarakat Etnik dan Potensi Konflik Sosial**

Dalam *The Little Oxford Dictionary* edisi ke VI, konflik mempunyai makna yang bervariasi, yakni; *fight* (perkelahian, pertengkaran, pertarungan), *struggle* (perjuangan), *opposition* (perlawanan), dan *clashing* perselisihan). Sedangkan Soekanto (1983:60) mendefinisikan konflik sebagai pertikaian, pertarungan, yakni proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku. Dalam kaitan ini Poloma (2000:107-120) menyebutkan sepuluh proposisi yang berkaitan dengan konflik sebagai berikut:

1. Konflik berfungsi menegaskan dan mempertahankan identitas dan batas-batas kelompok sosial dan masyarakat. Konflik antara suatu kelompok dengan kelompok lain memungkinkan ditegaskannya kembali identitas kelompok satu sama lain dan mempertahankan batas-batasnya terhadap lingkungan sosial di luarnya.
2. Konflik tidak selalu bersifat disfungsional dalam konteks hubungan dimana konflik tersebut terjadi; sebaliknya seringkali konflik diperlukan untuk mempertahankan hubungan tersebut. Tanpa cara-cara menyalurkan kebencian satu sama lain, anggota-anggota kelompok cenderung sepenuhnya beraksi keras, atau barangkali menarik diri. Oleh karena itu konflik dapat berfungsi sebagai katup pengaman sehingga sistem sosial tersebut dapat dipertahankan dalam batas-batas tertentu.
3. Dilihat dari konflik sebagai sarana dan konflik sebagai tujuan, maka terdapat dua macam konflik, yakni konflik realistik dan nonrealistik. Konflik yang timbul karena tuntutan tertentu dan diarahkan kepada objek tertentu disebut konflik realistik. Sebegitu jauh konflik adalah sarana untuk mencapai tujuan. Sebaliknya dalam konflik-konflik nonrealistik, konflik itu sendiri adalah tujuan, tidak dikondisikan oleh objek tertentu, dan berfungsi memenuhi kebutuhan untuk meredakan ketegangan dari sekurang-kurangnya salah satu pihak yang bertentangan.
4. Konflik yang lebih radikal dapat terjadi dalam keadaan hubungan dekat. Terbentuk perkumpulan dan organisasi oposisi dalam hubungan tersebut dapat mempertajam konflik secara khas. Semakin besar keikutsertaan dalam kelompok dan keterlibatan pribadi anggota-anggotanya maka semakin besar terjadi konflik. Reaksi terhadap ketidaksetiaan pada kelompok juga makin besar dan kesetiaan pada kelompok adalah dua aspek dalam hubungan yang sama.
5. Konflik dapat melenyapkan unsur-unsur yang memecah-belah dan menegakkan persatuan. Sebegitu jauh, konflik juga dapat meredakan ketegangan. Dengan demikian konflik dapat pula

berfungsi sebagai stabilisator sistem sosial. Walaupun demikian, tidak semua konflik memiliki fungsi positif bagi hubungan tersebut, melainkan konflik yang hanya menyangkut tujuan, nilai-nilai, atau kepentingan-kepentingan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar masyarakat dimana hubungan ditegakkan. Selain itu konflik yang membahayakan konsensus masyarakat dapat diredam oleh hadirnya kelompok bersktruktur longgar dengan orientasi yang tersebar ke seluruh aspek kehidupan masyarakat.

6. Konflik suatu kelompok dengan kelompok lain menghasilkan mobilisasi energi para anggota kelompok yang bersangkutan, sehingga kohesi setiap anggota kelompok ditingkatkan. Meningkatnya sentralisasi kelompok tergantung pada ciri dan sifat konflik dan jenis kelompok yang ada.
7. Ada tiga aspek struktur kelompok yang harus dipertahankan dari situasi sosial. Maksud situasi sosial tersebut adalah, apakah pertentangan tersebut terus-menerus atau kadangkala. Aspek-aspek tersebut tidak dapat berdiri sendiri karena yang satu terkait dengan yang lainnya.
8. Suatu konflik dimana para pelakunya merasa bahwa mereka semata-mata wakil konflik atau kelompok cenderung lebih radikal karena kesadaran bahwa perjuangan mereka dilandaskan pada ideologi tertentu yang tidak semata-mata pribadi sifatnya. Keyakinan agama dapat dimasukkan dalam kategori ini.
9. Konflik dapat menciptakan jenis-jenis interaksi yang baru di antara pihak-pihak yang bertentangan yang sebelumnya ada. Konflik berlaku sebagai rangsangan untuk menciptakan aturan-aturan dan sistem norma yang baru, yang mampu mengatur pihak-pihak yang bertentangan tadi sehingga keteraturan sosial kembali terwujud.
10. Konflik dapat mempersatukan orang-orang atau kelompok yang tadinya tidak saling berhubungan. Koalisi dan organisasi dapat timbul di saat kepentingan pragmatik pelaku utamanya terlibat.

Suparlan (1999:1) mengatakan konflik dapat dilihat sebagai sebuah perjuangan antarindividu atau kelompok untuk memenangkan suatu tujuan yang sama-sama ingin mereka capai. Kekalahan atau kehancuran pihak lawan dilihat oleh yang bersangkutan sebagai suatu tujuan untuk memenangkan tujuan yang ingin dicapai. Berbeda persaingan atau kompetisi yang memiliki tujuan pencapaian kemenangan melalui keunggulan prestasi dari yang bersaing, maka dalam konflik tujuannya adalah penghancuran pihak lawan, karena itu tujuan untuk memenangkan sesuatu yang ingin dicapai acapkali menjadi tidak sepenting keinginan untuk menghancurkan pihak lawan.

Konflik sosial yang merupakan perluasan dari konflik individu, umum terwujud dalam bentuk konflik fisik atau perang antar dua kelompok atau lebih yang biasanya selalu terjadi dalam keadaan berulang. Sesuatu perang sebagai sistem, umumnya terjadi karena ketiadaan, tidak cukupnya atau telah hancurnya prosedur-prosedur yang dapat digunakan untuk menjembatani perbedaan-perbedaan yang dapat memecahkan atau menghentikan perang atau konflik tersebut. Menurut para Sosiolog, dalam konflik, kepentingan-kepentingan yang dipunyai orang perorangan atau kelompok berada di atas norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dahrendorf (1986: 306) mengemukakan kehidupan manusia di masyarakat didasari oleh konflik yang bukan semata-mata dikarenakan oleh sebab-sebab ekonomi sebagaimana dikemukakan oleh Karl Marx, melainkan karena berbagai aspek yang ada dalam masyarakat, yang dilihat sebagai organisasi sosial. Organisasi sosial menyajikan pendistribusian kekuatan sosial kepada warganya secara tidak merata karena itu warga suatu masyarakat akan tergolong ke dalam mereka yang mempunyai dan yang miskin, dalam kaitan dengan kekuatan sosial atau kekuasaan. Mengingat organisasi itu juga membatasi berbagai tindakan manusia, maka pembatasan tersebut juga hanya dapat dilakukan oleh mereka yang mempunyai kekuasaan. Mereka yang miskin kekuasaan yang terkena oleh pembatasan-pembatasan secara organisasi oleh yang mempunyai kekuasaan, akan berada dalam konflik dengan mereka yang

mempunyai kekuasaan. Oleh karena itu konflik merupakan sesuatu yang endemik atau yang selalu ada dalam kehidupan manusia bermasyarakat.

Soemarjan (Kompas, 22 Maret 2001) menyebut beberapa faktor penyebab terjadinya konflik etnis/agama antara lain sebagai berikut: a) ada dua suku/agama yang hidup berdampingan, b) dalam hubungan sosialnya terjadi interaksi, c) dalam interaksi itu dirasakan oleh salah satu atau kedua pihak bahwa ada unsur-unsur budaya yang bertentangan, ada ketimpangan sosial, atau ada sumber penghidupan yang menjadi rebutan. Soemarjan juga menyebutkan di mana ada dua atau beberapa suku hidup sebagai tetangga dekat maka karena kebudayaannya yang berbeda selama hubungan antara mereka itu tidak dapat dihindarkan tumbuhnya bibit-bibit konflik sosial atau konflik budaya.

Alqadri (1999:37) mengemukakan beberapa faktor penyebab timbulnya konflik, antara lain sebagai berikut: **pertama**, faktor budaya dan psikologis. Konflik yang dipicu oleh faktor ini antara lain berkaitan dengan perbedaan budaya yang terdapat pada kelompok etnis/agama yang sedang mengadakan hubungan. Perbedaan-perbedaan budaya antara satu kelompok dengan kelompok lain terwujud atau dikemukakan antara lain dalam bentuk sistem nilai budaya (*cultural value system*) dan orientasi nilai budaya (*cultural value orientation*).

Unsur budaya tersebut yang menjelma secara konkret dalam bentuk mentalitas dan perilaku, cenderung memengaruhi berhasil atau tidaknya proses atau program pembangunan dari kelompok yang bersangkutan, atau dari suatu bangsa. Sikap mentalitas, perilaku dan perbuatan dari atau yang dilakukan oleh anggota atau masyarakat kelompok etnis/agama tertentu umumnya tidak sesuai dengan kebiasaan, tradisi dan pola adaptif kelompok etnis lainnya, khususnya kelompok etnis setempat, sehingga cenderung menimbulkan keresahan, ketidakpuasan, kekecewaan dan luka atau kepedihan.

Kedua, faktor struktural yang berkaitan dengan ekonomi dan politik, ini mengambil bentuk dalam kompetisi sosial ekonomi dan politik yang tidak adil. Keterlibatan aparat pemerintah yang

berkolusi dengan konglomerat dan anggota kelompok pendatang. Mereka meminggirkan atau memarjinalkan anggota kelompok setempat melalui dominasi atau eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam. Etnis/agama dengan identifikasi politik atau ekonomi sulit untuk dilihat apakah konflik itu berbau etnis/agama atau sekedar komoditas politik atau ekonomi. (Alfitra Salam, TEMPO, 25 Maret 2001)

Dahrendorf (1976) melihat konflik pada dasarnya memiliki dua makna. *Pertama*, konflik adalah konsekuensi atau akibat dari tidak tuntasnya proses integrasi di dalam suatu masyarakat. Dalam konteks kegagalan integrasi seperti ini, konflik menjadi sebuah gejala penyakit (*syndrom*) yang dapat merusak persatuan dan kesatuan suatu masyarakat dalam sebuah bangsa. *Kedua*, konflik dapat pula dipahami sebagai sebuah proses alamiah dalam rangka proyek rekonstruksi sosial. Dalam konteks ini konflik dilihat secara “fungsional” sebagai suatu strategi untuk menghilangkan unsur-unsur disintegratif di dalam masyarakat yang tidak terintegrasi secara sempurna. Konflik dalam perspektif ini diyakini sebagai sebuah media yang bila terselesaikan dengan baik, justru akan memperkuat proses integrasi dalam masyarakat.

Melalui teori Dahrendorf dapat dipelajari bahwa konflik dapat dilihat dari dua kacamata berbeda; positif dan negatif, pesimisme dan optimisme. Konflik sebagai sebuah kegagalan integrasi atau konflik sebagai sebuah mekanisme yang harus dilalui masyarakat dalam sebuah bangsa untuk menyempurnakan proses integrasi anggota-anggotanya. Bertrand (2004: 57-59) mengatakan bahwa negara-negara yang sedang berproses meninggalkan otoritarianisme seringkali mengalami konflik komunal. Kekerasan komunal merupakan konjungtur kritis (*critical junctures*) bagi upaya memperbarui relasi kekuasaan dan sumber daya. Dengan kata lain, kekerasan komunal menjadi alat negosiasi bagi perubahan kelembagaan kenegaraan dalam berbagai level. Setiap perubahan struktur kelembagaan politik kenegaraan akan berkontribusi pada polarisasi identitas etnik, agama dan kelompok politik yang potensial memunculkan kekerasan.

Konflik bernuansa etnis seringkali dikaitkan dengan semangat etnosentrisme dan nasionalisme sempit. Etnosentrisme menjadi sebuah cara berpikir yang menjadikan kelompok sendiri sebagai pusat dari segalanya dan menjadi tolak ukur dalam menilai dan mengukur kelompok lain. Tiap-tiap kelompok diasumsikan memupuk sendiri-sendiri kebanggaan dan harga diri, merasa superior, mengagungkan kesucian kelompok sendiri dan memandang rendah kelompok lain. Tiap kelompok berpikir bahwa tradisi cara pikir dan tindakan kelompoknya adalah yang paling benar sementara tradisi kelompok lain selalu dilihat dengan penuh kerendahan. Bertrand (2004:82-83) menyebutkan etnosentrisme, sebagaimana nasionalisme, mengandung perilaku positif terhadap kelompoknya sendiri (*ingroup*) dan perilaku atau penyikapan negatif terhadap kelompok lain (*out-groups*). Sikap etnosentrisme ditandai oleh kesetiaan pada kelompok (*ingrouployalty*), antipati terhadap kelompok lain (*antipathy toward outgroups*), kompensasi-kompensasi yang nyata (*tangible rewards*) dan manipulasi para pemimpin kelompok tersebut. “*Leader manipulation*” ditandai oleh adanya pemimpin yang seringkali melihat manfaat bagi diri sendiri atas nasionalisme dan etnosentrisme. Oleh karenanya ia berusaha meningkatkan spirit itu melalui eksploitasi rasa takut dan benci terhadap kelompok lain.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli sebagaimana dalam paparan tentang konflik tersebut, dalam hal ini dapat dirumuskan bahwa konflik adalah bentuk pertikaian yang muncul karena antarindividu atau antarkelompok gagal atau tidak berhasil memaknai suatu konsep atau tujuan tertentu sehingga masing-masing pihak tidak ada rasa keberterimaan dan saling memosisikan sebagai lawan yang harus dirusak, dihancurkan, bahkan dibinasakan.

G. Bhineka Tunggal Ika sebagai Titik Temu

Bhineka Tunggal Ika adalah sikap sosial yang menyadari akan kebersamaan di tengah perbedaan, dan perbedaan dalam kebersamaan. Semangat ini sangat penting untuk diaktualisasikan dalam tantangan kehidupan sosial yang multikultural. (Gunawan,

2008:3). Kearifan lokal masyarakat etnik Bali tersebut tidak dapat dipisahkan (*inherence*) dari ajaran agama Hindu yang dianut oleh mayoritas masyarakat etnik tersebut. Oleh karena itu bagi masyarakat etnik Bali terdapat jargon atau kata khusus dalam bidang tertentu (kemasyarakatan dan keberagamaan) berupa Bali adalah Hindu-Hindu adalah Bali. Artinya, penerapan kearifan lokal masyarakat etnik Bali dalam hubungan sosial itu mencerminkan dan mendasarkan pada pengamalan nilai-nilai ajaran agama Hindu. Dengan demikian meskipun awalnya kearifan lokal tersebut merupakan ajaran untuk menanamkan kerukunan antar sesama umat beragama (sesama Hindu) namun dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sosial antara masyarakat etnik Bali dan masyarakat etnik lainnya.

Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat etnik Lampung maupun masyarakat etnik Bali itu tentu akan bermakna bagi kehidupan sosial apabila masyarakatnya dapat menjalankan fungsinya sebagai bahan acuan dalam menjaga dan menciptakan relasi sosial yang harmonis. Kearifan lokal tersebut sudah seharusnya dilestarikan secara berkesinambungan antargenerasi sehingga dapat dipahami dan tertanam sebagai sistem pengetahuan yang dinamis dan berkembang terus secara kontekstual sejalan dengan tuntutan kebutuhan manusia yang semakin kompleks.

BAB IV

KELUAR DARI KONFLIK: PENGALAMAN LAMPUNG SELATAN

Indonesia merupakan sebuah negara bangsa (*nation-state*) yang sangat kaya dengan keanekaragaman. Keanekaragaman atau kemajemukan tersebut dapat dilihat dari berbagai dimensi. Keanekaragaman tersebut selanjutnya oleh para pendiri bangsa Indonesia yang memiliki kejernihan pemikiran bagi keberlanjutan bangsa Indonesia ke depan dibingkai dalam pilar kebangsaan Bhineka Tunggal Ika.

Struktur masyarakat Indonesia yang multikultur berpeluang untuk dapat menimbulkan persoalan tentang bagaimana masyarakat Indonesia terintegrasi pada tingkat nasional. Perbedaan identitas sosial, dalam hal ini etnik dan budaya khususnya, seringkali menimbulkan etnosentrisme yang kaku sehingga seseorang menjadi tidak mampu keluar dari perspektif yang dimiliki atau hanya dapat memahami sesuatu berdasarkan perspektif yang dimiliki dan tidak mampu memahami peri-laku orang lain berdasarkan latar belakang budayanya. Sikap etnosentrik yang kaku ini sangat berperan dalam menciptakan konflik karena ketidakmampuan orang-orang untuk memahami perbedaan. Pengidentifikasian yang kuat pada seseorang terhadap kelompok cenderung akan menyebabkan seseorang lebih berprasangka sekaligus menjadi sumber konflik yang potensial.

Tragedi kekerasan antarkelompok yang terjadi secara sporadik di berbagai kawasan di Indonesia menunjukkan rentannya rasa kebersamaan yang dibangun dalam negara dan bangsa karena prasangka antarkelompok begitu kuat daripada pemahaman nilai-nilai multikultural. Bangsa yang multikultural adalah bangsa yang kelompok-kelompok etnik atau budaya (*ethnic and cultural groups*) yang ada dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip co-existensi yang ditandai oleh kesediaan untuk menghormati budaya lain (Mahfud, 2009: xx).

Berpijak dari fakta bahwa kebhinekaan juga terdapat di berbagai wilayah di Indonesia hingga lingkup wilayah terkecil (dusun atau desa) maka pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal menemukan titik urgensinya.

Melalui lembaga sekolah, pendidik dapat membantu peserta didiknya mengonseptualisasi dan menumbuhkan aspirasi tentang sebuah struktur sosial alternatif yang memungkinkan peserta didik membangun pengetahuannya sendiri tentang nilai-nilai kearifan lokal dalam kebhinekaan secara realistis dan faktual. Dengan demikian peserta didik itupun memiliki kemampuan untuk meluruskan dan mengubah pandangan atau konsep tentang keberagaman dan perbedaan etnik, budaya, maupun agama yang selama ini mungkin dianggap menyimpang atau keliru dan menyebabkan dirinya bersikap eksklusif, intoleransi, bahkan gagal dalam melakukan interaksi ingroup. Pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal sebagaimana pendidikan multikultural sesungguhnya tidak sekedar merevisi materi pembelajaran, tetapi juga melakukan reformasi dalam sistem pembelajaran itu sendiri. Secara garis besar dalam paradigma pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal terdapat harapan keberadaan kearifan lokal berfungsi menjadi media protektif atas stereotipe negatif, sikap egois, pandangan individualistik dan eksklusif, serta sikap-sikap intoleran lainnya pada peserta didik yang berpotensi menimbulkan konflik bernuansa SARA.

Zamroni (2011:150), menyebutkan amat keliru kalau melaksanakan pendidikan multikultural harus dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah atau mono-litik.

Sebaliknya, dia mengusulkan agar pendidikan multikultural diperlakukan sebagai pendekatan untuk memajukan pendidikan secara utuh dan menyeluruh. Dalam kaitan tersebut Nieto (2002:29) menyebutkan bahwa pendidikan multikultural adalah proses pendidikan yang komperhensif dan mendasar bagi semua peserta didik. Jenis pendidikan ini menentang bentuk rasisme dan segala bentuk diskriminasi di sekolah dan masyarakat dengan menerima serta mengafirmasi pluralitas (etnik, ras, bahasa, agama, ekonomi, gender dan lain sebagainya) yang terefleksikan di antara peserta didik, komunitas mereka, dan guru-guru. Menurutnya, pendidikan multikultural ini haruslah melekat dalam kurikulum dan strategi pengajaran, termasuk juga dalam setiap interaksi yang dilakukan di antara para guru, murid dan keluarga serta keseluruhan suasana belajar mengajar. Karena jenis pendidikan ini merupakan *pedagogi* kritis, refleksi dan menjadi basis aksi perubahan dalam masyarakat, pendidikan multikultural mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi dalam berkeadilan sosial.

Mengenai fokus pendidikan multikultural, Tilaar (2002:15) mengungkapkan bahwa dalam program pendidikan multikultural, fokus tidak lagi diarahkan semata-mata kepada kelompok sosial, agama, dan kultural *mainstream*. Pendidikan multikultural sebenarnya merupakan sikap peduli dan mau mengerti ataupun pengakuan terhadap orang lain yang berbeda. Dalam konteks itu, pendidikan multikultural melihat masyarakat secara lebih luas, mencakup subjek-subjek mengenai ketidakadilan, kemiskinan, penindasan, dan keterbelakangan kelompok-kelompok minoritas dalam berbagai bidang, baik itu sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Dalam konteks deskriptif, pendidikan multikultural sepatutnya berisikan tentang tema-tema mengenai toleransi, perbedaan *ethno-cultural* dan agama, bahaya diskriminasi, penyelesaian konflik dan mediasi, hak asasi manusia, demokratisasi, pluralitas, kemanusiaan universal, dan subjek-subjek lain yang relevan.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Zamroni (2011:159) bahwa pendidikan multikultural di Indonesia harus mengupayakan agar nilai-nilai budaya kedaerahan (suku bangsa) dan agama di

Indonesia dapat dipahami, dihargai, dan dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan kebangsaan kewarganegaraan berlandaskan semboyan “*bhinneka tunggal ika*” dan falsafah Pancasila, dengan mengedepankan toleransi dan kerukunan antarbudaya dan pemeluk agama. Oleh karena itu menurutnya jika pendidikan multikultural akan diimplementasikan di Indonesia, haruslah berdasarkan realita Indonesia dan kearifan lokal (*local wisdom* atau *indigenous knowledge*) dalam makna luas dengan memperhatikan karakteristik bangsa dan budaya Indonesia sendiri.

Menindaklanjuti berbagai pemikiran tersebut maka penerapan pendidikan multikultural di lembaga sekolah pada wilayah yang masyarakatnya terpapar konflik bernuansa SARA sangat ideal untuk memanfaatkan kearifan lokal masing-masing etnik sebagai basis pembelajarannya. Hadirnya pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal di tengah-tengah dunia pendidikan kita saat ini menjadi hal yang sangat mendesak karena selain menawarkan solusi untuk keluar dari konflik-konflik yang bersifat SARA. Pendidikan ini mengandaikan terbentuknya rasa toleransi, saling menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi rasa kebersamaan dalam perbedaan. Pendidikan multikultural yang berpijak pada konteks kebhinekaan lebih mengarah pada bentuk pendidikan multikultural yang memperhatikan sekaligus menampung aspirasi nilai-nilai sosio kultural yang dianut dan dijunjung sebagai falsafah hidup atau kearifan lokal masyarakat.

Pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal adalah proses pembelajaran (edukatif) tentang keberagaman (kebhinekaan) bangsa Indonesia beserta upaya-upaya yang menumbuhkembangkan kesadaran dan sikap peserta didik untuk menerima, mengakui dan menghargai keberagaman (etnik, ras, bahasa, agama, ekonomi, gender dan sebagainya), berjiwa kesetaraan, toleran dan demokratis sesuai dengan karakteristik kearifan lokal bangsa Indonesia. Adapun pelaksanaan pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal tidaklah harus mengubah kurikulum. Pelajaran pendidikan multikultural dapat terintegrasi pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dan lainnya. Hanya saja diperlukan pedoman bagi guru untuk menerapkannya.

Utamanya peserta didik harus ditumbuhkan sikap toleransi, kebersamaan, HAM, demokratisasi, dan saling menghargai dengan memanfaatkan nilai-nilai luhur yang terdapat dalam kearifan lokal setempat.

A. Lampung Selatan dalam Keragaman Etnik

Kabupaten Lampung Selatan merupakan kabupaten di Propinsi Lampung dengan ibu kota Kalianda. Kabupaten yang terletak di ujung pulau Sumatera bagian Selatan ini dikenal sebagai “Pintu Gerbang Sumatera” karena terkait adanya pelabuhan penyeberangan Bakauheni yang menjadi penghubung masyarakat antar pulau Sumatera-pulau Jawa, dan sebagai kawasan *Pelangi Nusantara*, karena merupakan provinsi yang wilayahnya terbuka bagi pendatang sehingga memiliki penduduk beragama dari berbagai etnik Nusantara.

Wilayah Lampung Selatan memiliki luas 2.109.74 km² dan dihuni oleh sekitar 1.260.135 jiwa yang tersebar di 17 kecamatan dengan 248 desa (data BPS Lamsel per 31 Desember 2014). Mencermati daya dukung komoditi yang dimiliki wilayah tersebut sebagaimana paparan di atas,sertadi wilayah tersebut terdapat tiga sarana dan prasarana transportasi penting di Provinsi Lampung, yakni pelabuhan penyeberangan Bakauheni, Bandar Udara Raden Inten II, dan Jalan TOL Sumatrera yang akan dibangun untuk menghubungkan Bakauheni hingga Terbanggi Besar di Lampung Tengah, maka wilayah Lampung Selatan memiliki prospek yang menjanjikan untuk menjadi wilayah yang akan cepat berkembang maju. Meskipun dengan demikian konsekuensinya tentu akan berimplikasi pada aspek-aspek lain yang menyertainya, seperti aspek sosial, politik, dan budaya.

Kabupaten Lampung Selatan saat ini terdiri atas 17 kecamatan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 4: Nama Kecamatan dan Jumlah Desa Per-kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Desa
1	Bakauheni	5
2	Ketapang	15
3	Penengahan	22
4	Sragi	11
5	Palas	20
6	Raja Basa	15
7	Kalianda	24
8	Way Panji	4
9	Sidomulyo	16
10	Candipuro	14
11	Way Sulan	8
12	Katibung	12
13	Merbau Mataram	15
14	Tanjung Bintang	16
15	Tanjung Sari	8
16	Jati Agung	21
17	Natar	22
Jumlah		248

Sumber: Sujadi (2012:136)

Kecamatan Sidomulyo terdiri atas 16 desa dengan 85.176 jiwa, yang masyarakatnya berasal dari berbagai etnik. Data komposisi penduduk berdasarkan etniknya dari masing-masing desa tergambar dalam tabel berikut ini.

Tabel 5: Jumlah Penduduk Kecamatan Sidomulyo Berdasarkan Etnik

NO	NAMADESA	ETNIK											JUMLAH	
		LPG	JW	SD	BL	SMD	BTN	BTK	MNG	MDR	TGH			
1	Bandar Dalam	1.818	364	3.636		212		30						6.060
		30,0%	6,0%	60,0%		3,5%		0,5%						100,0%
2	Campang Tiga	861	1.721	1.506		215		-						4.303
		20,0%	40,0%	35,0%		5,0%								100,0%
3	TalangBaru	230	263	165		2.633		-						3.291
		7,0%	8,0%	5,0%		80,0%								100,0%
4	Suka Banjar	855	900	6.746		-	450	45						8.995
		9,5%	10,0%	75,0%			5,0%	0,5%						100,0%
5	Kota Dalam	1.917	799	320		-		160						3.195
		60,0%	25,0%	10,0%				5,0%						100,0%
6	BudiDaya	118	1.913	736		88		88						2.943
		4,0%	65,0%	25,0%		3,0%		3,0%						100,0%
7	SiringJaha	897	364	509		291	364	-						2.425
		37,0%	15,0%	21,0%		12,0%	15,0%							100,0%
8	Suak	2.221	1.666	1.388	56	222		-						5.553
		40,0%	30,0%	25,0%	1,0%	4,0%								100,0%
9	SukaMaju	1.093	455	91		-	182	-						1.821
		60,0%	25,0%	5,0%			10,0%							100,0%

10	Suka Marga	994	648	259						259								2.160	
		46,0%	30,0%	12,0%						12,0%								100,0%	
11	Selo Retno	995	3.731							249								4.975	
		20,0%	75,0%							5,0%								100,0%	
12	Sido Dadi		8.190	96	289						96	964						9.635	
			85,0%	1,0%	3,0%						1,0%	10,0%						100,0%	
13	Sido Rejo	960	7.196	384	192					384	192				96	192		9.595	
		10,0%	75,0%	4,0%	2,0%					4,0%	2,0%				1,0%	2,0%		100,0%	
14	Sidomulyo	195	7.412	187	8													7.802	
		2,5%	95,0%	2,4%	0,1%													100,0%	
15	Sido Waluyo	467	6.535	280	1.867						187							9.335	
		5,0%	70,0%	3,0%	20,0%						2,0%							100,0%	
16	Banjar Sari	309		2.007							772							3.088	
		10,0%		65,0%							25,0%							100,0%	
TOTAL																			85.176

Sumber: Kantor Kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan Propinsi Lampung

Keterangan:

LPG	= etnik Lampung	BTN	= etnik Banten
JW	= etnik Jawa	BTK	= etnik Batak
SD	= etnik Sunda	MNG	= etnik Minang
BL	= etnik Bali	MDR	= etnik Madura
SMD	= Semendo (Palembang)	TGH	= etnik Tionghoa

Berdasarkan data tersebut tampak bahwa desa yang paling multietnik di kecamatan Sidomulyo adalah desa Sido Rejo, yakni berasal dari delapan etnik yakni: (Lampung, Jawa, Sunda, Bali, Semendo, Batak, Madura, dan Tionghoa. Selain itu desa tersebut juga merupakan kawasan yang paling banyak penduduknya dibandingkan desa lainnya, yakni 9.595 jiwa. Kondisi ini terjadi mengingat kawasan tersebut merupakan kawasan niaga atau pasar.

Kemajemukan masyarakat di kecamatan Sidomulyo tidak hanya dalam hal etnik melainkan juga dalam hal agama yang dianut oleh masyarakatnya. Agama yang dianut lazimnya identik dengan etnik pemeluknya. Etnik Lampung, Sunda, Banten, Semendo, dan Minang cenderung beragama Islam, etnik Jawa sebagian beragama Islam dan lainnya beragama Kristen Katolik, etnik Batak beragama Kristen Protestan, dan etnik Bali beragama Hindu. Gambaran pemeluk agama pada masyarakat kecamatan Sidomulyo berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Kecamatan Sidomulyo adalah sebagai berikut:

Tabel 6: Jumlah Penduduk Kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan Berdasarkan Agama pada Tahun 2015

Desa	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Lainnya	Jumlah
Bandar Dalam	6.001	46	4	0	3	6	6.060
Campang Tiga	4.276	1	0	0	2	24	4.303
Talang Baru	3.256	7	26	0	0	2	3.291
Suka Banjar	8.776	170	7	1	4	37	8.995
Kota Dalam	3.091	52	1	2	0	49	3.195
Budidaya	2.850	90	1	0	0	2	2.943
Siring Jaha	2.418	3	0	1	3	0	2.425
Suak	5.491	22	0	1	1	38	5.553
Sukamaju	1.813	7	0	0	0	1	1.821
Suka Marga	2.111	0	0	57	0	2	2.160
Selo Retno	4.646	148	80	61	2	38	4.975
Sido Dadi	8.933	314	250	131	4	3	9.635
Sido Rejo	9.178	122	266	11	6	12	9.595
Sidomulyo	7.685	34	51	8	0	24	7.802
Sido Waluyo	7.074	145	17	2.079	2	18	9.335
Banjar Sari	3.069	16	3	0	0	0	3088
Jumlah	7.878	1.177	706	2.352	27	256	85.176

Sumber: Kantor Kecamatan Sidomulyo Lampung Selatan Propinsi Lampung

Berdasarkan deksripsi data tersebut terungkap bahwa etnik pendatang terutama etnik Jawa merupakan etnik mayoritas pada hampir semua desa di kecamatan Sidomulyo. Selebihnya diisi oleh etnik lainnya, seperti Semendo (Palembang), Banten, Batak, Minang, Madura, Tionghoa, dan termasuk etnik tuan rumah, Lampung. Begitu banyaknya warga dari etnik pendatang terutama etnik Jawa bahkan memunculkan kesan bahwa jika mengunjungi kawasan ini terasa lebih mudah menemukan orang etnik Jawa daripada etnik asli Lampung.

Hal menarik berdasarkan komposisi etnik di wilayah tersebut adalah secara umum etnik Lampung justru menjadi etnik minoritas di tanahnya sendiri, Adapun terkait keberadaan etnik Bali di Kecamatan Sidomulyo yang menurut data berjumlah 2.412 jiwa atau 2,83% dari 85.176 penduduk Sidomulyo, karena wilayah tersebut termasuk kawasan yang sejak zaman kolonial Belanda merupakan salah satu tempat tujuan transmigrasi besar-besaran dari pulau Jawa dan Bali. Pada tahun 1950–1968 pada Pra Pelita dilakukan program transmigrasi sejumlah 53.280 KK atau 220.663 jiwa dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, DIY dan Bali yang ditempatkan di Lampung Selatan, yakni di Palas, Sidomulyo, Balau Kedaton, Sidomakmur, dan Tanjungan (Sa. 2012:17).

Menurut penuturan Bapak Made Gambar (tokoh masyarakat Bali di Way Panji, Lampung Selatan), masyarakat Bali di Sidomulyo itu ditransmigrasikan oleh pemerintah sebagai korban letusan Gunung Agung, Bali, dan masyarakat umum menyebut mereka itu orang Bali Koga (akronim Korban Gunung Agung). Hal tersebut sedikit berbeda dengan keberadaan masyarakat etnik Bali di desa Balinuraga. Mereka ini berasal dari pulau Nusa Penida yang kedatangannya ke Lampung Selatan sebagai transmigran swakarsa atau atas inisiatif sendiri. Pemerintah hanya menyediakan lahan kosong yang masih berupa hutan belukar dan banyak binatang buasnya yang kemudian diberi nama Balinuraga untuk dibuka dan diolah menjadi tempat permukiman dan tanah garapan.

Sekelumit tentang karakter orang Bali dari Nusa Penida diungkapkan dalam penelitian Bagus dkk. (1981), bahwa secara geografis Nusa Penida secara geografis merupakan suatu pulau

dalam kawasan Daerah Tingkat II Kabupaten Klungkung yang kondisi alamnya berupa pulau bekas rawa-rawa kering dengan lapisan tanah tipis pada batu-batu karang atau batu kapur yang keras dan tandus sehingga hanya pohon kelapa yang dapat tumbuh. Selebihnya jagung, kacang-kacangan, ketela pohon dan kedelai yang hanya dapat ditanam saat musim lembab pada November hingga bulan Maret. Secara historis, dalam perjanjian tujuh kerajaan di Bali dalam tahun Saka 1776 (1854M) natar kerajaan Klungkung, Buleleng, Bangli, Payangan, Gianyar dan Mengwi, kawasan Nusa Penida merupakan daerah kosong yang dijadikan tempat pembuangan bagi orang-orang golongan triwangsa (Brahmana, Ksatria dan Wesya) yang mendapat hukuman kerajaan. Secara sosio kultural masyarakat Bali asli Nusa Penida disebut sebagai “Orang Nusa” atau “Orang Baliaga” dan dikenal memiliki nenek moyang yang kuat, ulet atau pekerja keras dan sakti karena mampu bertahan hidup di kawasan pembuangan yang tandus dan dikuasai kekuatan magis. Secara religi mereka hidup di antara keyakinan terhadap agama Hindu Dharma (kecuali desa Toyopakeh yang Islam) dan kepercayaan yang kuat pada ilmu gaib dan mitos (pemujaan kepada tokoh Ratu Gde Mecaling sebagai raja mahluk halus yang sakti dan menjadi patih di Pura Dalem Penataran desa Ped). Kisah kesaktian dan hal-hal magis yang ditakuti itu melekat pada orang Nusa Penida dan kisahnya menyebar hingga kawasan Bali lainnya.

Karakter orang Bali dari Nusa Penida di tanah leluhurnya itu tampaknya tidak jauh berbeda dengan karakter orang Bali di Balinuraga Lampung Selatan. Dalam penelitian Humaedi (2014:155-159) disebutkan masyarakat etnik Bali di Balinuraga itu dikenal sebagai suatu kelompok orang Bali yang berasal dari Nusa Penida yang dianggap dari kasta Sudra, memiliki karakter keras, tidak sopan, arogan, kerja keras, dan banyak memiliki ilmu hitam. Selain itu karena penempatannya khusus untuk komunitasnya sendiri (*cluster*) atau terpisah dari etnik Bali dari kawasan lain maupun etnik lain di sekitarnya membuat kelompok etnik Bali ini memiliki satu-kesatuan yang kuat atas dasar ikatan primordial sebagai “orang Balinuraga” yang berada di atas rata-rata orang Bali pada umumnya, dan apalagi terhadap orang dari kelompok etnik lainnya.

B. Keragaman dan Kearifan Lokal di SMPN 1 Sidomulyo

1. Keragaman Etnik Peserta Didik di SMPN 1 Sidomulyo

Keberagaman peserta didik SMPN 1 Sidomulyo berdasarkan agama yang dianutnya memperlihatkan bahwa pemeluk agama Islam merupakan mayoritas, yakni 89,14% (780 dari 875). Adapun peserta didik yang menganut agama Kristen Katolik 1,83% (16 dari 875), penganut agama Kristen Protestan 2,51% (22 dari 875), dan penganut agama Hindu 6,51% (57 dari 875). Dalam hal ini peserta didik penganut agama Hindu yang sekaligus identik dari etnik Bali merupakan penganut agama terbesar kedua setelah penganut agama Islam.

Dalam hal keberagaman peserta didik SMPN 1 Sidomulyo berdasarkan etnik memperlihatkan bahwa peserta didik etnik Jawa lebih dominan dibandingkan dengan peserta didik etnik lainnya termasuk etnik pribumi asli Lampung. Peserta didik etnik Jawa mencapai 67,2% (588 dari 875), peserta didik etnik Lampung 9,37% (82 dari 875), dan dari etnik Bali 6,51% (57 dari 875). Dominasi etnisitas dalam masyarakat sekolah semacam ini bukan karena terdapat unsur yang sengaja diciptakan oleh pihak sekolah tetapi lebih karena keputusan masyarakat yang lebih rasional dalam memilih sekolah, seperti kedekatan atau keterjangkaun jarak dari rumah ke sekolah, serta realita bahwa mayoritas masyarakat di sekitar lingkungan sekolah tersebut adalah masyarakat etnik Jawa dan etnik pendatang lainnya.

Sekolah yang memiliki 24 kelas rombongan belajar dan memulai pembelajarannya pada pukul 07.30 s.d. 13.35 WIB ini pada tahun 2011 telah diakreditasi dengan predikat A. Sekolah yang pernah menjadi binaan UNICEF selama tiga tahun (2008-2010) dalam pelaksanaan pembelajaran PAKEM ini pada tahun 2014 meraih Juara 1 Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten Lampung Selatan dan Sekolah Berwawasan Lingkungan Hidup (Sekolah Adi Wiyata) Tingkat Kabupaten Lampung Selatan, dan saat ini menjadi sekolah RSSN (Rintisan Sekolah Standar Nasional). Kemajuan yang diraih sekolah tersebut menjadikan-nya sebagai SMP negeri yang sangat diperhitungkan oleh sekolah lain yang setara, terutama di Lampung Selatan.

2. Kearifan Lokal di SMPN 1 Sidomulyo

Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sidomulyo Lampung Selatan secara sosiokultural berada di tengah lingkungan masyarakat yang mayoritas etnik Jawa, dan memiliki pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik yang heterogen dengan mayoritas etnik Jawa. Dengan kondisi tersebut terkesan nilai-nilai kearifan lokal Jawa, seperti bahasa dan nilai-nilai falsafah Jawa lebih terasa daripada falsafah dari etnik lainnya.

SMPN 1 Sidomulyo Lampung Selatan selain sebagai lembaga penyelenggara pendidikan sebagaimana sekolah lainnya juga sebagai tempat pembudayaan nilai-nilai kehidupan yang akan membentuk sikap dan pola pikir orang-orang di dalamnya. Dalam upaya menumbuhkan sikap dan pemikiran yang terbuka terhadap perbedaan, memiliki kebanggaan terhadap budaya nasional namun diiringi sikap toleransi dan saling menghargai keragaman budaya, maka sekolah perlu menggali dan mengembangkan potensi nilai-nilai yang bersumber dari kearifan lokal setempat baik dari aspek sosial budaya maupun agama.

Dalam hal ini kegiatan yang bersumber dari pengembangan nilai-nilai kearifan lokal di SMPN 1 Sidomulyo Lampung Selatan, adalah sebagai berikut:

- a. Menjabat tangan dan mengucapkan salam khas Islam dan salam khas Lampung.
- b. Menggunakan pakaian seragam batik bermotif khas Lampung pada setiap hari Rabu dan Kamis.
- c. Menggunakan busana muslim baju koko pada hari Jumat di bulan Ramadhan untuk siswa laki-laki muslim, dan pada hari biasa sehari-hari siswa, guru dan staf TU yang muslim mengenakan jilbab.
- d. Menggunakan hiasan khas motif tapis Lampung pada bagian luar dinding kelas dan ruangan.
- e. Memasang hiasan berbentuk *Siger* pada bagian atas gerbang sekolah. *Siger* merupakan mahkota pengantin wanita sekaligus simbol kejayaan atau kebesaran dan ikon daerah Lampung.

Berbagai bentuk kearifan lokal tersebut secara teoritis merupakan perwujudan kegiatan kurikulum tersembunyi yang memiliki peran penting dalam menumbuhkembangkan kompetensi multikultural peserta didik, yakni sadar dan bangga terhadap etnik dan kebudayaannya, kemampuan bekerja sama dalam perbedaan, berjiwa kesetaraan, bersikap toleran, dan demokratis, dengan menerima, mengakui dan menghargai kebhinekaan (etnik, ras, bahasa, agama, ekonomi, gender dan sebagainya).

C. Pendidikan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal di SMPN 1 Sidomulyo

Pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal di sekolah sangat berkaitan dengan kegiatan kurikuler yang dilaksanakan di sekolah tersebut. Kurikuler dapat dimaknai sebagai semua aktivitas pendidikan yang berkaitan dengan kurikulum baik berupa kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, maupun kegiatan yang merupakan perwujudan dari kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*).

Terkait dengan pencermatan terhadap pelaksanaan pendidikan multi- kultural berbasis kearifan lokal dalam kegiatan kurikuler, Banks (2010:23), secara spesifik menyatakan bahwa pendidikan multikultural dapat dikonsepsi- kan atas lima dimensi yang saling berkaitan, yaitu:

- a. Integrasi konten (*content integration*); pemaduan konten mengenai sejauh mana guru menggunakan materi dari beragam budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep, prinsip, generalisasi serta teori utama dalam bidang mata pelajaran atau disiplin ilmu.
- b. Proses penyusunan pengetahuan (*the knowledge construction process*); sesuatu yang berhubungan dengan sejauh mana guru membantu siswa membangun pengetahuannya atas suatu budaya dengan memahami, menyelidiki, dan menentukan asumsi dan implikasi yang tersirat, kerangka acuan, perspektif dan prasangka di dalamnya.
- c. Paedagogi kesetaraan (*an equity paedagogy*); berhubungan dengan kemampuan guru untuk mengubah dan menyesuaikan

metode, strategi pembelajarannya untuk memfasilitasi prestasi akademis siswa dari berbagai kelompok ras, budaya, dan kelas sosial. Termasuk dalam pedagogi ini adalah penggunaan beragam gaya mengajar yang konsisten dengan banyaknya gaya belajar di dalam berbagai kelompok budaya dan ras.

- d. Mengurangi prasangka (*prejudice reduction*); dimensi ini fokus pada kemampuan guru dalam mengidentifikasi karakteristik sikap rasial siswa dan mengubahnya melalui metode pembelajaran yang partisipatif dan interaktif (meningkatkan partisipasi dan interaksi siswa) menuju budaya akademik yang toleran dan inklusif.
- e. Memberdayakan struktur sosial budaya sekolah (*empowering school culture and social structure*); sebuah upaya untuk membangun struktur sosial budaya sekolah yang memberdayakan interaksi beragam kelompok ras, etnis dan budaya.

Pemenuhan dimensi tersebut pada pelaksanaan pendidikan multi- kultural itu tidak dapat dipisah-pisahkan atau masing-masing tidak berdiri sendiri. Artinya meskipun cara atau upaya guru hanya memenuhi salah satu dimensi yang tidak begitu dominan namun memiliki keterkaitan dengan dimensi lainnya dan dimensi tersebut turut memengaruhi pelaksanaan pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal pada sekolah. Hal tersebut terkait juga dengan pencapaian sasaran atau tujuan pendidikan multikultural pada peserta didik atau siswa.

Dalam hal ini Amirin (2012:28) menyebutkan bahawa sasaran atau tujuan pelaksanaan pendidikan multikultural yang dikembangkan pada diri setiap siswa meliputi tiga kompetensi, yakni; pertama, kompetensi pengembangan identitas kultural: merupakan kompetensi yang dimiliki siswa untuk mengidentifikasi dirinya dengan suatu etnis tertentu. Kompetensi ini mencakup pengetahuan, pemahaman dan kesadaran akan kelompok etnis dan menimbulkan kebanggaan serta percaya diri sebagai warga kelompok etnis tertentu.

Kedua, kompetensi hubungan interpersonal: yakni kompetensi untuk melakukan hubungan dengan kelompok etnis lain, dengan senantiasa mendasarkan pada persamaan dan kesetaraan, serta menjauhi sifat berprasangka dan stereotip. Ketiga, kompetensi memberdayakan diri sendiri; yakni suatu kemampuan untuk mengembangkan secara terus menerus apa yang dimiliki berkaitan dengan kehidupan multikultural. Berdasarkan ketiga sasaran tersebut, dapat diakumulasikan bahwa sasaran atau tujuan pendidikan multikultural adalah menumbuhkembangkan kompetensi multikultural pada peserta didik atau siswa, yakni; sadar dan bangga terhadap etnik dan kebudayaannya, kemampuan bekerja sama dalam perbedaan, berjiwa kesetaraan, bersikap toleran, dan demokratis, dengan menerima, mengakui dan menghargai kebhinekaan (etnik, ras, bahasa, agama, ekonomi, gender dan sebagainya).

Berkaitan dengan itu maka dalam mengkaji pelaksanaan pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal yang juga menyangkut cara maupun hasilnya pada kegiatan kurikuler tidak terlepas dari pemenuhan dimensi multikultural dan pencapaian kompetensi multikultural tersebut baik pada berbagai rangkaian kegiatan kurikulum formal yang meliputi intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, maupun dalam kegiatan kurikulum nonformal atau kurikulum tersembunyi.

1. Pendidikan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal dalam Kegiatan Intrakurikuler

Kegiatan intrakurikuler dapat dimaknai sebagai kegiatan yang diselenggarakan sekolah bagi berlangsungnya proses pembelajaran kepada peserta didik sejak dari penyediaan mata pelajaran dan materi pelajaran, penentuan alokasi waktu, penentuan dan pengaturan kelas, pendistribusian kelas dan jumlah jam mengajar guru, penyusunan RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran), pelaksanaan proses pembelajaran hingga evaluasi dan penilaian. Secara sederhana wujud kegiatan intrakurikuler adalah proses pembelajaran yang dilakukan guru dan siswa sehari-hari di dalam kelas.

Memperhatikan betapa kompleksnya kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan intrakurikuler itu, dapat dikatakan bahwa kegiatan intrakurikuler merupakan kegiatan sentral atau pokok dalam proses pendidikan di suatu lembaga sekolah. Pelaksanaan pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal dalam kegiatan intrakurikuler yang dilakukan oleh guru dapat dicermati sejak awal melalui pengamatan pada RPP yang disusun oleh guru. RPP yang disusun oleh guru mata pelajaran IPS kelas VII memiliki bentuk atau format sesuai dengankurikulum yang berlaku saat ini, yaitu Kurikulum 2013. Format penyusunan RPP tidak mutlak sama antarguru maupun antarsekolah. Lazimnya format yang ada akan berkembang atau dimodifikasi sesuai kebutuhan guru melalui forum MGMP (musyawarah guru mata pelajaran) atau KKG (kelompok kerja guru). Meskipun demikian, secara umum unsur-unsur yang termuat dalam kurikulum yang pernah berlaku cenderung sama, yakni; (1) bagian pendahuluan, berisi; identitas sekolah, mata pelajaran, kelas, program, jurusan, semester, alokasi waktu dan pokok bahasan. (2) bagian proses atau isi, meliputi; KI (Kompetensi Inti), KD (Kompetensi Dasar), indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, pendekatan, metode, strategi, media, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, (3) penilaian, evaluasi, refleksi, dan pengesahan.

Dalam menyusun RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran) guru mengacu pada silabus mata pelajaran. RPP yang disusun guru untuk satu pertemuan tatap muka atau lebih secara lengkap dan sistematis harus dapat mencerminkan proses pembelajaran akan berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikis peserta didik. Penyusunan RPP oleh guru akan mencerminkan kompetensi dan kreativitas yang dimilikinya sebagai pendidik profesional. Mengingat tidak semua guru memiliki kemampuan yang sama, maka dapat terjadi beberapa guru dalam mata pelajaran yang sama, jenjang kelas dan beban belajarnya sama, serta bersumber dari silabus kurikulum yang sama namun RPP yang

disusunnya berbeda. Perbedaan tersebut lazimnya terletak pada penggunaan strategi, metode, media, dan sumber belajar. Perbedaan tersebut juga dapat terjadi karena penyusunan RPP disesuaikan dengan situasi, kondisi dan karakter sosial budaya sekolah, serta daya dukungnya, dan karakter serta kebutuhan peserta didiknya.

Berdasarkan unsur-unsur yang termuat dalam RPP, yakni metode dan strategi, media, dan sumber belajar yang pemilihannya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan sekolah, kelas, karakter peserta didik, dan daya dukung sekolah, maka terdapat kesesuaian dengan tuntutan yang disyaratkan dalam pendidikan multikultural. Keputusan guru dalam memilih metode dan strategi pembelajaran serta kemampuan menerapkannya, dan kemampuan guru dalam menggunakan dan memanfaatkan media dan sumber belajar akan menentukan kualitas proses pembelajarannya, yakni akan menciptakan suasana yang menyenangkan atau justru membosankan dan mencekam. Akan menumbuhkan dan mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik atau justru mematikkannya. Akan menciptakan proses yang demokratis dan menghargai perbedaan atau justru akan otoriter mendominasi dan mengekang penuh pemaksaan.

Pelaksanaan pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal pada kegiatan intrakurikuler guru mata pelajaran IPS kelas VII di SMPN1 Sidomulyo terakomodasi dalam RPP yang disusun oleh guru (lihat halaman 157-162). Guru memiliki rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memenuhi dimensi pendidikan multikultural, yakni pada dimensi paedagogis. Dimensi kesetaraan paedagogi (*an equity paedagogy*) dapat dimaknai juga sebagai kemampuan guru dalam melakukan pembelajaran yang memfasilitasi berbagai keberagaman dan perbedaan peserta didik dengan mengubah atau dan menyesuaikan strategi, metode dan gaya mengajarnya. Dalam RPP guru merancang pembelajaran dengan menggunakan strategi *cooperative learning*; STAD (*student teams achievement divisions*), media dan sumber belajar yang variatif berbasis teknologi informasi dan komputer berupa tayangan *powerpoint* dan internet.

Keuntungan pembelajaran dengan media berbasis teknologi seperti itu antara lain; materi pembelajaran relatif menjadi lebih menarik, siswa memiliki alternatif sumber belajar selain guru dan buku dengan mengakses berbagai kontens yang berkaitan dengan materi pembelajaran dari berbagai sumber, serta mengurangi peran dan dominasi guru yang berlebihan di kelas.

Keputusan guru mata pelajaran IPS dalam penyampaian materi pokok “Dinamika Interaksi Manusia” yang dikemas dengan metode diskusi dalam strategi *cooperative learning*; STAD (*student teams achievement divisions*) merupakan keputusan tepat karena akan menjadikan proses pembelajaran yang mengedepankan kebutuhan peserta didik, interaktif, dalam suasana yang menyenangkan, demokratis, menginspirasi dan memotivasi peserta didik untuk berpikir kritis, serta menumbuhkan pemaknaan, pemahaman, dan penerimaan yang baik atas keberagaman dan perbedaan. Penggunaan metode dan strategi pembelajaran yang digunakan berkaitan dengan model pembelajaran berbasis PAKEM (partisipatif, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan) tersebut apabila dapat dilaksanakan secara baik akan memunculkan interaksi dan suasana pembelajaran yang kondusif bagi proses pembelajaran yang memenuhidimensi pendidikan multikultural.

Proses pembelajaran seperti itu sejalan dengan pendekatan konstruktivisme. Suparno (1997:65-66) menyebutkan bahwa pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran itu kegiatan mengajar bukanlah memindahkan pengetahuan dari pendidik ke peserta didik, melainkan suatu kegiatan yang memungkinkan peserta didik membangun sendiri pengetahuannya. Mengajar berarti berpartisipasi dengan peserta didik dalam membentuk pengetahuan, membuat makna, mempertanyakan kejelasan, bersikap kritis, dan mengadakan justifikasi dengan memfungsikan peran peserta didik sebagai mediator dan fasilitator. Dengan demikian dapat dipahami bahwa proses yang ditempuh oleh guru di SMPN 1 Sidomulyo tersebut proses pembelajarannya pendidik telah memberi otonomi, kebebasan peserta didik untuk melakukan eksplorasi masalah dan pemecahannya secara individual dan kolektif, sehingga daya pikirnya dirangsang untuk secara optimal

aktif membangun dan membentuk pengetahuan dan pemaknaan yang baru. Pendidik telah memberi peluang seluas-luasnya agar terjadi proses dialogis antara sesama peserta didik, dan antara peserta didik dengan pendidik, sehingga semua pihak merasa bertanggung jawab bahwa pembentukan pengetahuan adalah tanggungjawab bersama. Caranya dengan memberi pertanyaan-pertanyaan, tugas-tugas yang terkait dengan topik tertentu, yang harus dipecahkan, didalami secara individual ataupun kolektif, kemudian diskusi kelompok, menulis, dialog dan presentasi di depan teman yang lain.

Penerapan pendidikan multikultural terkait dengan pemilihan materi (*contents*). Proses pembelajaran dengan materi yang mencerminkan pendidikan multikultural akan menentukan pemahaman makna keberagaman dan tumbuhnya sikap toleransi pada diri peserta didik, tidak menganggap suku atau etniknya lebih baik lalu mengecilkan keberadaan etnik lainnya. Dari segi isi materi (*contents*), pelaksanaan pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal pada kegiatan intrakurikuler di SMPN 1 Sidomulyo Lampung Selatan belum mencerminkan dimensi kontens. Dimensi kontens (*content integration*) dapat dimaknai sebagai kemampuan guru dalam menentukan, memadukan, dan menggunakan materi dari beragam budaya melalui mata pelajaran IPS yang dapat menumbuhkembangkan kompetensi multikultural.

Berkaitan dengan kearifan lokal yang diharapkan dapat menjadi sumber dasar atau basis dalam pelaksanaan pendidikan multikultural di daerah konflik Lampung Selatan, menunjukkan bahwa kearifan lokal etnik Lampung maupun Bali belum dipergunakan sebagai sumber dasar atau basis pembelajaran. Guru masih sebatas menggunakan materi tentang keberagaman sosial budaya suku bangsa di Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam materi buku pokok pelajaran IPS. Dengan kata lain guru belum secara khusus merancang materi yang berkaitan nilai-nilai sosial budaya pada kearifan lokal masyarakat etnik Lampung maupun masyarakat etnik Bali yang ada di lingkungan sekitar sekolah tersebut.

Materi keberagaman nilai-nilai sosial budaya bangsa pada buku pokok pelajaran IPS kurikulum 2013 dirancang untuk memenuhi kebutuhan nasional dalam menumbuhkembangkan pemahaman dan sikap toleransi dan menghargai perbedaan dalam keberagaman. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan lokal daerah yang masyarakatnya pernah terlibat konflik antaretnik, bahkan mempresentasikan konflik antarumat beragama, maka akan lebih tepat jika guru di daerah konflik melakukan penyesuaian materi yang memenuhi pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal masyarakat yang secara real hidup dan berkembang di lingkungan sekitar kawasan sekolah tersebut.

Dalam pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal melalui mata pelajaran IPS yang menggunakan pendekatan konstruktivisme dengan fungsi guru sebagai fasilitator guru harus memberikan peluang kepada siswa untuk membangun pengetahuan yang telah mereka miliki sebelumnya, kemudian guru dapat menghubungkan materi pelajaran dengan situasi dan kondisi lingkungan dan nilai-nilai sosio kultural sekitar siswa. Jadi, ketika guru IPS menyampaikan materi pelajaran dengan pokok bahasan Interaksi Manusia dengan Lingkungan Sosial Budaya atau tentang materi Keragaman Budaya sebagai Hasil Dinamika Interaksi Manusia, langkah awal yang dilakukan guru IPS adalah mengemukakan pengetahuan awal siswa tentang Budaya Indonesia, diikuti pertanyaan-pertanyaan yang menggali problematik tentang suatu fenomena sosial yang berhubungan dengan keragaman budaya di lingkungan masyarakat tempat tinggal mereka. Selanjutnya siswa diberi kesempatan untuk mengomunikasikan atau mengilustrasikan pemahamannya tentang keragaman budaya tersebut. Kemudian siswa diberi kesempatan untuk menyelidiki dan menemukan sendiri tentang keberagaman budaya yang ada di lingkungan sekeliling siswa itu melalui suatu kegiatan inkuiri dan diskusi. Misalnya, kesamaan dan perbedaan yang terdapat pada kebudayaan masyarakat Lampung dan Bali.

Dari diskusi tentang topik tersebut, akan menuntun peserta didik pada temuan kearifan lokal yang diakui bersama telah menjadi bagian dari kehidupan mereka.

Bahwa jika pada masyarakat Lampung memiliki “*Sakai Sembayan*” yang bermakna sikap toleransi yang berwujud kepedulian pada kebersamaan atau gotong royong, ternyata pada masyarakat etnik Bali terdapat *Sagilik saguluk salunglung sabayantaka, paras paros sarpanaya* yang memiliki makna serupa, yakni bersatu padu dalam suka-duka dan menghadapi bahaya, berembuk dan bermusyawarah (menghargai pendapat orang lain), saling mengingatkan, saling menyayangi, dan gotong royong saling menolong pada setiap kesempatan.

Berbagai kesulitan dihadapi guru dalam melaksanakan pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal etnik Lampung dan etnik Bali. Kesulitan guru menggunakan kearifan lokal masyarakat etnik Lampung dan Bali dalam melaksanakan pendidikan multikultural di daerah konflik tersebut bukan sesederhana karena semata-mata disebabkan terbatasnya pemahaman guru terhadap kearifan lokal secara umum maupun kearifan lokal masyarakat kedua etnik tersebut, melainkan juga karena adanya berbagai aspek yang saling berkaitan, sehingga jika guru memaksakannya dikhawatirkan akan menciptakan kondisi yang tidak kondusif. Aspek-aspek tersebut adalah sensitivitas, trauma pada peristiwa konflik yang pernah terjadi, pergeseran pemaknaan pada kearifan lokal etnik Lampung dan pemaknaan identik pada kearifan lokal etnik Bali.

Keterbatasan guru dalam memahami kearifan lokal etnik Lampung maupun Bali di sekolah dapat dimungkinkan karena posisi guru yang bukan berasal dari masyarakat etnik Lampung maupun Bali (guru IPS berasal dari etnik Palembang dan Batak). Pada kasus semacam ini, hal sederhana yang dapat ditempuh adalah dengan menuntut keprofesionalan guru untuk memiliki pengetahuan yang luas tentang kearifan lokal setempat dan seiring dengan itu pemerintah daerah atau dinas terkait untuk memberikan pendidikan tentang kajian kearifan lokal kedua etnik tersebut.

Pada aspek lain, kesulitan guru dalam menggunakan kearifan lokal adalah karena terdapat pemaknaan identik pada kearifan lokal masyarakat etnik Bali. Pemaknaan identik ini merupakan istilah untuk menggambarkan kekhasan pada masyarakat etnik Bali yang

antara kebudayaan dan ajaran agamanya memiliki kedekatan yang erat bahkan identik. Selain terkandung nilai-nilai budaya masyarakat etnik Bali juga terkandung nilai-nilai agama Hindu. Kedekatan itu melekat dalam jargon “Bali adalah Hindu–Hindu adalah Bali” yang mengandung semangat “ke-Balian” sekaligus “ke-Hinduan”. Dengan keidentikan tersebut maka yang menjadi kekhawatiran adalah manakala peserta didik mendapatkan pendidikan nilai-nilai budaya Bali, pada satu sisi merupakan upaya mengenalkan keragaman aspek budaya Nusantara, namun pada sisi lain dalam kegiatan yang sama akan dianggap sebagai bagian dari upaya orientasi pendidikan agama Hindu.

Meskipun guru yang menyampaikan materi berasal dari etnik Bali Hindu (sebagaimana wawancara dengan Pak Wayan, guru di SMPN 1 Sidomulyo Lampung Selatan), guru tetap memiliki kekhawatiran akan munculnya anggapan siswa atau orang tua/wali murid bahwa guru sedang mengajarkan akidah agama Hindu pada siswa yang mayoritas muslim. Faktor psikis (traumatis) atas konflik yang pernah terjadi antara masyarakat etnik Lampung dan etnik Bali yang seolah-olah mem-presentasikan konflik Islam dan Hindu menjadikan isu-isu agama menjadi lebih sensitif untuk memicu konflik.

Selain itu pada sisi lain, pergeseran pemaknaan pada kearifan lokal etnik Lampung juga turut memberi andil pada kesulitan guru dalam melaksanakan pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal. Pemaknaan kearifan lokal *Pi'il Pesenggiri* pada masyarakat etnik Lampung oleh etniknya sendiri secara umum cenderung telah dimaknai semata-mata “harga diri” sebagai orang Lampung yang harus dihargai, dihormati dan dijunjung tinggi. Pemaknaan inisangat jauh menyimpang dari hakikat makna *Pi'il Pesenggiri* yang sebenarnya, yakni nilai dasar yang intinya terletak pada keharusan pada diri orang Lampung untuk mempunyai hati nurani yang baik, bermoral tinggi, berjiwabesar sehingga senantiasa dapat hidup secara logis, etis dan estetik. Setelah semua aspek tersebut terpenuhi barulah akan memiliki kepatutan sebagai orang yang dihargai, dihormati, dan dijunjung tinggi di masyarakat.

Kecenderungan pemaknaan yang menyimpang ini tentu akan berimbas tumbuhnya pemaknaan atau anggapan oleh masyarakat etnik lain terhadap etnik Lampung sebagai etnik yang sulit dipahami pemikiran maupun perilakunya karena seolah-olah orang Lampung itu “gila hormat”, jika menghadapi persoalan meskipun sepele selalu ditanggapi secara penuh emosional dan dikait-kaitkan dengan harga diri. Hal itu berarti ada syarat yang dilupakan oleh masyarakat etnik Lampung saat ini, bahwa untuk menjadi orang Lampung yang dihargai, dihormati, dan dijunjung tinggi di masyarakat, menurut ajaran luhur falsafah hidup mereka sesungguhnya haruslah terlebih dahulu memenuhi nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah “*Pi’il Pesenggiri*”, yakni; *juluk adok*, *nemui nyimah*, *nengah nyapur*, dan *Sakai Sembayan*. Pergeseran pemaknaan yang menempatkan “harga diri” sebagai sesuatu yang dominan ini dalam perkembangannya ditanggapi oleh masyarakat etnik lain sebagai sesuatu yang sensitif, sehingga memunculkan kekhawatiran dan kehati-hatian dalam berperilaku atau bertutur agar tidak menyinggung orang Lampung yang penuh “harga diri” untuk dihargai, dihormati dan dijunjung tinggi itu. Pergeseran pemaknaan ini jika tidak ada yang meluruskan maka makna yang tidak benar akan semakin berkembang, bahkan akan dianggap sebagai sesuatu yang benar.

Kondisi kesalahan dalam memaknai kearifan lokal itu menurut penulistiwa berperan dalam melestarikan konflik antar masyarakat etnik Bali dan Lampung. Dalam hal ini Alqadri (1999:37) mengemukakan faktor penyebab timbulnya konflik dapat berupa faktor budaya dan psikologis. Konflik yang dipicu oleh faktor ini berkaitan dengan perbedaan sistem nilai budaya (*cultural value system*) dan orientasi nilai budaya (*cultural value orientation*) yang menjelma secara konkret dalam bentuk mentalitas dan perilaku yang dapat memengaruhi berhasil atau tidaknya proses interaksi yang harmonis. Sikap mentalitas dan perilaku yang dilakukan oleh masyarakat etnik Lampung yang tidak sesuai dengan keharusan cenderung menimbulkan ketidakpuasan, kekecewaan, keresahan dan bahkan sentimen atau prasangka negatif.

Makna falsafah masyarakat etnik Lampung atau orang Lampung pada hakikatnya tidak pernah berubah, namun masyarakat pendukung kebudayaannya sendirilah yang berubah dalam memaknainya. Posisi guru sebagai agen pendidikan yang senantiasa menyampaikan kebenaran sangat dibutuhkan untuk menyebarkan pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai nilai-nilai sosial budaya maupun religiusitas dalam kearifan lokal masyarakat etnik Lampung melalui pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal di SMPN 1 Sidomulyo Lampung Selatan pada kegiatan intrakurikuler pada hakikatnya telah memenuhi dimensi pendidikan multikultural namun belum sepenuhnya berbasis kearifan lokal. Dimensi pendidikan multikultural tersebut meliputi dimensi kesetaraan konten (isi materi), dimensi kesetaraan proses penyusunan pengetahuan, dimensi kesetaraan paedagogi, dimensi pengurangan prasangka, dan dimensi pemberdayaan struktur sosial budaya sekolah. Selanjutnya dalam pemenuhan dimensi multikultural tersebut terkandung cara yang ditempuh oleh guru beserta hasil-hasilnya yang memiliki keterkaitan dengan sasaran atau tujuan pendidikan multikultural.

2. Pendidikan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal dalam Kegiatan Kokurikuler

Penyelenggaraan kegiatan kokurikuler akan seiring dengan pelaksanaan kegiatan intrakurikuler yang dilakukan oleh guru pada saat melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Kegiatan kokurikuler di sekolah adalah kegiatan yang diselenggarakan di luar jam pelajaran biasa (termasuk waktu libur), yang dilakukan di sekolah ataupun di luar sekolah dengan tujuan menunjang pelaksanaan program intrakurikuler agar siswa dapat lebih menghayati bahan yang telah dipelajarinya serta melatih siswa untuk melaksanakan tugas secara bertanggung jawab (Hamiseno, 1990:5). Pengertian tersebut memiliki makna bahwa kegiatan kokurikuler sangat dekat atau berkaitan langsung dengan kegiatan intrakurikuler.

Oleh karena itu jenis atau wujud kegiatan kokurikuler tidak hanya sebatas pemberian tugas tambahan mata pelajaran yang dikerjakan di sekolah maupun yang dikerjakan di rumah, melainkan dapat juga berupa kegiatan yang bersifat umum yang diprogramkan sekolah, seperti, MOS (masa orientasi siswa), *outbound*, *study tour*, bhakti sosial, proyek membuat alat-alat peraga dan kunjungan keilmuan ke pusat pengembangan ilmu (*fieldstrip*).

Kegiatan kokurikuler mata pelajaran IPS yang diberikan kepada peserta didik di SMPN 1 Sidomulyo Lampung Selatan merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan intrakurikuler pembelajaran mata pelajaran IPS kelas VII yang dilakukan pada hari-hari sesuai jadwal mata pelajaran tersebut berlangsung. Oleh karena itu tugas yang diberikan berhubungan dengan materi pokok/submateri yang disampaikan saat itu. Jenis kegiatan kokurikuler yang diberikan adalah penugasan mengisi soal latihan dari guru, mengisi soal-soal latihan pada buku lembar kegiatan siswa (LKS) mata pelajaran IPS kelas VII di rumah, membuat ikhtisar atau merangkum materi, membuat klipping, melakukan pengamatan lingkungan dan melaporkannya secara singkat.

Jika dicermati, bentuk pelaksanaan kegiatan kokurikuler yang berupa pemberian tugas secara kelompok tersebut bermanfaat untuk mengembangkan sikap gotong royong, saling menghargai, dan kerja sama, yang akhirnya dapat membentuk peserta didik menjadi masyarakat yang baik. Sedangkan pemberian tugas secara individu bermanfaat untuk mengembangkan kognitif, minat serta kemandirian peserta didik. Selain itu pemberian tugas kegiatan kokurikuler tersebut tampak sesuai dengan tujuan kegiatan kokurikuler, yakni 1) menunjang pelaksanaan program intrakurikuler, 2) agar siswa dapat lebih menghayati bahan yang telah dipelajarinya, 3) serta melatih siswa untuk melaksanakan tugas secara bertanggung jawab.

Suatu hal yang sangat penting dalam pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal adalah pembelajaran berlangsung menggunakan pendekatan konstruktivisme dan model pembelajaran berbasis PAKEM. Dengan demikian proses pembelajaran dalam kegiatan kokurikuler harus dapat menghubungkan dengan

kehidupan nyata sosio kultural peserta didik. Selain itu guru harus dapat memfasilitasi proses yang memungkinkan bagi peserta didik membangun pengetahuan baru melalui berbagai kegiatan yang didalamnya terjadi proses interaksi sosial baik dengan peserta didik lain maupun lingkungan sekitar. Hal tersebut sesuai dengan pembelajaran konstruktif yang menurut Siroj (2004) memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Menyediakan pengalaman belajar dengan mengkaitkan pengetahuan yang telah dimiliki siswa sedemikian rupa sehingga belajar melalui proses pembentukan pengetahuan.
- b. Menyediakan berbagai alternatif pengalaman belajar, tidak semua mengerjakan tugas yang sama, misalnya suatu masalah dapat diselesaikan dengan berbagai cara.
- c. Mengintegrasikan pembelajaran dengan situasi yang realistik dan relevan dengan melibatkan pengalaman konkret, misalnya untuk memahami suatu konsep melalui kenyataan kehidupan sehari-hari.
- d. Mengintegrasikan pembelajaran sehingga memungkinkan terjadinya transmisi sosial yaitu terjadinya interaksi dan kerja sama seseorang dengan orang lain atau dengan lingkungannya, misalnya interaksi dan kerjasama antara siswa, guru, dan siswa-siswa.
- e. Memanfaatkan berbagai media termasuk komunikasi lisan dan tertulis sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif.
- f. Melibatkan siswa secara emosional dan sosial sehingga menjadi menarik dan siswa mau belajar.

Berdasarkan kondisi tersebut dapat dinyatakan bahwa pendidikan multikultural pada kegiatan kokurikuler di SMPN 1 Sidomulyo Lampung Selatan dilakukan melalui pemenuhan berbagai dimensi pendidikan multikultural. Dalam dimensi pendidikan multikultural yang diajukan oleh Bank (2010:23) kegiatan kokurikuler tersebut termasuk dalam dimensi proses penyusunan pengetahuan (*the knowledge construction process*), dimensi mengurangi prasangka (*prejudice reduction*), dan dimensi pemberdayaan struktur sosial budaya sekolah (*empowering school culture and social structure*).

Pemenuhan pendidikan multikultural pada dimensi proses penyusunan pengetahuan (*the knowledge construction process*) yakni berhubungan dengan sejauh mana guru memberikan tugas kokurikuler kepada siswa sebagai upaya membantu siswa membangun pengetahuannya atas suatu budaya dengan memahami, menyelidiki, dan menentukan asumsi dan implikasi yang tersirat. Adapun pada dimensi mengurangi prasangka (*prejudice reduction*), berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengidentifikasi karakteristik sikap rasial siswa dan mengubahnya melalui pemberian tugas kokurikuler secara berkelompok yang melibatkan partisipasi dan interaksi siswa dari beragam perbedaan (etnik, agama, gender, dan kecerdasan).

Selanjutnya dimensi pemberdayaan budaya dan struktur sosial sekolah (*empowering school culture and social structure*), berkaitan dengan upaya guru untuk membangun budaya dan struktur sosial sekolah dengan memberdayakan interaksi siswa dari beragam kelompok ras, etnis dan budaya. Dimensi yang berwujud terbentuknya budaya kehidupan di sekolah secara harmonis dalam keberagaman dan perbedaan ini memiliki keterkaitan yang erat dengan dimensipengurangan prasangka.

Berdasarkan uraian tersebut, pelaksanaan pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal pada kegiatan kokurikuler di SMPN 1 Sidomulyo Lampung Selatan tampak telah memenuhi dimensi pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal. Dalam pemenuhan dimensi multikultural tersebut terkandung cara yang ditempuh oleh guru beserta hasil-hasilnya yang sangat terkait dengan pencapaian sasaran atau tujuan pendidikan multikultural, yakni menumbuhkembangkan kompetensi multikultural.

3. Pendidikan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal dalam Kegiatan Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler. Dalam pelaksanaannya kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan, yang lazimnya disebut pembina,

dan masing-masing pembina bertanggung jawab kepada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja-sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan (Permendikbud RI No. 62 tahun 2014).

Memperhatikan tujuan yang dimaksudkan dalam Permendikbud tersebut maka sekolah berkewajiban menyediakan berbagai kegiatan kurikuler yang menampung perbedaan yang dimiliki peserta didik baik dalam hal potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, maupun kemandirian. Tujuan diadakannya kegiatan ekstrakurikuler tersebut menunjukkan adanya kesamaan dengan tujuan pendidikan multikultural. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan sekolah untuk menyediakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler sangat bergantung kepada kemampuan sumber keuangan dan pengelolaannya, ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk mengelola dan membina, dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukungnya. Oleh karena itu sepanjang sekolah tersebut memiliki kemampuan dan daya dukung yang baik berupa ketersediaan jumlah peserta didik, pelatih atau pembina, dan lingkungan atau lahan, jumlah kegiatan ekstrakurikuler akan semakin banyak (lengkap) dan semakin baik.

Kelengkapan kegiatan ekstrakurikuler pada suatu sekolah lazimnya sangat identik dengan status akreditasi sekolah tersebut karena aspek kelengkapan kegiatan ekstrakurikuler dan sarana-prasarana pendukungnya turut menjadi salah satu indikator dalam penilaian akreditasi sekolah. Dalam hal ini akreditasi SMPN 1 Sidomulyo berada pada level A tidak terlepas dari kelengkapan kegiatan ekstrakurikuler yang dimilikinya. Keberadaan kegiatan ekstrakurikuler yang beragam dan lengkap sarannya serta prosesnya berjalan menjadi penting karena menunjukkan kemampuan sekolah tersebut menampung aspirasi, bakat, potensi peserta didiknya yang juga beragam.

Dalam kajian pendidikan multikultural kehadiran kegiatan ekstra-kurikuler yang beragam sangat membantu bagi terbentuknya pengetahuan, sikap dan perilaku peserta didik yang menghargai

perbedaan dalam pergaulan, sikap menerima perbedaan berbagai kepentingan dan tujuan, sikap bertanggung jawab, disiplin, dan kemampuan melepaskan sifat egois ketika berkompetisi dengan sikap siap kalah dan siap menang. Sikap-sikap semacam itu merupakan target pembentukan karakter yang menjadi sasaran dalam pendidikan multikultural.

Fenomena lain terkait begitu beragamnya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ini adalah sebagai salah satu alternatif cara sekolah dalam mengatasi kekurangan jam mengajar guru yang belum memenuhi jumlah wajib 24 jam yang menjadi syarat guru memperoleh tunjangan profesi (sertifikasi profesional guru). Dampak yang dapat terjadi dalam fenomena seperti itu adalah ketidaktepatan kemampuan guru pembina dengan bidang kegiatan yang menjadi tanggung jawab dirinya. Hal ini tentu akan merugikan peserta didik, terutama peserta didik yang memiliki orientasi khusus ingin berprestasi dari cabang atau unit kegiatan ekstrakurikuler yang dipilihnya.

Kenyataan menunjukkan bahwa seorang guru yang mengajar di kelas sering mendapatkan peserta didik memiliki pemahaman yang berbeda tentang pengetahuan yang diperoleh dan dipelajarinya, padahal semua peserta didik itu belajar dalam lingkungan sekolah yang sama, guru yang sama, dan bahkan buku teks yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan tidak begitu saja di transfer dari guru ke siswa dalam bentuk tertentu, melainkan siswa membentuk sendiri pengetahuan itu dalam pikirannya masing-masing melalui pengalaman belajar sehingga pengetahuan tentang sesuatu dipahami secara berbeda-beda oleh siswa. Oleh sebab itu pengalaman belajar merupakan hal yang sangat penting, dan peranan pendidik di dalam menentukan pengalaman belajar itu salah satunya melalui proses pembelajaran dalam kegiatan ekstrakurikuler. (Suparno, 1997:65) menyebutkan tugas guru berkaitan dengan pendekatan konstruktif adalah menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan peserta didik ikut bertanggung jawab dalam membuat design, proses dan penelitian inkuiri untuk membangun pengetahuannya.

Kegiatan ekstrakurikuler di SMPN1 Sidomulyo relatif lengkap dan banyak diminati peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah tersebut adalah OSIS, Pramuka, klub olah raga basket, sepak bola dan futsal, bulutangkis, tenis meja, renang, catur, dan Volly, seni beladiri Karate dan Silat, seni tari, seni suara, band sekolah, marching band, dan kerohanian. Beberapa unit kegiatan ekstrakurikuler seperti, renang, tilawah quran, bola volli bahkan telah memiliki prestasi yang baik. Adapun aspek kearifan lokal yang menjadi basis kegiatannya terlihat pada beberapa jenis kegiatan, yakni pada kegiatan Pembinaan Tilawah Quran yang berbasis agama Islam, kegiatan Pembinaan Kerohanian yang berbasis kearifan lokal agama Islam, Kristen, dan Hindu, kegiatan Pembinaan Seni Beladiri Silat, dan Pembinaan Seni Tari.

Hal menarik dalam kegiatan ekstrakurikuler di SMPN 1 Sidomulyo adalah, unit kegiatan berasal dari inisiatif peserta didik, bukan dari guru ataupun disediakan oleh sekolah. Hal ini mengindikasikan telah tertanamnya sikap demoratis dan kedekatan emosional antar peserta didik dan guru sehingga peserta didik memiliki jalinan komunikasi yang terbuka sehingga menumbuhkan keberanian berinisiatif, mengeluarkan ide dan kecerdasannya sebagaimana yang disyaratkan dalam pendidikan multikultural.

Keberagaman pilihan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ini sangat dimungkinkan mengingat sekolah ini sudah lama berdiri sehingga dapat dianggap sudah mapan, yakni sejak tahun 1980. Selain itu dengan memiliki 875 peserta didik maka akan menjadi kebutuhan yang realistis untuk menyediakan beragam kegiatan kestrakurikuler yang mampu menampung dan mengembangkan beragam potensi, minat dan bakat para peserta didiknya. Berdasarkan jenis kegiatan yang dikembangkan, dapat dikatakan bahwa sekolah ini kegiatan ekstrakurikulernya telah memenuhi dimensi pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal.

4. Pendidikan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal dalam Kurikulum Tersembunyi

Hasil pengamatan mengungkapkan bahwa di SMPN 1 Sidomulyo Lampung Selatan terdapat aktivitas kegiatan pendidikan

yang bersumber dari kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum activity*) dan menjadi bagian dari sistem pendidikan di sekolah yang menunjang kegiatan kurikuler formal. Kegiatan tersebut seperti upacara hari senin pagi, penggunaan seragam batik bermotif khas Lampung, pembiasaan budaya senyum, salam, sapa, penggunaan siger pada gerbang sekolah, penggunaan hiasan bermotif tapis pada dinding sekolah. Aktivitas tersebut dapat menjadi media untuk melaksanakan pendidikan multi-kultural berbasis kearifan lokal di samping aktivitas kegiatan kurikuler formal. Hal ini sesuai dengan pendapat Gollnick & Chinn (2006:377) yang menyebutkan bahwa selain kurikulum formal, di sekolah juga terdapat kurikulum tersembunyi yang terdiri dari norma-norma tak tertulis, nilai-nilai, dan hubungan sosial sekolah dan suasana kelas yang ada pada kepada peserta didik. Kurikulum tersembunyi mencakup norma dan nilai yang mendukung kurikulum formal yang mencerminkan keragaman dan perbedaan.

Kurikulum tersembunyi sering juga disebut dengan *Other Curriculum*, yaitu kurikulum yang merupakan hasil dari “hubungan-hubungan yang berkuasa” di dalam kelas, baik dalam bentuk unsur supra struktur, kesadaran kelas, patriarki, heteroseksualitas, dan lain sebagainya yang nantinya akan membentuk sebuah habitus. Kurikulum tersembunyi ini dalam praktiknya dapat berupa pola kepemimpinan kelas, kewirausahaan, sopan santun, dan kualitas kelas (Margolis dkk, 2001:3).

Lebih lanjut, Drebeen (1967) dalam Kentli (2009:85) menyebutkan bahwa “*the hidden curriculum makes the pupils to form transient social relationships, submerge much of their personal identity, and accept the legitimacy of categorical treatment*”. Kemudian Martin (1976) dalam Kentli (2009:85) mengatakan bahwa “*hidden curriculum can be found in the social structure of the classroom, the teacher s exercise authority, the rules governing the relationship between teacher and student*”.

Kurikulum tersembunyi dapat berupa struktur organisasi kelas dan sekolah, serta hubungan sosial antarpeserta didik, dengan pendidik, dan tenaga kependidikan, dengan lingkungan, dengan aturan dan segala sesuatu yang adadi sekolah.

Kurikulum tersembunyi terlihat bukan sebagai tujuan yang secara khusus dicantumkan dalam tujuan pembelajaran di sekolah, tetapi hasil sampingan dari proses sosial yang terjadi.

Dengan demikian kurikulum tersembunyi memiliki dampak yang besar pada hubungan dan pembentukan iklim atau budaya sekolah yang menjiwai peserta didik, guru, bahkan pihak di luar sekolah. Banks (2010:23-24) menguraikan kurikulum tersembunyi sekolah seperti nilai dan norma seharusnya diperhatikan. Aspek-aspek dari lingkungan sekolah harus diubah menjadi budaya sekolah yang dapat mengajarkan sikap positif terhadap kelompok-kelompok budaya yang beragam dan membantu peserta didik dari kelompok-kelompok tersebut untuk mencapai keberhasilan di bidang akademis.

Bentuk pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal dalam kegiatan kurikulum tersembunyi di SMPN 1 Sidomulyo Lampung Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Menggunakan batik bermotif khas Lampung setiap hari Rabu dan Kamis. Kebijakan ini dapat dimaknai sebagai upaya menumbuhkan kebanggaan identitas budaya, sekaligus upaya melestarikan dan mewariskan kearifan lokal Lampung.
- b. Menggunakan salam nasional, salam religius Islam “Asalumuallaikum warohmatullahi wabarokatuh”, salam Hindu “Om Swasti Asti Astu”, dan salam Kristen “Salam Sejahtera”, dan salam khas daerah Lampung “Tabik Pun” diikuti jawaban “Ya Pun” bagi yang mendengarnya, dalam mengawali pembicaraan pada kegiatan atau acara-acara formal. Hal ini dapat menjadikan komunikasi formal menjadi lebih dekat dan kekeluargaan karena di dalamnya terdapat sikap mengakui, menghargai dan menghormati perbedaan (toleransi).
- c. Melakukan upacara bendera setiap hari Senin dan hari besar nasional serta mengikuti kegiatan peringatan hari besar nasional. Upaya ini lebih mengarahkan peserta didik untuk memiliki kedisiplinan, tanggung jawab, sikap bangga dan cinta tanah air (nasionalisme) serta menumbuhkan kesadaran bahwa bangsa ini dapat memperoleh kemerdekaan dan membangun kebesaran bangsa diperoleh melalui kerukunan dan persatuan

- dari segala macam perbedaan.
- d. Menerima peserta didik baru dari berbagai golongan etnik dan agama. Cara perekrutan siswa ini menunjukkan sekolah tidak diskriminatif, sehingga warga sekolah juga tidak homogen dari etnik atau agama tertentu. Upaya ini mencerminkan sekolah menerapkan kebhinekaan.
 - e. Tidak menyelenggarakan program kelas unggul maupun kelas khusus.
 - f. Kebijakan tersebut mengindikasikan pihak sekolah telah mampu menganalisis karakteristik sosial budaya masyarakat setempat. Sekolah penyelenggara program kelas unggul atau kelas khusus lazimnya cenderung akan lebih mahal biaya pendidikannya dan diskriminatif karena memberikan kesempatan, perhatian, perlakuan, serta pemenuhan dan pemanfaatan fasilitas yang berbeda dibandingkan terhadap siswa kelas umum atau kelas reguler biasa. Beberapa kasus yang terjadi di berbagai daerah, sekolah yang menerapkan program kelas unggul atau kelas khusus justru berbenturan dengan masyarakat sekitar sekolah karena sekolah dianggap tidak aspiratif tidak menampung anak-anak masyarakat setempat yang kurang mampu memenuhi kriteria yang ditetapkan di sekolah tersebut.
 - g. Mengadakan latihan berkorban melalui momen Hari Raya Idul Adha dengan mengumpulkan dana gotong royong untuk membeli hewan kurban atas nama seluruh siswa dan dipotong di sekolah. Daging kurban selanjutnya dibagikan kepada seluruh siswa, dan sebagian dimasak untuk makan bersama. Melalui kegiatan latihan berkorban, aspek pendidikan multikultural yang muncul adalah sikap kebersamaan dan kepedulian (empati) berkorban membantu kepada sesama yang lemah dan kekurangan.
 - h. Mengucapkan salam dan menjabat tangan ketika memasuki ruangan atau ketika berpapasan dengan guru. Menyapa dengan salam dan dilanjutkan dengan menjabat tangan merupakan bentuk komunikasi khas masyarakat Indonesia dari berbagai etnik dan memiliki makna yang serupa, yakni keterbukaan,

kedekatan dan kearaban sebagaimana layaknya dalam hubungan persaudaraan atau keluarga.

- i. Menjadwalkan pulang sekolah lebih cepat pada setiap hari Jumat. Penjadwalan seperti itu dimaksudkan untuk memberikan waktu yang cukup bagi siswa, guru dan staf TU yang muslim laki-laki untuk mempersiapkan diri melaksanakan sholat Jumat.
- j. Menggunakan pakaian koko bagi siswa putera musim saat Ramadhan dan siswi muslim bebas menggunakan seragam berjilbab dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari.
- k. Mengadakan pengumpulan dana kepedulian sosial untuk disumbangkan kepada siswa atau guru yang mendapat musibah. Sikap kepedulian sosial terhadap sesama tumbuh karena adanya rasa empati atau kemampuan merasakan yang dialami orang lain.
- l. Mengadakan senam massal setiap hari Sabtu pagi
- m. memasang hiasan berbentuk Siger pada bagian atas gerbang sekolah. *Siger* merupakan mahkota pengantin wanita sekaligus simbol kejayaan atau kebesaran dan icon daerah Lampung.
- n. Menyajikan tarian adat Lampung “Siger Penguten” dan “Melinting” dalam menyambut tamu penting pada acara khusus tertentu. Keberadaan tarian khas adat Lampung, penggunaan hiasan motif kain *Tapis* Lampung dan hiasan berbentuk *Siger* di sekolah merupakan bagian dari upaya pelestarian dan pewarisan budaya lokal kepada siswa dan masyarakat. Tumbuhnya kebanggaan terhadap kearifan lokal akan seiring dengan tumbuhnya kesadaran dan sikap penerimaan secara adaptif terhadap keberagaman serta menghormati kebudayaan etnik lain.
- o. Mengadakan kerja bakti (gotong royong) massal kebersihan sekolah dan di masyarakat (bersama pihak kelurahan dan kecamatan) secara periodik. Gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hampir setiap daerah dan etnik memiliki budaya gotong royong ini. Budaya gotong royong penting dilestarikan dan dibelajarkan di kalangan siswa yang secara kebetulan hidup di era teknologi dan berhasil membawa

mereka dari berkehidupan sosial menjadi individual bahkan cenderung lebih menikmati “dunia” kesendiriannya itu. Dengan gotong royong unsur kebersamaan, kepedulian, tanggung jawab individual dan sosial serta kemampuan membaur dan menyesuaikan (adaptasi) dan toleransi terhadap keberagaman dapat ditumbuhkan.

- p. Memiliki aturan dan tata tertib sekolah maupun tata tertib kelas untuk menumbuhkan sikap disiplin dan bertanggung jawab.
- q. Bekerja sama dengan instansi lain (kejaksaan tinggi Kalianda Lampung Selatan) untuk memberikan sosialisasi penyuluhan hukum melalui program Jaksa Masuk Sekolah. Kegiatan ini dalam ranah pendidikan multikultural turut berperan menyampaikan konsep-konsep kejujuran, keadilan dan demokrasi kepada siswa dari sudut pandang hukum.

Bentuk kurikulum tersembunyi yang memenuhi dimensi pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal di SMPN 1 Sidomulyo Lampung Selatan tersebut jika dicermati memiliki keterkaitan atau kedekatan dengan visi sekolah tersebut, yakni “Unggul dalam Imtaq, Iptek, Berprestasi, Berkarakter Kebangsaan, Berbudi Pekerti Luhur dan Berwawasan Lingkungan”. Dengan kata lain kurikulum tersembunyi yang terdapat di SMPN 1 Sidomulyo Lampung Selatan merupakan bentuk komitmen sekolah tersebut dalam mewujudkan visi sekolah.

Untuk pencapaian keunggulan dalam Imtaq, meskipun SMPN 1 Sidomulyo merupakan sekolah umum atau bukan sekolah agama, sekolah tersebut pada dasarnya seharusnya dapat memanfaatkan keunggulan lokal yang berasal dari nilai-nilai keagamaan yang berkembang di lingkungannya.

Dengan demikian sekolah dapat menghidupkan budaya lokal lainnya yang bernuansa religius, seperti menghidupkan budaya membaca Alquran bagi siswa muslim melalui kegiatan tadarus setiap pagi sebelum memulai kegiatan pembelajaran dan siswa yang nonmuslim juga diberi kesempatan yang sama untuk membaca kitabnya pada saat siswa muslim sedang tadarus membaca Alquran.

D. Pendidikan Multikultural: Pendukung dan Penghambat

Pembahasan faktor-faktor yang memengaruhi pendidikan multi-kultural berbasis kearifan lokal di SMPN 1 Sidomulyo Lampung Selatan ini meliputi faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung berisi faktor-faktor yang berkontribusi secara positif dan faktor penghambat berisi faktor-faktor yang berkontribusi secara negatif terhadap pelaksanaan pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal di SMPN 1 Sidomulyo Lampung Selatan.

1. Faktor Pendukung Pelaksanaan Pendidikan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal di SMPN 1 Sidomulyo, Lampung Selatan

Banyak faktor yang turut memengaruhi pelaksanaan pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal di SMPN 1 Sidomulyo, Lampung Selatan. Faktor-faktor pendukung tersebut adalah:

a. Ke-Bhinneka Tunggal Ika-an

SMP N 1 Sidomulyo memiliki keragaman baik agama, etnik maupun gender pada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta

didiknya (*heterogen*). Meskipun etnik dan agamanya berbeda namun dalam komunikasi dan pergaulan tidak menunjukkan adanya pengelompokan-pengelompokan yang mengindikasikan terjadi hal-hal yang bersifat diskriminatif, mendiskreditkan atau bahkan memarginalkan pihak-pihak tertentu. Keberagaman dan perbedaan tidak menjadi penghalang bagi masing-masing untuk menjalankan tugas dan fungsi sesuai peran dan tujuannya masing-masing. Peserta didik tidak mengalami hambatan maupun tekanan dalam mengikuti aktivitas kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler.

Hubungan pendidik dengan pendidik, pendidik dengan tenaga kependidikan maupun antar sesama tenaga kependidikan bahkan memberi kesan sangat kekeluargaan. Hal yang demikian menunjukkan bahwa dengan segala perbedaan yang ada terdapat

kekuatan yang mampu mendorong dan menjadikan semua pihak berlaku adaptif dan saling menjaga. Kekuatan yang dimaksud adalah ke-Bhineka Tunggal Ika-an yang secara konsep pada umumnya telah dikenal dan dipahami oleh setiap warga negara Indonesia sejak mengenyam pendidikan formal.

b. Kearifan lokal

Dari sisi etnis dan budaya daerah sejatinya menunjuk kepada karakteristik masing-masing keragaman bangsa Indonesia. Pada sisi yang lain, karakteristik itu mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi sumber daya kearifan lokal, yang pada masa-masa lampau merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam strategi memenuhi kebutuhan hidup, mempertahankan diri dan merajut kesejahteraan kehidupan mereka. Artinya masing-masing etnis itu memiliki kearifan lokal sendiri. Berbagai nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal, termasuk kearifan lokal etnik Lampung dan Bali dalam khasanah pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal dapat dilestarikan dan dikembangkan melalui pendidikan formal di sekolah untuk berbagai manfaat, baik untuk manumbuhkan sikap dan kompetensi multikultural, pelestarian dan pewarisan budaya lokal, maupun lebih jauh untuk solusi mencegah dan menanggulangi konflik antaretnik.

SMPN 1 Sidomulyo berada pada daerah yang masyarakatnya memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang kuat atau mengakar, yakni kearifan lokal masyarakat etnik Lampung dengan *Pi'il Pesenggirinya*, dan kearifan lokal masyarakat etnik Bali dengan nilai-nilai ke-Bali-an dan Hindu-nya. Keberadaan kearifan lokal masing-masing etnik tersebut meskipun tidak dipahami benar maknanya oleh peserta didik maupun pendidik menurut arti yang sesungguhnya, namun pada hakikatnya telah terbangun pengakuan akan keberadaan (eksistensi) kearifan lokal masing-masing etnik tersebut. Oleh karena itu muncul sikap untuk menata dan menjaga diri agar tidak menimbulkan hal-hal yang akan berbenturan dengan kearifan lokal tersebut sekaligus dengan etnik pemiliknya.

Selain itu, jika dicermati realitas etnik mayoritas di SMPN 1 Sidomulyo adalah etnik Jawa, baik pada pendidik, tenaga

kependidikan, maupun peserta didik, maka dapat dimungkinkan bahwa kearifan lokal etnik Jawa pun turut mewarnai suasana maupun sikap perilaku para pelaku unsur pendidikan di sekolah tersebut. Hal ini sebagaimana pengamatan penulis dalam kunjungan observasi, bahwa di sela-sela penggunaan bahasa Indonesia dalam komunikasi antarpendidik dan antartenaga kependidikan, penggunaan bahasa Jawa begitu dominan dibandingkan penggunaan bahasa daerah lain. Hal semacam itu tidak hanya akan turut membangun suasana Jawa yang lebih terasa daripada suasana Sumatera tetapi juga turut berperan membangun suasana yang dilandasi falsafah masyarakat etnik Jawa, seperti “mengalah untuk menang”, “jangan atau tidak bertindak macam-macam yang aneh-aneh dan membahayakan” lazimnya membuat mereka dianggap lebih mampu menempatkan diri di ruang dan waktu kapanpun.

Kemunculan semangat multikulturalisme semacam ini menurut Garcia (1982:37-42) dilatarbelakangi oleh adanya “*Mosaic Analogy*”, yakni kondisi masyarakat yang terdiri atas individu-individu yang beragam latar belakang agama, etnik, bahasa, dan budaya, memiliki hak untuk mengekspresikan identitas budayanya secara demokratis, masing-masing etnik berhak menunjukkan identitas budayanya, bahkan boleh mengembangkannya. Berkaitan dengan itu kearifan lokal yang terdapat di SMPN 1 Sidomulyo adalah sebagai berikut:

- 1) Menggunakan batik bermotif khas Lampung setiap hari Rabu dan Kamis.

Kebijakan ini dapat dimaknai sebagai upaya menumbuhkan kebanggaan identitas budaya, sekaligus upaya melestarikan dan mewariskan kearifan lokal Lampung. Batik merupakan warisan kearifan lokal bangsa Indonesia yang telah menjadi kebudayaan nasional dan diakui dunia Internasional. Oleh karena itu kepatuhan atau ketaatan peserta didik maupun guru dan TU kepada aturan berseragam itu, terutama yang berlatar etnik Lampung yang sejatinya orang Sumatera lebih dekat dengan budaya Seni Sulam dan Tenun Tapis daripada Batik, dapat dimaknai juga sebagai pencerminan kemampuan meng-

hormati dan mengikuti kepada yang patut dihormati dan diikuti, yakni aturan pemerintah, serta kemampuan membaur atau beradaptasi dengan kearifan lokal lain yang telah menjadi kebudayaan nasional.

Dalam kearifan lokal Lampung hal tersebut termasuk perwujudan unsur *Juluk-adok* dalam *Piil Pesenggiri*. *Juluk adok* merupakan asas identitas dan sebagai sumber motivasi bagi anggota masyarakat etnik Lampung untuk dapat menempatkan hak dan kewajiban kata dan perbuatannya dalam setiap perilaku dan karyanya sesuai dengan perannya. Meskipun *Juluk Adok* itu terkait dengan nama gelar adat yang melekat pada diri orang Lampung dan kenyataannya tidak semua siswa yang orang Lampung sekalipun memiliki *juluk adok*, namun nama apapun yang melekat pada dirinya meskipun tidak bergelar adat tetap mencerminkan sebagai pribadi yang memiliki silsilah keturunan orang Lampung yang harus dijaga nama baiknya dari perilaku maupun perkataan tercela. Selain itu, dengan berseragam batik bermotif khas Lampung, siswa juga memiliki kesamaan dengan semuanya sehingga dapat berbaur meskipun bukan etnik Lampung. Kemampuan membaur ini dalam kearifan lokal Lampung termuat dalam unsur “*Nengah Nyappur*” pada falsafah *Piil Pesenggiri*. *Nengah Nyappur* berarti sikap suka bergaul dan bersahabat dengan siapa saja, tidak membedakan suku, agama, tingkatan, asal usul dan golongan. Sikap suka bergaul dan bersahabat menumbuhkan semangat suka bekerjasama dan tenggang rasa (toleransi) antar sesamanya.

Adapun dalam kearifan lokal Bali lebih dikenal sebagai perwujudan falsafah “*Metilesang raga*” yang artinya, kemampuan menempatkan diri sesuai dengan tempat, waktu, dan keadaan. Hal tersebut sama halnya dengan perwujudan peribahasa “di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung” dalam kehidupan sehari-hari, yang dalam bahasa Lampung berbunyi “*dikedo biduk disan biduk tenimbo*” atau “di mana perahu ditumpangi di situ perahu ditimba” (dijaga agar tidak tenggelam dengan membuang air yang masuk ke dalam perahu).

Pada masyarakat Bali yang menganut Hindu, juga dikenal falsafah “*Tri Hita Karana*”, yakni harmonisasi hubungan manusia dengan tiga unsur utama dalam kehidupan manusia, yang salah satu unsurnya adalah “*Sutata Pawongan*” yang mengarahkan mereka untuk mampu menciptakan hubungan yang harmonis dengan sesama manusia sebagai penghormatan terhadap penciptanya. Dalam Islam hal tersebut dapat dikatakan identik dengan “*Hablumminannas*” yang berarti hubungan yang baik antar sesama, baik yang sama aqidah maupun yang berbeda.

Dalam hal kepatuhan kepada aturan pada masyarakat Bali menurut Made Gambar (pada wawancara 25 Juli 2015) mengacu pada falsafah *Catur Sanggha Guru* atau empat pokok yang menjadi dasar atau yang dijadikan sebagai guru, yakni yang patut dipercaya dan diikuti sebagai sumber pedoman, dihormati, dipatuhi, dan dijadikan bakti, yakni; a) *Guru rupaka*, yakni orang tua (ayah-ibu) yang melahirkan, merawat, mendidik dan membesarkan kita, b) Guru agama maupun guru di tempat-tempat pendidikan dan orang-orang berilmu cerdas pandai lainnya, c) *Guru wisesa*, yakni aparat pemerintahan yang mengatur, membina dan menaungi warga dalam urusan hukum kenegaraan dari aparat tingkat bawah (ketua RT) hingga presiden, dan d) Guru swadiaya, yakni Tuhan yang Esa sebagai ungkapan rasa bakti dan syukur kepada Sang Pencipta.

2) Pengucapan salam religius dan khas daerah Lampung

Pengucapan salam identik dengan proses silaturahmi atau komuni- kasi. Pengucapan salam yang digunakan selain salam nasional seperti selamat pagi dan sebagainya adalah salam religius Islam “*Asalumuallaikum warohmatullahi-wabarokatuh*”, salam Hindu “*Om Swasti Asti Astu*”, dan salam Kristen “*Salam Sejahtera*”, dan salam khas daerah Lampung “*Tabik Pun*” diikuti jawaban “*Ya Pun*” bagi yang mendengarnya. Dengan salam seperti itu dapat menjadikan komunikasi formal menjadi lebih akrab dan penuh kekeluargaan karena di dalamnya terdapat sikap mengakui, menghargai dan menghormati perbedaan

(toleransi) sekaligus mendekati pendengar sebagai bagian dari diri orang yang memberi salam.

Meskipun lazimnya, jawaban salam khas Lampung banyak yang tidak memahami maknanya, namun lebih banyak atau lebih ramai dibandingkan ketika menjawab salam nasional maupun salam religi agama Islam, Kristen maupun Hindu. Hal ini menunjukkan salam khas daerah lebih dapat diterima karena lebih netral penggunaannya daripada salam religi yang keberadaannya sangat lekat sebagai pelaksanaan syariat (ibadah) suatu agama.

Dalam kearifan lokal Lampung hal tersebut termasuk perwujudan unsur *Nemui Nyimah* dalam falsafah *Piil Pesengiri*. *Nemui-nyimah* merupakan kewajiban bagi suatu keluarga dari masyarakat Lampung umumnya untuk tetap menjaga silaturahmi, dimana ikatan keluarga secara genealogis selalu terpelihara dengan prinsip keterbukaan, kepantasan dan kewajaran, dilandasi rasa keikhlasan untuk menciptakan kerukunan hidup berkeluarga dan bermasyarakat.

Sedangkan dalam kearifan lokal Bali lebih dikenal sebagai perwujudan falsafah "*Manyamabraya*". Dalam *Manyama-braya*, meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, selalu merasa bersaudara. Bagi orang Bali semua orang adalah „nyama“ (saudara dekat). Se jauh-jauhnya mereka berada di luar lingkungannya, mereka akan menganggap orang lain itu sebagai „braya“ (saudara jauh). Sehingga secara keseluruhan bingkai hubungan antarindividu dan masyarakat itu dalam konsep masyarakat etnik Bali adalah selalu persaudaraan.

3) Mengadakan latihan berkorban pada Hari Raya Idul Adha

Latihan berkorban memanfaatkan momen hari raya Idul Adha dengan mengumpulkan dana gotong royong untuk membeli hewan kurban atas nama seluruh siswa dan dipotong di sekolah. Daging kurban selanjutnya dibagikan kepada seluruh siswa baik muslim maupun non-muslim, dan sebagian lainnya dimasak untuk makan bersama, termasuk guru dan staf TU. Melalui kegiatan latihan berkorban, aspek pendidikan multi-

kultural yang muncul adalah sikap kebersamaan dan kepedulian (empati) rela berkorban membantu sesama yang lemah.

Dalam kearifan lokal Lampung hal tersebut termasuk perwujudan unsur *Nengah Nyappur*, yakni menjalankan kehidupan dengan menempatkan diri pada posisi yang wajar dalam berinteraksi, mampu bergaul, berpartisipasi dalam segala kegiatan, dan unsur *Sakai Sembaiyan* yang bermakna tolong menolong dan gotong royong, kebersamaan atau guyub. *Sakai-sambayan* pada hakikatnya adalah menunjukkan rasa partisipasi serta solidaritas yang tinggi terhadap berbagai kegiatan pribadi dan sosial kemasyarakatan pada umumnya.

Sedangkan dalam kearifan lokal Bali lebih dikenal sebagai perwujudan *Tat Twam Asi* yang berarti “Dia adalah engkau dan engkau adalah dia juga”. Maksud yang terkandung dalam ajaran *Tat Twam Asi* adalah saya adalah kamu, dan semua makhluk adalah sama” sehingga bilakita menolong orang lain berarti juga menolong diri kita sendiri. Di dalam filsafat Hindu dijelaskan bahwa *Tat Twam Asi* adalah ajaran kesusilaan yang tanpa batas, yang identik dengan “perikemanusiaan” dalam Pancasila. Selain itu juga tergolong sebagai pengamalan falsafah “*Sagilik saguluk salunglung sabayan-taka, paras paros sarpanaya*”, yakni masyarakat etnik Bali senantiasa bersatu padu dalam suka-duka dan menghadapi bahaya, berembug dan bermusyawahar (menghargai pendapat orang lain), saling mengingatkan, saling menyayangi, dan saling menolong di setiap kesempatan. Dengan merasa senasib dan sepenang-gungan, saling bahu-membahu dalam memecahkan masalah dan tantangan hidup sehari-hari diharapkan keharmonisan membangun hubungan antarsesama tercapai dan memperoleh kebahagiaan hidup.

4) Mengucapkan salam dan menjabat tangan

Menyapa dengan salam dan dilanjutkan dengan menjabat tangan merupa-kan bentuk komunikasi khas masyarakat Indonesia dari berbagai etnik dan memiliki makna yang serupa, yakni kedekatan dan kearaban sebagaimana layaknya dalam hubungan persaudaraan atau keluarga. Mengucapkan salam

dan menjabat tangan juga bagian dari etika dalam budaya etnik di Indonesia yang menunjukkan adanya sikap keterbukaan, menghargai, menghormati dan sekaligus beretika pada diri pelakunya.

Perilaku menyapa dengan salam dan menjabat tangan mampu menerobos batasan perbedaan etnik ras dan agama. Oleh karena itu pada dasarnya tindakan menyapa dengan salam dan menjabat tangan dalam komunikasi antar individu dengan latar etnik dan agama berbeda terdapat unsur saling menyadari posisi masing-masing untuk rela, percaya, dan keberanian beradaptasi dalam komunikasi yang dekat, akrab, terbuka selayaknya ketika dirinya berkomunikasi dengan saudara atau keluarga.

Bagi masyarakat Lampung hal itu termuat dalam *Nemui-nyimah*, yakni kewajiban bagi suatu keluarga dari masyarakat Lampung umumnya untuk tetap menjaga silaturahmi, dimana ikatan keluarga secara genealogis selalu terpelihara dengan prinsip keterbukaan, kepatutan dan kewajaran. Hal seperti itu termuat juga dalam peribahasa masyarakat Lampung “*Situho malah cawo, sai sanak malah kiwak*” atau yang tua mengalah perkataan, yang muda mengalah tenaga, yang ber-makna saling menyadari posisi masing-masing.

Sedangkan dalam kearifan lokal Bali lebih dikenal sebagai perwujudan falsafah “*Manyamabraya*”. Dalam *manyamabraya*, meskipun berasal dari latar-belakang yang berbeda-beda, selalu merasa bersaudara. Bagi orang Bali semua orang adalah „nyama” (saudara dekat). Sejauh- jauhnya mereka berada di luar lingkungan-nya, mereka akan menganggap orang lain itu sebagai „braya” (saudara jauh) sehingga secara keseluruhan bingkai hubungan antarindividu dan masyarakat itu dalam konsep masyarakat etnik Bali adalah selalu persaudaraan yang patut dihormati.

Lebih dari itu, kedudukan guru pada masyarakat etnik Bali sangat terhormat. Guru di sekolah termasuk dalam *Catur Sanggha Guru* atau empat pokok yang menjadi dasar atau yang dijadikan sebagai guru, yakni yang patut dipercaya sebagai

sumber pedoman, dihormati, dipatuhi, dan dijadikan bakti. Keempat guru itu adalah: a) Guru rupaka, yakni orang tua (ayah-ibu) yang melahirkan, merawat, mendidik dan membesarkan kita; b) Guru agama maupun guru di tempat-tempat pendidikan dan orang-orang berilmu cerdas pandai lainnya, c) Guru wisesa, yakni aparat pemerintahan yang mengatur, membina dan menaungi warga dalam urusan hukum kenegaraan dari aparat tingkat bawah (ketua RT) hingga presiden, dan d) Guru swadiaya, yakni Tuhan yang Esa sebagai ungkapan rasa bakti dan syukur kepada Sang Pencipta.

- 5) Menjadwalkan pulang sekolah lebih cepat pada setiap hari Jumat.

Kearifan lokal dapat bersumber dari nilai-nilai religi atau keagamaan. Bagi umat muslim hari Jumat merupakan waktu yang memiliki kekhususan, karena pada hari Jumat setiap laki-laki muslim diwajibkan sholat Jumat secara berjamaah di masjid. Bahkan begitu khususnya sholat tersebut, lelaki muslim yang akan melaksanakan sholat Jumat disunnahkan untuk mempersiapkan diri dengan membersihkan diri atau mandi terlebih dahulu, memotong kuku, dan memakai wangi-wangian. Dengan kekhususan tersebut, maka dibutuhkan waktu untuk persiapan. Oleh karena itu kebijakan di SMPN 1 Sidomulyo yang mayoritas muslim serta berada di tengah-tengah masyarakat muslim menyesuaikan jam mengajar guru dan waktu kepulangan siswanya menjadi lebih cepat dibandingkan dengan hari lain sangat tepat. Secara tidak langsung upaya tersebut berdampak bagi siswa baik yang muslim maupun nonmuslim untuk ikut menghormati hari Jumat, serta menjaga harmonisasi sekolah dengan orang tua siswa dan masyarakat yang muslim.

Pada masyarakat nonmuslim etnik Bali, sikap menjaga harmonisasi itu terdapat dalam falsafah "*Matilesang raga*" yang berarti dapat menempatkan diri, sesuai dengan tempat, waktu, dan keadaan. Bagi masyarakat Lampung hal itu termuat dalam *Nengah-nyappur* yang menggambarkan bahwa anggota masyarakat Lampung mengutamakan rasa kekeluargaan dan

didukung dengan sikap suka bergaul dan bersahabat dengan siapa saja, tidak membedakan suku, agama, tingkatan, asal usul dan golongan secara wajar sesuai akidah yang dianutnya.

- 6) Menggunakan pakaian muslim baju koko bagi siswa putera musim saat Ramadhan dan siswi muslim bebas menggunakan seragam berjilbab dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari.

Kebijakan tersebut sama halnya dengan penghormatan terhadap hari Jumat. Keduanya sama-sama bagian dari ibadah dalam agama Islam, sehingga kebaikannya justru akan lebih bermanfaat bagi sekolah. Penerimaan siswa lain yang nonmuslim terhadap kebijakan tersebut justru menjadi ukuran bahwa pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal dapat berlangsung baik. Penampilan berpakaian dengan atribut Islam terutama Jilbab yang bagi wanita yang sudah baligh kedudukannya wajib dalam syariah Islam, tidak menjadi penghalang maupun menumbuhkan sikap diskriminasi dalam hubungan komunikasi dengan siswa muslimah yang tidak memakai jilbab, maupun siswa nonmuslim. Saling memahami, menghargai, dan menghormati di antara siswa memunculkan kedamaian dalam kebersamaan untuk mencapai prestasi sekolah.

Keberterimaan untuk menghasilkan keharmonisan di tengah keberagaman semacam itu dalam konsep kearifan lokal Bali termasuk dalam falsafah "*Matilesang raga*" yang berarti dapat menempatkan diri, sesuai dengan tempat, waktu, dan keadaan. Bagi masyarakat Lampung hal itu termuat dalam *Nengah-nyappur* yang menggambarkan bahwa anggota masyarakat Lampung mengutamakan rasa kekeluargaan dan didukung dengan sikap suka bergaul dan bersahabat dengan siapa saja, tidak membedakan suku, agama, tingkatan, asal usul dan golongan secara wajarsesuai akidah yang dianutnya.

- 7) Menggunakan hiasan berupa motif kain *Tapis* Lampung pada dinding ruang
- 8) Memasang hiasan berbentuk *Siger* pada bagian atas gerbang sekolah.

- 9) Menyajikan tarian adat Lampung “Siger Penguten” dan “Melinting” dalam menyambut tamu penting pada acara khusus tertentu.

Keberadaan tarian khas adat Lampung, penggunaan hiasan motif kain *Tapis* Lampung dan hiasan berbentuk *Siger* di sekolah merupakan bagian dari upaya pelestarian dan pewarisan budaya lokal kepada siswa dan masyarakat. *Siger* merupakan mahkota pengantin wanita sekaligus simbol kejayaan atau kebesaran dan ikon daerah Lampung. Tumbuhnya kebanggaan terhadap kearifan lokal akan seiring dengan tumbuhnya kesadaran dan sikap penerimaan secara adaptif terhadap keberagaman serta menghormati kebudayaan etnik lain.

Kemampuan beradaptasi dengan budaya lain ini dalam kearifan lokal Lampung terdapat pada falsafah *Tengah Nyappur* atau kemampuan berbaur dalam kebersamaan di tengah keberagaman untuk menyelesaikan suatu kebutuhan bersama. Sedangkan pada masyarakat etnik Bali termuat dalam falsafah *Sagilik saguluk salunglung sabayantaka, paras paros sarpanaya*. Masyarakat etnik Bali senantiasa bersatu padu dalam suka-duka dan menghadapi bahaya, berembug dan bermusyawarah (meng-hargai pendapat orang lain), saling mengingatkan, saling menyayangi, dan saling menolong. di setiap kesempatan. Dengan merasa senasib dan se-penanggung, saling bahu-membahu dalam memecahkan masalah dan tantangan hidup sehari-hari diharapkan keharmonisan membangun hubungan antarsesama tercapai dan memperoleh kebahagiaan hidup.

- 10) mengadakan pengumpulan dana kepedulian sosial untuk disumbang-kan kepada siswa atau guru yang mendapat musibah. Sikap kepedulian sosial terhadap sesama tumbuh karena adanya rasa empati atau kemampuan merasakan yang dialami orang lain.
- 11) Mengadakan kerja bakti (gotong royong) massal kebersihan sekolah dan di masyarakat (bersama pihak kelurahan dan kecamatan) secara periodik.

Pengumpulan dana kepedulian sosial sebagai sikap empati kepada orang yang lemah, serta gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hampir setiap daerah dan etnik memiliki budaya peduli sosial dan gotong royong. Kedua hal ini penting dilestarikan dan dibelajarkan di kalangan siswa yang secara kebetulan hidup di era teknologi dan berhasil membawa mereka dari berkehidupan sosial menjadi individual bahkan cenderung lebih menikmati “dunia” kesendiriannya itu sehingga kurang memiliki empati, kepekaan dan kecerdasan sosial. Dengan gotong royong unsur kebersamaan, kepedulian, tanggung jawab individual dan sosial serta kemampuan membaur dan menyesuaikan (adaptasi) dan toleransi terhadap keberagaman dapat ditumbuhkan.

Kemampuan semacam itu tercermin dalam falsafah kearifan lokal etnik Lampung “*Sakai Sembaiyan*”, yang berarti tolong menolong dan gotongroyong, kebersamaan atau guyub, partisipatif serta solidaritas yang tinggi terhadap berbagai kegiatan pribadi dan sosial kemasyarakatan pada umumnya. Dalam kearifan lokal Bali tercakup dalam falsafah “*Sagilik saguluk salunglung sabayantaka, paras paros sarpanaya*”, yakni bersatu padu dalam suka-duka dan menghadapi bahaya, berembuk dan bermusyawarah (menghargai pendapat orang lain), saling mengingatkan, saling menyayangi, dan saling menolong di setiap kesempatan.

Dengan merasa senasib dan sepenanggungan, saling bahu-membahu dalam memecahkan masalah dan tantangan hidup sehari-hari diharapkan keharmonisan membangun hubungan antarsesama tercapai dan memperoleh kebahagiaan hidup. Selain itu juga terdapat pada falsafah *Tat Twam Asi* yang berarti “Dia adalah engkau dan engkau adalah dia juga”. Maksud yang terkandung dalam ajaran *Tat Twam Asi* adalah saya adalah kamu, dan semua makhluk adalah sama” sehingga bila kita menolong orang lain berarti juga menolong diri kita sendiri.

c. **Historis konflik**

Peristiwa konflik antaretnik Lampung dan Bali paling tragis pada 27 Oktober 2012 maupun konflik-konflik antaretnik yang pernah terjadi sebelumnya di kawasan Lampung Selatan bagi

masyarakat setempat merupakan peristiwa yang selalu membekas, sehingga kisahnya akan dengan mudah didapatkan dari masyarakat luas termasuk masyarakat di luar wilayah tersebut dengan berbagai versi. Namun demikian, kisah tersebut akan agak sulit didapatkan dari masyarakat di kawasan (lokasi) terjadinya peristiwa tersebut (Kecamatan Sidomulyo dan Way Panji) karena mereka cenderung tertutup dan penuh kehati-hatian untuk mengungkapkannya.

Merujuk pada pengalaman awal mengunjungi lokasi konflik, masyarakat secara perorangan maupun kelompok bahkan cenderung bersikap sinis, tidak ramah dan penuh kecurigaan. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa konflik antaretnik dapat berimplikasi pada munculnya berbagai sikap yang mencerminkan sikap traumatik, seperti ketakutan, kehati-hatian, tertutup, dan kurang bersahabat. Konflik dengan berbagai dampaknya itu dalam pemikiran penulis telah memberi kesadaran juga bagi masyarakat sekolah sehingga SMPN 1 Sidomulyo melakukan upaya menjaga agar sekolah senantiasa dalam kondisi yang kondusif bagi penyelenggaraan pendidikan dengan berupaya menciptakan dan menjaga harmonisasi komunikasi antarpersonal dan menciptakan iklim atau budaya sekolah yang sarat dengan nilai-nilai sosial, budaya dan agama.

Meminjam istilah dalam sepuluh proposisi konflik Lewis A Coser (dalam Poloma, 2000:107-120), kondisi tersebut dapat disejajarkan dalam proposisi konflik sebagai stabilisator sistem sosial, bahwa konflik berfungsi menegaskan dan mempertahankan identitas dan batas-batas kelompok sosial dan masyarakat. Konflik antara suatu kelompok dengan kelompok lain memungkinkan ditegaskannya kembali identitas kelompok satu sama lain dan mempertahankan batas-batasnya terhadap lingkungan sosial di luarnya. Selain itu konflik tidak selalu bersifat disfungsional dalam konteks hubungan dimana konflik tersebut terjadi; sebaliknya seringkali konflik diperlukan untuk mempertahankan hubungan tersebut.

Tanpa cara-cara menyalurkan kebencian satu sama lain, anggota- anggota kelompok cenderung sepenuhnya beraksi keras, atau barangkali menarik diri.

Oleh karena itu konflik dapat berfungsi sebagai katup pengaman sehingga sistem sosial tersebut dapat dipertahankan dalam batas-batas tertentu. Selanjutnya konflik dapat menciptakan jenis-jenis interaksi yang baru di antara pihak-pihak yang bertentangan yang sebelumnya ada. Konflik berlaku sebagai rangsangan untuk menciptakan aturan-aturan dan sistem norma yang baru, yang mampu mengatur pihak-pihak yang bertentangan tadi sehingga keteraturan sosial kembali terwujud. Konflik dapat mempersatukan orang-orang atau kelompok yang tadinya tidak saling berhubungan.

Wujud dari preposisi konflik tersebut dalam historis konflik Balinuraga Lampung Selatan adalah yang semula konflik itu tumbuh karena berbagai motif kebencian, persaingan, prasangka dan lainnya, akan menumbuhkan komunikasi baru yang didasari oleh kesepakatan dan kesepahaman antar pihak yang terlibat meskipun masih menyisakan pengaruh psikis traumatis.

d. Sekolah binaan UNESCO

SMPN 1 Sidomulyo merupakan salah satu sekolah di provinsi Lampung yang mendapat kepercayaan program MBE (*managing based of education*) kerjasama UNESCO dan Depdikbud dalam kegiatan pembinaan pembelajaran berbasis PAKEM pada tahun 2008 hingga 2010. PAKEM merupakan akronim Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan. Karakteristik pembelajaran semacam itu sejalan dengan karakteristik pen-*didikan* multikultural. Menurut UNESCO dalam Budimansyah, dkk (2009:38-39) pembelajaran berbasis PAKEM berangkat dari empat pilar pendidikan, yakni (1) *learning to know*, (2) *learning to do*, (3) *learning to be*, dan (4) *learning how to live together*.

Kempat pilar pendidikan tersebut memberikan indikasi bahwa hasil pendidikan dewasa ini diarahkan untuk dapat menghasilkan manusia yang memiliki ciri-ciri manusia paripurna sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. (1) *Learning to know* dalam pilar tersebut, belajar dimaknai sebagai upaya untuk mengetahui. Belajar ini termasuk dalam kategori yang lebih menekankan pada ranah kognitif. (2) *Learning to do*.

Dalam pilar ini, belajar dimaknai sebagai upaya untuk membuat peserta didik bukan hanya mengetahui, tetapi lebih kepada dapat melakukan atau mengerjakan kegiatan tertentu. Fokus pembelajaran pilar ini pada ranah psikomotorik. (3) *Learning to be*. Dalam pilar ketiga ini, belajar dimaknai sebagai upaya untuk menjadikan peserta didik sebagai dirinya sendiri. Belajar dalam konteks ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi peserta didik, sesuai dengan minat dan bakatnya atau tipe-tipe kecerdasannya (*types of intelligence*). (4) *Learning how to live together*. Pilar keempat ini belajar dimaknai sebagai upaya agar peserta didik dapat hidup bersama dengan sesamanya secara damai.

Pengalaman memperoleh pembinaan tentang pembelajaran berbasis PAKEM yang dimiliki para pendidik di SMPN 1 Sidomulyo Lampung Selatan melalui program MBE (*managing based of education*) kerjasama UNESCO dan Depdikbud selama tiga tahun (2008-2010), merupakan modal besar yang dimiliki guru di sekolah tersebut. Kemampuan tersebut dapat disinergikan dengan pengetahuan dan pengalaman belajar lain yang telah dimilikinya untuk meningkatkan kompetensi mengajar yang mencerminkan pendidikan multikultural. Hal ini mengingat pembelajaran berbasis PAKEM dirancang agar pembelajaran dapat optimal mengaktifkan peserta didik, mengembangkan kreativitas dan potensi secara efektif namun tetap menyenangkan. Prinsip pembelajaran semacam itu memiliki kesesuaian dengan pendidikan multikultural. Gollnick & Chinn (2006:357) menjelaskan dalam pembelajaran berbasis multikultural, semua pengajaran harus bersifat multikultural dan harus memiliki model demokrasi, pemerataan dan keadilan sosial.

e. Kegiatan ekstrakurikuler lengkap

Sekolah ini memiliki kegiatan ekstrakurikuler dan sarana-prasarana penunjang yang relatif lengkap, seperti olah raga, seni bela diri, seni budaya, keagamaan, keterampilan dan IPTEK. Kegiatan ekstrakurikuler yang beragam dapat menampung aspirasi peserta didik sekaligus menjadi wadah pembentukan karakter yang mampu menerima keberagaman sebagaimana menjadi tujuan pendidikan multikultural.

f. Memiliki kurikulum tersembunyi

Aktivitas kegiatan pendidikan di sekolah ini tidak semata-mata bertumpu kepada kegiatan yang bersumber dari kurikulum formal, tetapi didukung juga oleh kegiatan yang bersumber dari kurikulum tersembunyi. Kegiatan tersebut berupa keteladanan dan pembiasaan untuk menuju penciptaan budaya sekolah dalam mewujudkan visi sekolah yang “Unggul dalam Imtaq, Iptek, Berprestasi, Berkarakter Kebangsaan, Berbudi Pekerti Luhur dan Berwawasan Lingkungan”.

2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pendidikan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal di SMPN 1 Sidomulyo, Lampung Selatan

Pelaksanaan pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal di SMPN 1 Sidomulyo, Lampung Selatan dipengaruhi oleh faktor-faktor penghambat sebagai berikut:

a. Keterbatasan waktu

Mata pelajaran IPS di SMP memiliki 4 jam pelajaran yang setara dengan 4x40 menit atau sama dengan 160 menit. Jumlah tersebut lazimnya akan diwujudkan untuk penyampaian materi pembelajaran dalam dua kali pertemuan atau 2x40 menit. Jumlah 80 menit persatu kali pertemuan inilah yang menjadi keluhan guru, dalam kaitan pelaksanaan pendidikan multi- kultural berbasis kearifan lokal. Jumlah tersebut tidak akan efisien jika dalam pembelajaran mata pelajaran IPS harus juga melaksanakan pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal yang berkaitan materikeagamaan ataupun budaya suatu etnik.

b. Kesalahan memaknai pendidikan multikultural

Tidak semua guru memiliki pemahaman yang baik terhadap pendidikan multikultural. Ada anggapan pendidikan multikultural hanya ketika guru membahas materi yang berkaitan dengan keragaman budaya, etnik dan agama, atau ketika sekolah menyediakan program kegiatan pembinaan dan pengembangan

budaya dan keagamaan. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk melaksanakan pembelajaran yang mencerminkan pelaksanaan pendidikan multikultural. Ketika guru mengetahui di kelas terdapat peserta didik yang selalu kesulitan memahami materi pelajaran sehingga pemerolehan pengetahuan menjadi tidak merata, kemudian ia segera mengubah strategi pembelajarannya dan materi yang disampaikan akan semakin mudah dipahami peserta didik tersebut maka saat itu terjadi pemerataan pemerolehan pengetahuan di kelas yang diajarnya, saat itu guru tersebut dapat dianggap telah melaksanakan atau memenuhi dimensi pendidikan multikultural.

Pemenuhan dimensi pendidikan multikultural juga dapat dilakukan manakala guru memutuskan untuk menggunakan contoh, ilustrasi yang dekat dengan kehidupan peserta didik, menggunakan bahasa dan istilah yang mudah dipahami. Guru mengajak peserta didik ke luar kelas dan belajar di alam terbuka di lingkungan sekitar sekolah, itu pun telah memenuhi dimensi pendidikan multikultural.

c. Tidak mengenali kearifan lokal yang bukan berasal dari etniknya

Tidak semua guru maupun peserta didik mengenali kearifan lokal masyarakat etnik setempat karena bukan berasal dari etniknya. Sebaiknya guru memiliki pemahaman yang baik terhadap nilai-nilai etnik manapun meskipun dirinya bukan berasal dari etnik dan agama yang sama. Tidak jarang nilai-nilai kearifan lokal suatu etnik dengan istilah yang berbeda namun memiliki kesamaan makna. Misalnya, *Sutata Pawongan* (salah satu unsur *Trihita Karana* masyarakat Bali-Hindu) yang berarti harmonisasi tata hubungan manusia dan sesamanya. Dalam Islam hal tersebut sama dengan *Hablum minannas* yang berarti kaidah yang mengatur hubungan antarmanusia secara umum, antarsesama muslim, dan antarmuslim dan nonmuslim.

Selanjutnya dalam kearifan lokal Lampung terdapat *Nengah-Nyappur* yang berarti sikap yang mengutamakan rasa kekeluargaan, suka bergaul dan bersahabat dengan siapa saja, tidak membedakan

suku, agama, tingkatan, asal usul dan golongan. Tiga nilai-nilai kehidupan tersebut bersumber dari kearifan lokal yang berbeda namun memiliki makna yang kurang lebih sama, yakni mengatur hubungan antarmanusia agar tercipta harmonisasi.

d. Pendidikan multikultural belum berbasis kearifan lokal.

Bentuk kearifan lokal tidak hanya yang berwujud kebendaan atau material melainkan juga dapat berupa nilai-nilai yang tidak berwujud benda (material). Pada materi pelajaran IPS yang berkaitan dengan keragaman budaya dan agama, unsur kearifan lokal yang berwujud kebendaan dapat dengan mudah masuk dalam RPP pembelajaran IPS, seperti bangunan peninggalan sejarah, motif kain dan pakaian, senjata, dan makanan khas. Kearifan lokal yang berwujud nonmaterial yang berupa nilai-nilai falsafah hidup suatu etnik dibutuhkan pengetahuan dan kejelian untuk memilah dan memilih kesesuaiannya dengan materi pokok atau pokok bahasan dan subpokok bahasan pada kurikulum. Misalnya, keterkaitan *nemui nyimah* dan *paras-paros* dalam dinamika sosial masyarakat sehari-hari. *Nemui Nyimah*, salah satu unsur kearifan lokal *Pi'il Pesenggiri* pada masyarakat etnik Lampung berarti kesetiakawanan dan gotong royong, memiliki makna yang sama dengan *Paras Paros* pada kearifan lokal masyarakat etnik Bali, yang berarti senasib-sepenanggungan, bahu membahu.

Nilai-nilai kesetiakawanan dan kebersamaan, bahu-membahu dalam kegiatan gotong royong yang dilakukan secara periodik peserta didik beserta masyarakat dan dinas kecamatan di lapangan kecamatan Sidomulyo merupakan perwujudan nyata kearifan lokal dalam dinamika kehidupan sehari-hari sebagaimana termuat dalam materi pelajaran IPS.

e. Kearifan lokal Bali dianggap sensitif

Pembahasan kearifan lokal yang berkaitan dengan falsafah dan nilai-nilai agama yang dianut oleh etnik tertentu dianggap sebagai topik yang sensitif sehingga guru kurang merasa nyaman atau takut salah dalam membelajarkan kearifan lokal yang bukan berasal dari etniknya dan bukan agama yang dianutnya. Penyampaian kearifan

lokal etnik Bali yang identik dengan ajaran agama Hindu seolah-olah akan sama dengan melakukan orientasi ajaran Hindu kepada peserta didik yang bukan beragama Hindu. Sensivitas yang terkait perbedaan agama tampak dihindari karena sangat rentan untuk memicu konflik terulang kembali.

Perlu juga dipertimbangkan bahwa sensitivitas yang muncul dalam penyampaian kearifan lokal Bali di sekolah dapat terkait dengan aspek sosial bahwa masih terdapat sikap intoleransi masyarakat etnik lain yang beragama Islam terhadap pola kehidupan masyarakat etnik Bali di Sidomulyo dan Way Panji Lampung Selatan. Keberadaan pemukiman masyarakat etnik Bali di Sidomulyo dan Way Panji yang membaaur atau berdekatan dengan masyarakat etnik lain yang muslim hingga kini masih belum dapat ditolerir sepenuhnya karena ketidakberterimaan mereka atas aktivitas ritual keagamaan dan sosial masyarakat etnik Bali. Aktivitas ritual keagamaan dan sosial masyarakat itu seperti, membakar dupa sepanjang waktu sehingga wewangian dupa memenuhi lingkungan desa, memelihara babi yang dibiarkan berkeliaran di halaman atau di jalan-jalan sekitar rumah mereka, menjalankan usaha rentenir, dan pemudanya masih senang mempelajari ilmu mistik.

Selain itu keberadaan jargon “Bali adalah Hindu-Hindu adalah Bali” yang sesungguhnya sebagai semangat untuk menjaga dan menguatkan kelestarian identitas etnik secara internal atau khusus untuk etnik mereka saja, tampak turut memengaruhi tumbuhnya sensitivitas yang mengusik masyarakat etnik lain dan munculnya sentimen negatif terhadap etnik Bali sebagai etnik yang eksklusivisme, intoleransi dan primordialisme.

Berbagai aspek perilaku sosial budaya dan agama tersebut merupakan aspek yang sensitif memicu terjadinya konflik terulang kembali. Dalam analisis Alqadri (dalam Antropologi Indonesia: 1999:37), perbedaan-perbedaan budaya antara satu kelompok dengan kelompok lain baik dalam bentuk sistem nilai budaya (*cultural value system*) maupun orientasi nilai budaya (*cultural value orientation*) dapat memunculkan mentalitas dan perilaku masyarakat kelompok etnis/agama tertentu yang umumnya tidak sesuai dengan kebiasaan, tradisi dan adat kelompok etnis lainnya,

khususnya kelompok etnis setempat. Ketidakberterimaan itu cenderung menimbulkan keresahan, ketidakpuasan, kekecewaan dan luka atau kepedihan.

f. Pengalaman traumatis konflik

SMPN 1 Sidomulyo merupakan sekolah yang masyarakat akademik dan masyarakat lingkungannya berada di kawasan terpapar konflik antaretnik paling besar dan paling tragis. Hal ini memunculkan sikap traumatis guru sehingga membatasi ruang gerak dan pemikiran kreatifnya untuk membahas materi yang bersinggungan dengan etnik ataupun agama yang dianggap sensitif. Selain itu juga dipengaruhi oleh prejudis negatif yang berkembang pada masing-masing etnik. Sikap traumatis guru yang berlebihan sehingga membatasi kreativitas guru dalam pembelajaran tidak sederhana sekedar menghambat pelaksanaan pendidikan multikultural di sekolah tersebut. Lebih jauh sikap tersebut identik dengan menciptakan status quo berkepanjangan, yang suatu saat akan menjadi seperti bom waktu manakala terjadi konflik yang berulang dengan latar belakang yang sama, yakni rapuhnya pemahaman nilai-nilai kearifan lokal.

g. Minim ikon

Masih minim ikon-ikon pendidikan multikultural dan ikon-ikon kearifan lokal berupa poster yang berisi tulisan tentang keragaman. Ikon-ikon pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal merupakan media komunikasi yang relatif efektif untuk menyosialisasikan, mengingatkan maupun mengajak masyarakat sekolah akan pentingnya keberagaman, tenggang rasa, demokrasi, dan berbagai nilai-nilai luhur budaya bangsa. Oleh karena itu kehadirannya perlu proporsional sesuai dengan banyaknya ruang atau kelas, jumlah siswa dan luasnya sekolah tersebut.

Berdasarkan hambatan-hambatan tersebut, beberapa solusi yang dianggap penting adalah sebagai berikut:

- 1) Guru harus mengubah paradigma dalam memaknai pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal. Dalam pelaksanaan pendidikan multi- kultural berbasis kearifan lokal, peran guru

yang diharapkan bukanlah semata-mata untuk menyampaikan materi tentang aneka bentuk kebudayaan etnik yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke sehingga guru justru akan kehilangan waktu untuk menyampaikan materi pokok masing-masing mata pelajaran. Dalam pelaksanaan pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal, peran yang diharapkan dari gurumata pelajaran IPS adalah penanaman nilai-nilai yang bersumber dari falsafah masyarakat etnik yang berada di sekitarnya (lokal setempat) yang dapat dilakukan secara bersamaan atau disisipkan ketika guru sedang melaksanakan proses pembelajaran dengan materi tertentu sesuai kurikulum, disertai dengan penggunaan metode, strategi, media dan sumber belajar yang dapat menumbuhkan sikap keberterimaan atas perbedaan, kebersamaan, demokratis, tenggang rasa, solidaritas, dan sebagainya yang menjadi karakteristik pendidikan multikultural.

- 2) Guru harus memiliki kepedulian untuk meningkatkan pemahamannya terhadap kearifan lokal etnik manapun. Dibutuhkan motivasi yang kuat untuk menumbuhkan kemauan mempelajari kearifan lokal etnik personal (dirinya sendiri) maupun kearifan masyarakat etnik di lingkungan sekolahnya secara mendalam (detail) tanpa membatasi perbedaan etnik dan agama yang dianutnya. Pemahaman yang baik terhadap kearifan lokal masyarakat etnik akan menumbuhkan keterampilan guru dalam memilah dan memilih nilai-nilai kearifan lokal suatu etnik yang sesuai dengan materi pokok atau pokok bahasan dan subpokok bahasan pada kurikulum.

Berdasarkan kajian tersebut berikut ini beberapa proposisi yang dapat diajukan berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal;

- 1) Pelaksanaan pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal di sekolah pada daerah konflik harus dipahami sebagai upaya sekolah dan guru dalam menumbuhkembangkan kompetensi multikultural peserta didik melalui proses pembelajaran yang

memenuhi dimensi pendidikan multikultural dengan menjadikan kearifan lokal masyarakat setempat sebagai basis sumber belajar.

Proposisi tersebut mengandung pengertian bahwa pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal adalah proses pembelajaran (edukatif) tentang keberagaman (kebhinekaan) bangsa Indonesia beserta upaya-upaya yang menumbuh kembangkan kesadaran dan sikap peserta didik untuk menerima, mengakui dan menghargai keberagaman (etnik, ras, bahasa, agama, ekonomi, gender dan sebagainya), berjiwa kesetaraan, toleran dan demokratis sesuai dengan karakteristik kearifan lokal bangsa Indonesia.

Selain itu dalam proses pembelajaran, guru mata pelajaran IPS di SMP tidak lagi sebatas atau cukup dengan hanya membelajarkan materi keragaman budaya suku bangsa di Indonesia, seperti nama-nama suku besertabentuk rumah adat, dan contoh keseniannya. Harus ada kesungguhan untuk memanfaatkan kearifan lokal setempat sebagai tambahan khusus (suplemen) dalam menyampaikan materi yang berkaitan dengan etnik atau sosial budaya. Untuk itu guru tidak hanya lebih dituntut untuk memperluas pengetahuannya tentang etnik masyarakat setempat beserta etnik-etnik yang ada di kelas atau sekolahnya, tetapi juga mendalami tentang seluk-beluk kearifan lokal masing-masing etnik tersebut.

Kompetensi multikultural yang perlu ditumbuh kembangkan pada peserta didik meliputi; pengembangan identitas kultural, hubungan inter- personal, dan pemberdayaan personal, yang berwujud kesadaran dan kebanggaan peserta didik terhadap etnik dan kebudayaannya, kemampuan bekerja sama dalam perbedaan, berjiwa kesetaraan, bersikap toleran, dan demokratis, dengan menerima, meng-akui dan menghargai kebhinekaan (etnik, ras, bahasa, agama, ekonomi, gender dan sebagainya). Sedangkan dimensi pendidikan multikultural yang harus terpenuhi dalam proses tersebut meliputi integrasi konten (*content integration*), proses penyusunan pengetahuan (*the knowledge construction*)

process), paedagogi kesetaraan (*an equity paedagogy*), dan pengurangan prasangka (*prejudice reduction*).

Penerapan pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal di sekolah pada daerah konflik ini juga akhirnya menghendaki sensitivitas atau kepekaan dan kecepatan merespon guru dalam melihat atau merasakan hal-hal yang ber-tentangan atau menyimpang dari nilai-nilai pendidikan multikultural yang terjadi di kelas dan lingkungan masyarakat, termasuk muatan materi yang terdapat di dalam buku-buku pelajaran untuk peserta didik. Hal ini berkaitan dengan maraknya pemberitaan di televisi mengenai penemuan buku ajar siswa yang isinya mendiskreditkan agama dan etnik tertentu, tetapi telah terlanjur mendapat izin dari dinas terkait, terlanjur diperjualbelikan di pasaran, dan guru pun terlanjur pula menggunakannya di kelas.

- 2) Pelaksanaan pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal di sekolah pada daerah konflik dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan kurikulum formal, baik intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler, serta kurikulum nonformal yang berupa kurikulum tersembunyi.

Penerapan pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal tampak begitu kompleks, sehingga dapat menjadi beban bagi guru, terutama guru yang belum memahami konsep pendidikan multikultural, karena seakan-akan hanya bertumpu dalam kegiatan intrakurikuler. Tambahan lagi, kegiatan intrakurikuler yang dalam kesehariannya identik sebagai kegiatan belajar mengajar dalam kenyataannya memang merupakan kegiatan utama bahkan sebagai identitas berlangsungnya proses pendidikan pada suatu sekolah, dengan guru sebagai variabel di dalamnya. Namun demikian, berdasarkan penelitian ini terungkap bahwa pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal di sekolah selain dapat diterapkan melalui kegiatan intrakurikuler, juga dapat melalui kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler, dan kurikulum tersembunyi. Hal hampir serupa, kecuali kurikulum tersembunyi,

terungkap dalam penelitian Ichsan (2010) di SMP Negeri 5 Makasar.

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal dapat dilaksanakan dalam semua aspek kurikulum, dan dengan melibatkan semua elemen pendidikan di sekolah. Keberadaan kegiatan ekstra-kurikuler dan kurikulum tersembunyi dalam penerapan pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal yang identik sebagai kegiatan pembelajaran di luar kegiatan kelas semakin mempermudah peserta didik dalam memahami dan mengembangkan perilaku intergroup yang harmonis, terbuka dan bersahabat dengan keberagaman dan perbedaan budaya etnik dan agama.

- 3) Kekhasan pembelajaran yang melaksanakan pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal terdapat pada pemilihan materi kebhinekaan bangsa Indonesia yang terintegrasi dengan kearifan lokal melalui penggunaan metode dan strategi pembelajaran yang memenuhi dimensi pendidikan multikultural dalam ranah pendekatan konstruktif dan model PAKEM.

Pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal tidak harus berupa pemberian materi pelajaran sebagaimana dalam buku teks pelajaran atau silabus kurikulum. Hal tersebut mengacu pada teori dimensi pendidikan multikultural Banks (2010:23) yang menempatkan kelima dimensi pendidikan multikultural bukan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri atau tanpa keterkaitan. Dengan begitu dalam melaksanakan pendidikan multikultural tidak semata-mata bertumpu pada kesesuaiannya dengan dimensi integrasi konten (*content integration*) atau isi materi yang berkaitan dengan keragaman sosial budaya, tetapi meliputi juga dimensi proses penyusunan pengetahuan (*the knowledge construction process*), dimensi paedagogi kesetaraan (*an equity paedagogy*), dimensi pengurangan prasangka (*prejudice reduction*), dan dimensi pemberdayaan budaya dan struktur sosial sekolah (*empowering school culture and social structure*).

Harus disadari juga bahwa dalam buku teks mata pelajaran, sebagaimana dalam mata pelajaran IPS SMP beserta silabusnya, tidak semua materi dalam silabus kurikulum memiliki kedekatan dengan pendidikan multikultural. Hanya beberapa pokok dan subpokok bahasan tertentu dalam yang memiliki kedekatan atau keterkaitan dengan materi kebhinekaan, yakni keragaman sosial budaya sebagai hasil dinamika interaksi manusia, yang meliputi; keberagaman suku bangsa, keberagaman bahasa, keberagaman budaya, dan keberagaman religi.

Keterkaitan pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal dengan pendekatan konstruktif dan model pembelajaran berbasis PAKEM sangat jelas karena identik dan menjadi urgen mengingat dalam pendekatan dan model tersebut lebih berorientasi pada penempatan peserta didik sebagai subyek pembelajaran atau berorientasi pada peserta didik untuk membangun pengetahuannya secara mandiri, dan berlangsung interaktif, menarik, menyenangkan, demokratis dan terbuka, sehingga dapat menumbuhkan kompetensi multikultural. Oleh karena itu, kekhasan pembelajaran pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal lebih terlihat pada ada tidaknya pemanfaatan kearifan lokal serta ketepatan penggunaan strategi, pendekatan, metode, media, maupun sumber belajar yang mencerminkan pendidikan multikultural.

- 4) Pelaksanaan pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal akan ditentukan oleh pemenuhan kompetensi guru mengenai pendidikan multikultural dan kearifan lokal.

Pelaksanaan pendidikan multikultural sebagaimana disarankan oleh Zamroni (2011:150), bukan sebagai pendidikan dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah atau monolitik. Melainkan sebagai proses pendidikan yang komperhensif dan mendasar bagi semua peserta didik, harus melekat dalam kurikulum dan strategi pengajaran, termasuk juga dalam setiap interaksi yang dilakukan di antara para guru, murid dan keseluruhan suasana belajar mengajar (Nieto,2002:29).

Pembelajaran yang memenuhi pelaksanaan pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal harus diawali dari penyusunan RPP guru, yang utamanya di dalamnya memuat materi kebhinekaan yang terintegrasi dengan kearifan lokal dan metode dan strategi pembelajaran yang memenuhi dimensi pendidikan multikultural, yakni berorientasi pada siswa (*student oriented*), menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran, mengutamakan keterlibatan partisipasi dan interaksi peserta didik secara merata dan berkeadilan dari beragam kelompok ras, etnis dan budaya, sehingga dengan materi dan cara mengajar tersebut dapat menumbuhkembangkan kompetensi multikultural peserta didik.

Mengingat tidak semua materi mata pelajaran IPS SMP kelas VII memenuhi pendidikan multikultural dan kearifan lokal maka peran dan kemampuan guru dalam memilih dan menentukan materi yang dibutuhkan dan yang dapat diintegrasikan dengan kearifan lokal sangat menentukan pelaksanaan pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal. Pelaksanaan pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal juga bergantung pada sikap dan pandangan guru terhadap kearifan lokal. Pengetahuan, sikap dan pandangan guru terhadap suatu kearifan lokal tertentu akan berimbas pada pemanfaatan kearifan lokal tersebut sebagai sumber belajar dalam pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal. Di tengah kondisi trauma dan sensitif pascakonflik bernuansa SARA yang cenderung dapat menyebabkan pelaksanaan pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal pada sekolah di kawasan terpapar konflik, pelaksanaan pendidikan multikultural akan semakin terhambat oleh sikap stereotip dan sentimen sosiokultural dan agama pada guru dengan latar belakang etnik dan agama berbeda.

- 5) Pelaksanaan pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal ditentukan oleh pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana yang dapat menunjang berbagai kegiatan kurikuler (intra-kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan kurikulum tersembunyi).

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang lengkap pada dasarnya bukanlah sesuatu yang mutlak dalam penyelenggaraan pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal pada suatu sekolah. Dengan keterbatasan sarana dan prasarana atau kondisi yang standar pun pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal itu dapat dilaksanakan, terutama pada aspek kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler. Namun konsekuensinya pada aspek kegiatan ekstrakurikuler akan kurang berperan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tidak semua sekolah di Indonesia memiliki fasilitas sarana dan prasarana lengkap dan memadai yang memungkinkan menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler, terutama pada sekolah-sekolah di daerah atau sekolah swasta dengan kondisi yang sangat terbatas.

Kenyataan menunjukkan bahwa seorang guru yang mengajar di kelas sering mendapatkan peserta didik memiliki pemahaman yang berbeda tentang pengetahuan yang diperoleh dan dipelajarinya, padahal semua peserta didik itu belajar dalam lingkungan sekolah yang sama, guru yang sama, dan bahkan buku teks yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan tidak begitu saja ditransfer dari guru ke siswa dalam bentuk tertentu, melainkan siswa membentuk sendiri pengetahuan itu dalam pikirannya masing-masing melalui pengalaman belajar sehingga pengetahuan tentang sesuatu dipahami secara berbeda-beda oleh siswa. Oleh sebab itu ternyata masih ada ruang selain kelas yang dapat menyediakan pengalaman belajar, atau masih terdapat kegiatan kurikuler selain kegiatan intrakurikuler yang mampu menyediakan pengalaman belajar. Penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler menurut Permendikbud RI No. 62 tahun 2014 adalah untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan,

kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Tujuan tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan multikultural, yakni terbentuknya pengetahuan, sikap dan perilaku peserta didik yang toleran, demokratis, menghargai perbedaan dalam pergaulan, sikap menerima perbedaan berbagai kepentingan dan tujuan, sikap bertanggung jawab, disiplin, dan kemampuan melepaskan sifat egois ketika berkompetisi dengan sikap siap kalah dan siap menang.

Dalam konstruktivisme pengalaman belajar merupakan hal yang sangat penting. Peranan sekolah dan pendidik di dalam memfasilitasi pengalaman belajar itu dapat melalui kegiatan pembelajaran dalam kegiatan ekstrakurikuler. (Suparno, 1997:65) menyebutkan tugas guru berkaitan dengan pendekatan konstruktif adalah menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan peserta didik ikut bertanggung jawab dalam membuat design, proses dan penelitian inkuiri untuk membangun pengetahuannya. Oleh karena itu sekolah berkewajiban menyediakan berbagai kegiatan yang menampung perbedaan yang dimiliki peserta didik baik dalam hal potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, maupun kemandiriannya.

Ketersediaan berbagai kegiatan ekstrakurikuler pada sekolah sangat bergantung pada kemampuan sumber keuangan dan pengelolaannya, ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk mengelola dan membina, dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukungnya. Kelengkapan kegiatan ekstrakurikuler pada suatu sekolah juga identik dengan status akreditasi sekolah tersebut karena aspek kelengkapan kegiatan ekstrakurikuler dan sarana-prasarana pendukungnya turut menjadi salah satu indikator dalam penilaian akreditasi sekolah. Oleh karena itu sepanjang suatu sekolah memiliki kemampuan dan daya dukung yang baik berupa ketersediaan jumlah peserta didik, pelatih atau pembina, dan lingkungan atau lahan, jumlah kegiatan ekstrakurikuler akan semakin bervariasi (lengkap) dan semakin baik.

BAB V

PENUTUP

Pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal sangat dibutuhkan untuk diterapkan di sekolah, terutama pada sekolah yang berada di wilayah terpapar konflik maupun yang terindikasi memiliki potensi konflik antaretnik, ras dan agama. Meskipun tidak terkait dengan peristiwa konflik, pendidikan multikultural tetap dibutuhkan mengingat bangsa Indonesia merupakan bangsa yang multikultur dengan konsep Bhineka Tunggal Ika yang harus terus dikembangkan dengan berbagai cara kreatif dan inovatif sesuai konteks kekinian. Bagaimanapun upaya pendidikan harus dapat menyesuaikan (fleksibel) dengan berbagai fenomena kehidupan yang terus mengalami perubahan dan semakin kompleks.

Pengembangan secara kreatif dan inovatif dalam pembelajaran pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal membutuhkan guru yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kehidupan berbangsa yang harmonis, saling menghormati dan menghargai hak hidup berdampingan secara damai dalam segala perbedaan. Untuk itu buku panduan pembelajaran pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal bagi guru pengampu mata pelajaran IPS SMP/MTs ini sangat terbuka untuk terus dikembangkan sedemikian rupa sesuai kebutuhan guru dan kondisi sekolahnya, termasuk bagi guru pengampu mata pelajaran selain IPS.

Pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal pada sekolah di daerah konflik seperti Lampung Selatan telah dilaksanakan pada berbagai kegiatan kurikuler, yang meliputi kurikulum formal (kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler) dan kegiatan kurikulum nonformal atau kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*), meski belum sepenuhnya berbasis kearifan lokal.

Implementasi pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal di SMPN 1 Sidomulyo Lampung Selatan tersebut dipengaruhi oleh dua faktor: faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi; (a) ke-Bhinneka Tunggal Ika-an, (b) Kearifan lokal, (c) Historis konflik, (d) Sekolah binaan UNESCO, (e) Kegiatan ekstrakurikuler yang lengkap (f) Memiliki kurikulum tersembunyi. Adapun yang menjadi faktor penghambat adalah; (a) Keterbatasan waktu, (b) Kesalahan memaknai pendidikan multikultural, (c) Tidak mengenali kearifan lokal yang bukan berasal dari etniknya, (d) Kesulitan memasukkan kearifan lokal nonmaterial dalam materi pembelajaran (e) Kearifan lokal Bali dianggap sensitif, (f) Pengalaman traumatis konflik (g) Minim ikon.

Hasil kajian penulis, mata pelajaran IPS memiliki materi yang identik atau memiliki kedekatan dengan pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal, sehingga dalam pembelajarannya akan lebih tepat menggunakan pendekatan konstruktif dengan model pembelajaran berbasis PAKEM. Keterkaitan pendidikan multikultural dengan pendekatan konstruktif dan model pembelajaran berbasis PAKEM terdapat pada kesamaan orientasi yang lebih besar pada peserta didik dalam menumbuhkan kompetensi multikultural yang berkarakter mandiri dalam membangun pengetahuan, terbuka, demokratis, toleran, dan kreatif, melalui pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan inovatif.

Terdapat beberapa kesamaan konsep dalam kearifan lokal masyarakat etnik Lampung yang berupa falsafah *Piil Pesenggiri* dan kearifan lokal masyarakat etnik Bali seperti *Tri Hita Karana*, *Manyamabraya* dan *Tat Twam Asi* sehingga apabila dikembangkan menjadi pola baku melalui pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal dapat menjadi solusi alternatif yang tepat untuk mengatasi kerawanan konflik bernuansa SARA pada wilayah

berpotensi konflik yang lingkungannya berlatar sosial budaya etnik Lampung dan Bali.

Pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal perlu diterapkan oleh sekolah-sekolah di daerah konflik seperti Lampung Selatan atau daerah lain, sehingga sekolah dapat lebih berperan sejak dini mengupayakan pemahaman betapa pentingnya sikap tenggang rasa dan kebersamaan dalam berbagai perbedaan. Hal ini mengingat bahwa ketidak-mampuan seseorang untuk memahami perbedaan dapat memunculkan pengidentifikasian yang kuat terhadap kelompok etniknya dan cenderung akan menyebabkan seseorang lebih berprasangka terhadap kelompok etnik lain sehingga dapat menjadi sumber konflik yang potensial.

Berkaitan dengan peran tersebut, para pemangku kepentingan (*stake-holders*) khususnya Kemendikbud harus dapat memberikan kebijakan legal formal sebagai payung hukum bagi sekolah dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal.

Para pendidik pada sekolah di daerah konflik seperti Lampung Selatan, harus lebih berperan bahkan harus dapat menjadi pioner dalam melaksanakan pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal di sekolahnya. Hal ini mengingat pokok bahasan dan subpokok bahasan (materi pembelajaran) pada mata pelajaran IPS sangat dekat dan identik dengan pendidikan multikultural.

Sejalan dengan itu, guru-guru di sekolah pada daerah konflik sebagai ujung tombak pendidikan harus ditingkatkan keilmuan dan pemahamannya tentang pendidikan multikultural dan kearifan lokal melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, workshop, serta TOT (*training of trainer*) agar dapat mendiseminasikan kepada guru-guru lain.

SMPN 1 Sidomulyo sebagai penyelenggara pendidikan formal yang memiliki karakter sangat heterogen dan berada di daerah yang sering terpapar konflik antaretnik harus lebih memperhatikan pentingnya pelaksanaan pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal dengan menyediakan alternatif kegiatan lintas budaya dan lintas agama.

Mengingat pelaksanaan pembelajaran oleh guru senantiasa diawali oleh penyusunan RPP, maka sebaiknya guru pada sekolah yang melaksanakan pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal harus dapat menyusun RPP yang utamanya di dalamnya memuat materi kebhinekaan yang terintegrasi dengan kearifan lokal dan metode dan strategi pembelajaran yang memenuhi dimensi pendidikan multikultural, yakni berorientasi pada siswa (*student oriented*), menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran, mengutamakan keterlibatan partisipasi dan interaksi peserta didik secara merata dan berkeadilan dari beragam kelompok ras, etnis dan budaya, sehingga dengan materi dan cara mengajar tersebut dapat menumbuhkembangkan kompetensi multikultural peserta didik.

Mengingat provinsi Lampung, khususnya Lampung Selatan merupakan wilayah yang sering mengalami konflik yang menjurus pada konflik antaretnik dan antaragama, sebaiknya pemerintah daerah provinsi Lampung khususnya pemerintah daerah Lampung Selatan dan instansi terkait memiliki kesamaan pemikiran pentingnya upaya pencegahan agar konflik tidak terulang kembali dengan membentengi generasi muda di kalangan pelajar sejak dini sehingga mata rantai pemicu konflik yang umumnya melibatkan pemuda (pelajar) terputus. Untuk itu Pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal sebaiknya dapat dijadikan sebagai program pendidikan khusus (muatan lokal) sekaligus program unggulan daerah yang dapat diimplementasikan oleh sekolah-sekolah di daerah tersebut secara legal formal (berpayung hukum) sesuai amanat Sistem Pendidikan Nasional yang termuat dalam UU Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003.

Sejalan dengan upaya tersebut, maka pemerintah daerah beserta instansi terkait perlu melakukan pemetaan wilayah rawan konflik dan selanjutnya bersinergi dengan lembaga penyelenggara pendidikan (Kanwil Kemen-dikbud, Kanwil Kemenag, dan perguruan tinggi) dan tokoh masyarakat (budayawan dan masyarakat adat), untuk menginventarisir nilai-nilai kearifan lokal berbagai etnik dan menyusun kebijakan implementasi pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal secara komprehensif.

Bagi para peneliti dan pemerhati pendidikan, khususnya yang memfokuskan pada pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal di daerah konflik, kajian ini masih sangat terbuka untuk ditindaklanjuti dengan penelitian yang lebih lengkap dan menyeluruh (*comprehensive*) dari berbagai sudut pandang sehingga dapat ditemukan formula yang tepat untuk diimplementasikan secara formal (sebagai suatu kebijakan formal).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 2008. *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*. Yogyakarta: Sekol.
- Abdullah, Taufik. 1996. *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Abidin, Syaiful. 2008. *Penerapan Konsep Pendidikan Multikultural pada Madrasah*. Skripsi UIN Yogyakarta.
- Adimiharja, Kusnaka. 1993. *Kebudayaan dan lingkungan*. Bandung: Ilham Jaya.
- Ahmad, Rofiq. Ed. 1997. *Budaya Kepeloporan dalam Mobilitas Penduduk*. Jakarta: Puspaswara.
- Al-Ma'ruf, Ali Imron. 2014. *Pendidikan Multikultural Melalui Reaktualisasi Teater Tradisi di Surakarta*. Prodi PBSID FKIP & Magister Pengkajian Bahasa Sekolah Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol. 9, No. 1, 2 Januari 2014: 1 – 14
- Aly, Abdullah. 2011. *Pendidikan Islam Multikultural di Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Pansori, Muh. Jaelani. 2013. *Pendidikan multikultural Dalam Buku Sekolah Elektronik (BSE) Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Untuk Peserta didik SMP di Kota Surakarta*. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*. Vol.1. No. 1.
- Appadurai, Arjun. 1991. "Global Ethnoscape: Notes and Quenesfor Transnationa lAnthropology" in, *Recapturing Anthropology*

- Working in the Present*. Richard G. Fox (Ed.). Santa Fe, New Mexico: School of American Research Press.
- Arifin, Nurdin Z. *Gagasan dan Rancangan Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural di Sekolah Agama dan Madrasah, dalam <http://lpkub/Jurnal KUB/pmkmadrasah,htm>*, 28 Maret 2008.
- Arifuddin, Iis. 2007. *Urgensi Implementasi Pendidikan Multikultural di Sekolah*. Jurnal Vol. 12. No. 2. Mei-Agustus 2007.
- Bagus, I Gusti Ngurah. dkk. 1981. *Latar Belakang Sosial Budaya Bahasa Bali Nusa Penida*. Denpasar Bali: Fakultas Sastra Universitas Udayana.
- Banks, James A. 2002. *An Introduction to Multicultural Education*. Boston: Allynand Bacon.
- _____. 2010. *Multicultural Education: Issues and Perspectives*. NeedhamHeighs Massachusetts: Allyn and Bacon.
- Bloom, Benyamin S. 1995. *Taxonomy Of Educational Objectives, Hand Book ICognitive Domain David Mc.Kay Company. Inc*.
- Bogdan, R & Biklen, S. 1992. *Qualitative Researchfor Education*. Boston: MA:Allyn and Bacon.
- Budiman, Budi Santoso dan Oyos Saroso HN (pen). 2012. *Merajut JurnalistikDamai di Lampung*. Bandarlampung: Aliansi Jurnalis Independen.
- Budimansyah, Dasim. dkk. 2009. *PAKEM Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif,dan Menyenangkan*, Bandung: PT Genesindo.
- Cardinas, Jose A. 1975. *Multicultural Education: A Generation of Advocacy*.(America Simon & Schuster custom Publishing.
- Cresswell, J. 1998. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. Thousand Oaks CA: Sage Publications.
- Dahrendorf, Ralf (1986): *Konflik dan konflik Dalam Masyarakat Industri SebuahAnalisa Kritik*. Jakarta: Rajawali
- Depdikbud. 1983/1984. *Majalah Analisis Kebudayaan*. Th.IV. No.2. Jakarta:Dirjen Kebudayaan Depdikbud RI.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Pendekatan Kontekstual*. Jakarta: Ditjen Dikdasmen - Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama.

- Djumransjah, M. 2004. *Filasafat Pendidikan*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ekstrand, L.H. "Multicultural Education" dalam Saha, Lawrence J. (Eds.). 1997. *International Encyclopedia of the Sociology of Education*. New York: Pergamon.
- Endang Lestari, Ana. *Analisis Kebutuhan Tentang Nilai-Nilai Kebhinekaan Dalam Pendidikan Multikultural (Studi Pada Para Peserta didik SMP Yayasan Insan Mandiri se Bali)*
- Freire, Paulo. 2000. *Pendidikan Pembebasan*. Jakarta: LP3S
- Garcia, Ricardo L. 1992. *Teaching in a Pluralistic Society: Concepts, Models, Strategies*. New York: Harper & Row Publisher.
- Gay, Brian. 1996. *Contemporary Philosophy of Social Science: A Multicultural Approach*. Oxford: Backwell.
- Gollnick, Donna. 1983. *Multicultural Education in a Pluralistic Society* (London: The CV Mosby Company).
- Gollnick, Donna M., and Chinn, Philip C. 2006. *Multicultural Education in a Pluralistic Society* (Revised Edition). New Jersey: Pearson Education.
- Gunawan, Restu. 2008. *Kearifan Lokal Dalam Tradisi Lisan dan Karya Sastra*, Makalah disampaikan dalam kongres Bahasa, tanggal 28-31 Oktober 2008, di Jakarta.
- Haba, John. 2007. *Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku, dan Poso*. Jakarta: ICIP dan European Commission
- Hadikusuma, Hilman. 1980. *Masyarakat dan Adat Budaya*. Mandar Maju. Bandung
- _____. 1989. *Ensiklopedia Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia*. Alumni. Bandung
- Hakim, Ainun. 2007. *Nilai-Nilai Dan Konsep Pendidikan Multikultural Dalam Pendidikan Islam*. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Hamalik, Oemar, 2001. *Proses Belajar Mengajar*, Jakarta: penerbit PT. Bumi Aksara.

- Hamiseno, Winarno. 1990. *Petunjuk Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar*, Jakarta: Depdikbud RI.
- Hanum, Farida dan Sisca Rahmadonna. 2010. *Implementasi Model Pembelajaran Multikultural di SD Provinsi DIY*. Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Vol.03 No.1, Maret Yogyakarta: UNY.
- Hernandez, Hilda. 1989. *Multicultural Education: A teacher Guide to linking Context, Process, and Content*, New Jersey & Ohio: Prentice Hall.
- Hidayat, Zulyani. 1997. *Ensiklopedi Suku Bangsa Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Homby, AS. 1995. *Oxford Advanced Learner's Dictionary Of Current English*, New York: Oxford University Press.
- Humaedi, M.Alie. 2014. *Kegagalan Akulturasi Budaya dan Isu Agama dalam Konflik Lampung*. Jurnal Analisa Volume 21 Nomor 02 Desember 2014 halaman 149-162. Jakarta: Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI.
- Ichsan. 2010. *Pendidikan Multikultural di SMP Negeri 5 Makasar*. Skripsi UINSunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Idi, Abdullah. 2007. *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Ihsan, Fuad. 2001. *Dasar-Dasar Kependidikan* (Jakarta: Rineka Cipta)
- Ismail SM dan Abdul Mukti. 2000. *Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jati, Wasisto Raharjo. 2014. *Toleransi Beragama Dalam Pendidikan Multikulturalisme Peserta didik SMA Katolik Sang Timur Yogyakarta*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jurnal Cakrawala Pendidikan, Februari 2014, Th. XXXIII, No. 1.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2014. *Buku Guru: Ilmu Pengetahuan Sosial. SMP Kelas VII*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 2013. *Buku Siswa: Ilmu Pengetahuan Sosial SMP Kelas VII*
- Kentli, Fulya Damla. 2009. *Comparison of Hidden Curriculum Theories*. Euro-pean Journal Educational Studies.

- Khurotin, Siti. 2010. *Pelaksanaan Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural dan Membina Toleransi Beragama di SMA "Selamat Pagi Indonesia" Batu*. Skripsi. Malang: UIN Malang
- Koentjaraningrat. 1990. *Sejarah Teori Antropologi II*. Jakarta: UI Press.1995. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* Jakarta: Djambatan.
- _____. 1993. *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Kosim, Muhammad. 2010. *Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural (Studi Teks Mata Pelajaran PAI di SMA*. *Jurnal Tadris*. Vol 5 Nomor 2.
- Lauer, Robert H. 1993. *Perspektif Tentang perubahan Sosial*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- M. Amirin, Tatang. 2012. *Implementasi Pendekatan Pendidikan Multikultural Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia*. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi* Volume 1, Nomor 1, Juni. Yogyakarta: FIP UNY.
- Ma'arif, Syamsul, 2005. *Malakah. Islam Dan Pendidikan Pluralisme: Menampilkan Wajah Islam Toleran Melalui Kurikulum PAI Berbasis Kemajemukan*.
- Mahfud, Choirul. 2009. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mania, Sitti. 2010. *Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Pembelajaran*. *Jurnal Lentera Pendidikan*. Vol.13. No. 1. Juni 2010
- Margolis, Eric dkk. 2001. "Hiding and Outing the Curriculum". *Dalam The Hidden Curriculum in Higher Education*. Editor Margolis, Eric. New York: Routledge.
- Marzuki, Suparman. 2008. *Workshop hasil penelitian di tiga wilayah "Mendorong Pengakuan, Penghormatan & Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Indonesia"*. Lombok,. *Makalah Konflik Tanah di Indonesia*.
- Miarso, Yusufhadi. 2004. *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media.
- Mulyana, Rohmad. 2004. *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeta.

- Mulyasa, E. 2002. *Kurikulum berbasis Kompetensi, Konsep Karakteristik, dan Implementasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Najib, Muhammad dkk. Ed. 1996. *Demokrasi dalam Perspektif Budaya Nusantara*. Yogyakarta: LKPSM.
- Nasikun, 2004. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nieto, Sonia. 2002. *Language, Culture and Teaching Mahwah*. NJ: LawrenceEarlbaum.
- Prayitno. 2009. *Pendidikan dasar Teori dan Praksis*. Padang: UNP Press.
- Puspawidjaja, Rizani. 1968. *Hukum Adat Perkawinan Masyarakat Adat Lampung Buwai Subing*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rosidi. 2013. *Metode Dakwah Multikultural Merajut Perdamaian Pasca Konflik Sosial Berbau Sara*. Bandar Lampung: Harakindo Publishing.
- Rusman. 2013. *Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sa, Sabaruddin. 2012. *Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung*. Jakarta: Buletin Way LimaManjau.
- Salam, Burhanuddin, 1997. *Pengantar Pedagogik; dasar-dasar ilmu mendidik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Santosa, Slamet. 2004. *Dinamika Kelompok*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Schreiter, Robert J. 1996. *Rancang Bangun Teologi Lokal*. Jakarta: GunungMulia.
- Soerjono Soekanto, 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja GrafindoPersada.
- Soleman B. Taneko. 1982. *Struktur dan Proses Sosial: Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: Rajawali.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartono, Suparlan 2007. *Filsafat Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sujadi, Firman. 2012. *Lampung Sai Bumi Ruwa Jurai*, Jakarta: Cita Insan Madani Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Suparlan, Parsudi. 1999. *Konflik Sosial dan Alternatif Pemecahannya (dalam Jurnal Antropologi Indonesia, Th,XXIII, No.58.*
- _____. 2012. *Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural. Makalah ini di sajikan dalam Sesi Pleno I pada Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia ke-3: "Membangun Kembali Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika": Menuju Masyarakat Multikultural", Universitas Udayana, Denpasar. Bali. 16-19 Juli 2002*
- Suparno, Paulus. (2001). *Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan. Yogyakarta:Kanisius.*
- Suparta, Mundzier. 2008. *Islamic Multicultural Education. Al-Ghazali Center. Jakarta.*
- Suwardani, Ni Putu. 2015. *Pewarisan Nilai-nilai Kearifan Lokal untuk Memproteksi Masyarakat Bali dari Dampak Negatif Globalisasi. Jurnal Kajian Bali Vol. 05. No.02. Oktober 2015. Denpasar: Universitas Hindu Indonesia.*
- Tafwiroh, Siti. 2014. *Pendidikan Multikultural Perspektif AL Quran (Telaah Surah AL Hujurat Ayat 9-13) Skripsi Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islan Negeri Salatiga*
- Taylor, Charles. 1994. "The Politics of Recognition" dalam Amy Gutman. *Multiculturalism, Examining the Politics of Recognition Princenton: Princenton University Press.*
- Tilaar, H.A.R. 2002. *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat*
- Tilaar, H.A.R. 2002. *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Paedagogik Transformatif Untuk Indonesia. Jakarta: Grasindo.*
- _____. 2002. *Multikulturalisme; Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional. Jakarta: Grasindo*
- Undang - undang Republik Indonesia. No. 22 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS. 2003. Bandung: Citra Umbara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Usman, Uzer. 1993. *Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar. Bandung:Remaja Rosdha Karya.*

- Wisnumurti, Oka. 2008. *Mengelola Nilai Kearifan Lokal Dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama (suatu tinjauan Empiris Sosiologi)* dalam Kongres Bahasa Tgl 28-31 Oktober 2008. Jakarta.
- Wulandari, Taat. 2013. *Pendidikan Multikultural di SMP Negeri Yogyakarta*. Published on Program Pascasarjana. Yogyakarta: UNY.
- Yaqin, M. Ainul. 2005. *Pendidikan Multikultural Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Zamroni. 2010. *The implementation of multicultural education. A reader*. Yogyakarta: Graduate Program The State University of Yogyakarta.
- _____. 2011. *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: Gavin Kalam Utama.
- Zuhairini dkk. 1993. *Metode Pendidikan Agama*. Solo: CV. Ramadhani.
- Asy'arie, Musa. 2004. "Pendidikan Multikultural dan Konflik Bangsa" www.kompas.co.id. 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2006. *Pembelajaran yang Efektif, Efisien dan Menyenangkan*. <http://www.depdiknas.go.id>
- Departemen Pendidikan Nasional. 2006. *Pembelajaran IPS Terpadu*. <http://www.depdiknas.go.id>
- Flavier et al. 1995: 479; cited on 12 January, 2012 from www.worldbank.org-/afr/ik/basic.htm.
- Gorski, Paul C. 2010. "The challenge of defining „multicultural education“." Dari www.edchange.org/multicultural/initial.html.
- Ibrahim, Rustam. 2013. *Pendidikan Multikultural: Pengertian, Prinsip, dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam*. Jurnal ADDIN Vol. 7, No. 1, Februari 2013. Surakarta: Universitas Nahdlatul Ulama. <https://www.academia.edu/32579527/> diakses pada 26 Oktober 2014.

Siroj, Rusdy. A. 2004. *Pemerolehan Pengetahuan Menurut Pandangan Konstruktivistik*. <http://www.depdiknas.go.id/Jurnal/43/rusdy-a-siroj.htm>

Teliti, Taat. 2013. *Pendidikan Multikultural di SMP*. Published on Program Pascasarjana (<http://pps.uny.ac.id>).

Warren 1991; cited on 12 January, 2012 from www.worldbank.org/afr/ik/-basic.htm.

<http://sejarahharirayahindu.Blogspot.co.id/2012/06/menyamabraya.html>.

<http://www.imgrum.org/user/sejarahbali/1510635132/1204965205826737952150635132>.

TENTANG PENULIS



Dr. Sri Ilham Nasution, S. Sos., M. Pd. Dosen tetap di (UIN) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Riwayat Pendidikan formal mulai dari SD di Padang tahun 1983, SMPN 7 Padang tahun 1986, SMAN 7 Padang tahun 1989, Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (STISIP) Jurusan Kesejahteraan sosial tahun 1994.

Magister Pendidikan Sosiologi Prodi Pendidikan IPS pada Program Pascasarjana UNP tahun 2002. Pada tahun 2017 meraih gelar Doktor di Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang (UNP).